

**CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
MATA KULIAH WAJIB NASIONAL
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (SI)**



Editor :

Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, MA

Dr. H. Aos Kuswandi, Drs., M.Si

Dr. Hj. Dewi Kurniasih, M.Si

Dr. Hj. Dyah Mutiarin, M.Si



**PENERBIT
KAPSIPI**

**CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
MATA KULIAH WAJIB NASIONAL
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (S1)**



PENERBIT
KAPSIPI

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2002
tentang Hak Cipta Lingkup Hak Cipta

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Editor : Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, MA
Dr. H. Aos Kuswandi, Drs., M.Si
Dr. Hj. Dewi Kurniasih, M.Si
Dr. Hj. Dyah Mutiarin, M.Si

Setting/layout : Tim KAPSIPI
Desain Sampul : Tim KAPSIPI

Hak Cipta @ 2018 pada penulis
ISBN : 978-602-60171-7-8

Judul Buku : Kurikulum Nasional Program Studi Ilmu Pemerintahan
Jenjang Strata Satu (S1)
Penerbit : KAPSIPI Bandung
Alamat : Jl. Sukaasih Atas Raya No. 219 RT 01 RW006, Sindang Jaya –
Bandung
Cetakan 1 : 2018

Tim Penyusun

1. Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, MA
2. Prof. Dr. H. Achmad Nurmandi, M.Sc
3. Prof. Dr. H. Nandang Alamsyah
Deliarnoor, S.H., M.Hum
4. Dr. H. Aos Kuswandi, Drs., M.Si
5. Dr. Hj. Dewi Kurniasih, M.Si
6. Dr. Hj. Dyah Mutiarin, M.Si
7. Dr. Siti Chaeriyah, M.Si
8. Dr. Teguh Yuwono, M.Pol
9. Dr. Siti Aisyah, M.Pd
10. Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si
11. Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP., M.Si
12. Dr. Titin, M.Si
13. Dr. Suranto, M.Pol
14. Dr. Suswanta, M.Si
15. Dr. Rahyu Nur Raufi, M.Si
16. Dr. Alfon Kimbal, S.Sos., M.Si
17. Dr. Agus Joko Purwanto, S.IP., M.Si
18. Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si
19. Indra Aditya, S.IP., M.I.Pol
20. Sopyan Resmana, S.IP., MA
21. Ika Arinia Indriyany, MA
22. Analius Giawa, S.IP, M.Si
23. Dra. Mani Festati Broto, M.Ed
24. Rendra Setyadiharja, S.Sos., M.IP
25. Rahmatullah, S.IP., M.Si
26. Bahtiar, SH., M.Si
27. Yamardi, S.IP., M.Si
28. Dra. Nurhamni, M.Si
29. Nur Hasanah, S.Sos., M.Si
30. Ferri Wicaksono, S.IP., MA
31. Hj. Hikmah Muhaimim, S.Sos.I.,
M.PSDM
32. Bramantyo Tri Asmoro, S.Hub.Int.,
M.PSDM
33. Dra. Puji Astuti, M.Si
34. Anyualatha Haridison, M.Si
35. Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A
36. Novia Kencana, M.P.A
37. Hj. Siti Nuarini, Dra., M.Si
38. Kiki Endah, S.Sos., M.Si
39. Drs. Itok Wicaksono, M.Si
40. Tatik Fidowaty, S.IP., M.Si
41. Drs. Apriansyah, M.Si
42. Raja Dachroni, S.Sos., M.Si
43. Rema Marina, S.Sos
44. Baskoro Wicaksono, S.IP., M.IP
45. Muhammad Zuhdan, S.IP., MA
46. Rahmad Gustomy, S.IP., M.IP
47. Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP., M.IP
48. Edhi Siswanto, S.IP., M.Si
49. Budi Mulianto, S.IP., M.Si
50. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si
51. M. Eko Atmojo, M.IP
52. Eva Kurnia Farhan, S.IP., M.PA
53. Muh. Fadil, S.IP., M.Si
54. Sakir, S.IP., M.Si
55. Dwian Hartomi PE, S.IP., M.IP
56. Riska Sarofah, S.IP., M.IP

|| KATA PENGANTAR

Salam sejahtera, semoga Bapak/Ibu Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan beserta Sivitas Akademika senantiasa berada dalam Ridha dan Lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) tahun 2014, setiap program studi wajib dilengkapi dengan target capaian pembelajaran sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program studi terhadap para pemangku kepentingan.

Untuk keperluan tersebut, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi c.q. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, berdasarkan amanah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 tahun 2013 telah menyusun Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.

Menindaklanjuti kebijakan pemerintahan terkait dengan penyelenggaraan program studi, pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan atau Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) penting untuk mendukung dan menyusun capaian pembelajaran. Terkait dengan hal tersebut dalam mengkaji, mengoreksi, menyesuaikan, merumuskan ulang, atau memperbaharui rumusan CP lulusannya, maka Program Studi Ilmu Pemerintahan agar rumusannya memenuhi ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan esensi CP Program Studi Ilmu Pemerintahan maka perlu memperhatikan rambu-rambu dalam panduan capaian pembelajaran lulusan program studi ilmu pemerintahan. Dengan demikian CP lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan di Indonesia akan memiliki standar

kemampuan minimal yang sama sebagai lulusan dari Sarjana Ilmu Pemerintahan.

Untuk dapat menapai kompetensi lulusan program studi Ilmu Pemerintahan, pada tingkat Nasional, KAPSIPI sudah menetapkan Mata Kuliah Wajib Nasional sebanyak 19 Mata Kuliah yang ditetapkan pada tahun 2015. Selanjutnya sebagai implementasi dari upaya mencapai tujuan dari kurikulum KKNi maka, dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) diuraikan dalam bentuk perencanaan proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran merupakan bagian tak terpisahkan dari KPT. Sesuai dengan SN Dikti, seperti disebut dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 12 ayat 1, perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap matakuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Untuk standarisasi Kurikulum dan RPS Mata Kuliah Wajib Nasional Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, selanjutnya KAPSIPI merumuskan RPS yang berlaku dan diharapkan dapat menjadi pedoman pembelajaran para dosen yang mengampu mata kuliah tersebut pada setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi Ilmu Pemerintahan.

Menjadi tujuan kami, dengan disusunnya buku ini, diharapkan memberikan manfaat bagi para penyelenggara pendidikan Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Perguruan Tinggi di Indonesia. Buku ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan lulusan program studi Ilmu Pemerintahan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dan sesuai dengan Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNi).

Yogyakarta, Oktober 2018
Ketua KAPSIPI
Prof. Dr. Drs., H. Utang Suwaryo, MA.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	3
C. MANFAAT DAN TUJUAN	4

BAB II CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN RPS PROGAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU (S1)

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN	5
B. PENGEMBANGAN RPS MATA KULIAH WAJIB KAPSIPI	7
C. MATA KULIAH DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN	8
D. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	17

BAB III PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. RPS PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU (S1)
2. DAFTAR HADIR LOKAKARYA KURIKULUM
3. PERATURAN PRESIDEN NO. 08 TAHUN 2012 TENTANG KKN
4. PERMENRISTEKDIKTI NO. 44 TAHUN 2015 TENTANG SNPT
5. PANDUAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI TAHUN 2016

6. CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN KURKULUM INTI NASIONAL
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN UNTUK JENJANG
SARJANA (STRATA SATU/S1) HASIL RUMUSAN KESATUAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA
(KAPSIPI)

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai ketentuan yang tercantum dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI) tahun 2014, setiap program studi wajib dilengkapi dengan target capaian pembelajaran sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan program studi terhadap para pemangku kepentingan. Untuk keperluan tersebut, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi c.q. Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, berdasarkan amanah Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 73 tahun 2013 telah menyusun Panduan Capaian Pembelajaran (CP) lulusan program studi di perguruan tinggi.

Menindaklanjuti kebijakan pemerintahan terkait dengan penyelenggaraan program studi, pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan di Indonesia yang tergabung dalam Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (KAPSIPI) penting untuk mendukung dan menyusun capaian pembelajaran. Terkait dengan hal tersebut dalam mengaji, mengoreksi, menyesuaikan, merumuskan ulang, atau memperbaharui rumusan CP lulusannya, maka Program Studi Ilmu Pemerintahan agar rumusannya memenuhi ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan esensi CP Program Studi Ilmu Pemerintahan maka perlu memperhatikan rambu-rambu dalam panduan capaian

pembelajaran lulusan program studi ilmu pemerintahan. Dengan demikian CP lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan di Indonesia akan memiliki standar kemampuan minimal yang sama sebagai lulusan dari Sarjana Ilmu Pemerintahan.

Capaian Pembelajaran lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan merupakan rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusannya, juga merupakan pernyataan mutu lulusan dari Program Studi Ilmu Pemerintahan. Oleh karena itu, Program Studi Ilmu Pemerintahan di Indonesia berkewajiban untuk memiliki rumusan CP yang berlaku secara nasional yang dapat dipertanggungjawabkan baik isi, kelengkapan deskripsi sesuai dengan ketentuan dalam SN DIKTI, serta kesetaraan level kualifikasinya dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Karena merupakan rumusan tujuan pendidikan dan pernyataan mutu lulusan, perumusan CP Program Studi Ilmu Pemerintahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan kurikulum Program Studi Ilmu Pemerintahan. Selanjutnya dalam Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang dikembangkan sejak tahun 2002, perencanaan pembelajaran dikenal dengan nama Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dimana tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD). Saat ini KPT yang dikembangkan dengan landasan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Untuk dapat menapai kompetensi lulusan program studi Ilmu Pemerintahan, pada tingkat Nasional, KAPSIPI sudah menetapkan Mata Kuliah Wajib Nasional sebanyak 19 Mata Kuliah yang ditetapkan pada tahun 2015. Selanjutnya sebagai implementasi dari upaya mencapai tujuan dari kurikulum KKNI maka, dari Capaian Pembelajaran Lulusan

(CPL) diuraikan dalam bentuk perencanaan proses pembelajaran. Perencanaan proses pembelajaran merupakan bagian tak terpisahkan dari KPT. Sesuai dengan SN Dikti, seperti disebut dalam Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 Pasal 12 ayat 1, perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap matakuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Untuk standarisi Kurikulum dan RPS Mata Kuliah Wajib Nasional Pada Program Studi Ilmu Pemerintahan, selanjutnya KAPSIPI merumuskan RPS yang berlaku dan diharapkan dapat menjadi pedoman pembelajaran para dosen yang mengampu mata kuliah tersebut pada setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan program studi Ilmu Pemerintahan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam buku ini telah dirumuskan Matakuliah Wajib Nasional , Capaian Pembelajaran dan RPS untuk program studi strata satu di lingkungan Program Studi Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia yang tergabung ke dalam KAPSIPI.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disingkat UU Dikti 12/2012. Pasal 29 UU Dikti 12/2012 menyatakan bahwa:
 - a. Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
 - b. Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi

lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.

- c. Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor (pasal 1 ayat 1).
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, terutama Pasal 12 ayat 1, perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap matakuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

C. MANFAAT DAN TUJUAN

1. Untuk mengarahkan pengelola Program Studi Ilmu Pemerintahan agar mencapai target mutu lulusan.
2. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang pernyataan mutu lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan yang diselenggarakan di perguruan tinggi.
3. Memberikan kejelasan mutu lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan sehingga lebih mudah diterima pada lapangan bidang pekerjaan.

BAB II

CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN RPS PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA SATU (S1)

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

Dalam dokumen kurikulum program studi, CP harus dideskripsikan dalam bentuk pernyataan. Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KKNl dinyatakan sebagai CP yang mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan untuk dapat melakukan kerja secara bermutu, serta wewenang dan kewajiban seseorang sesuai dengan level kualifikasinya. Aspek pembangun jati diri bangsa tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila Pancasila dan penegakan hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia.

Dalam KKNl, CP didefinisikan sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak. Rumusan CP disusun

dalam 4 unsur yaitu sikap dan tata nilai, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan wewenang dan tanggung jawab.

Empat unsur dalam CP diartikan sebagai berikut:

- a. Sikap dan tata nilai: merupakan perilaku dan tata nilai yang merupakan karakter atau jati diri bangsa dan negara Indonesia. Sikap dan tata nilai ini terinternalisasi selama proses belajar , baik terstruktur maupun tidak.
- b. Kemampuan kerja: merupakan wujud akhir dari transformasi potensi yang ada dalam setiap individu pembelajar menjadi kompetensi atau kemampuan yang aplikatif dan bermanfaat.
- c. Penguasaan pengetahuan: merupakan informasi yang telah diproses dan diorganisasikan untuk memperoleh pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman yang terakumulasi untuk memiliki suatu kemampuan.
- d. Wewenang dan tanggung Jawab: merupakan konsekuensi seorang pembelajar yang telah memiliki kemampuan dan pengetahuan pendukungnya untuk berperan dalam masyarakat secara benar dan beretika.

Dengan mengacu pada deskripsi CP KKNi di atas, rumusan CP lulusan Program Studi Ilmu Pemerintahan dalam SKL dinyatakan kedalam tiga unsur yakni sikap, pengetahuan,dan ketrampilan yang terbagi dalam keterampilan umum dan khusus, yang disesuaikan untuk lulusan perguruan tinggi (lihat Gambar 1 dan Gambar 2) :

1. Unsur sikap dalam CP (SKL) merupakan sikap yang dimiliki oleh lulusan pendidikan tinggi,.
2. Unsur pengetahuan memiliki pengertian yang setara dengan unsur 'penguasaan pengetahuan' dari CP KKNi, yang harus dikuasai oleh lulusan program studi tertentu

3. Unsur “keterampilan” merupakan gabungan unsur ‘kemampuan kerja’ dan unsur ‘kewenangan dan tanggung jawab’ dari deskripsi CP KKNi.
4. Unsur keterampilan khusus mencirikan kemampuan lulusan program studi sesuai bidang keilmuan/keahlian tertentu.
5. Unsur ketrampilan umum mencirikan kemampuan lulusan sesuai tingkat dan jenis program pendidikan tidak tergantung pada bidang studinya.

B. PENGEMBANGAN RPS MATA KULIAH WAJIB KAPSIPI

Dalam perumusan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), secara garis besar, terdapat 4 (empat) bagian utama pengembangan kurikulum program studi, yaitu:

1. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL);
2. Pembentukan mata kuliah
3. Penyusunan mata kuliah dalam semester.
4. Penyusunan RPS untuk setiap Mata Kuliah

Selanjutnya dalam pengembangan KPT meliputi identifikasi profil lulusan dan CPL. Kemudian pada tahap selanjutnya merupakan identifikasi bahan kajian keilmuan untuk pembentukan matakuliah dan penetapan beban sks. Tahap tiga adalah melakukan distribusi mata kuliah dalam sebaran semester dan pengembangan rencana proses pembelajarannya. Dan yang terakhir dalam menyusun, dan mengembangkan Mata Kuliah ke dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS).

Sebagai bagian dari Standar Proses Pembelajaran, seperti disebut dalam Pasal 12 ayat 3 Permenristekdikti No. 44 tahun 2015,

RPS paling sedikit memuat: a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, b) CPL yang dibebankan pada mata kuliah, c) kemampuan akhir yang direncanakan tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL, d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, e) metode pembelajaran, f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran, g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, h) kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan i) daftar referensi yang digunakan.

C. MATA KULIAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN

No.	Mata Kuliah	Deskripsi	Capaian Pembelajaran
1.	Dasar-Dasar Ilmu Pemerintahan	Mata kuliah ini menguraikan dan menjelaskan tentang pemerintahan sebagai suatu gejala empiris dan hubungannya dengan kehidupan manusia, eksistensi ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu dan seni, pengertian objek dan ruang lingkup kajian ilmu pemerintahan, hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lain, bentuk dan system pemerintahan, metode dan pendekatan analisa pemerintahan, penelitian dan	Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang gejala-gejala pemerintahan, <i>state of the art</i> dari ilmu pemerintahan.

		pengembangan ilmu pemerintahan	
2.	Etika Pemerintahan	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pemahaman, ketrampilan dan kapasitas mahasiswa dalam melakukan analisis dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada etika.	Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pelbagai teori tentang etika dan penerapannya dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju <i>Good Governance</i> .
3.	Tata Kelola Pemerintahan	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa dalam Melakukan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.	Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pelbagai teori dan konteks tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan <i>Good Governance</i> .
4.	Birokrasi Pemerintahan	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa dalam menjelaskan dan menganalisis birokrasi pemerintahan.	Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan pelbagai teori birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
5.	Pemerintahan Nasional	Mata kuliah ini menelaah dan menjelaskan tentang	Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa

		bentukbentuk pemerintahan, sistem pemerintahan, tujuan dan fungsi pemerintahan, faktor lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, demokrasi desentralisasi dan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan, lembaga dan birokrasi pemerintahan, hubungan pusatdaerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibahas juga konsep <i>reinventing government</i> dan <i>good governance</i>.	diharapkan dapat memahami dan mampu menjelaskan tentang pemerintahan nasional dengan berbagai problematiknya
6.	Pemerintahan Daerah	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa dalam melakukan analisis terhadap pemerintahan daerah.	Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pelbagai teori tentang pemerintahan daerah.
7.	Pemerintahan Desa	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan tentang konsep, teori, pendekatan, dinamika perkembangan kebijakan dalam pemerintahan desa. Selain itu diberikan	Setelah menempuh Mata Kuliah ini mahasiswa mengetahui, mengerti, memahami dan mampu menganalisis konsep, teori, perkembangan serta

		juga mengenai tipe, asas dalam pemerintahan, struktur kelembagaan, hubungan antar lembaga dalam pemerintahan desa, dan peranan pemerintah desa dan BPD serta keuangan desa, APBDes dan LKPJ Kepala Desa.	penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berbagai dinamika kelembagaan dan regulasi.
8.	Kepemimpinan Pemerintahan	Mata Kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan konsep dan teori serta keterampilan kepemimpinan pemerintahan yang ideal dan dapat dipraktikan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik nasional, daerah maupun desa.	Setelah mempelajari matakuliah ini mahasiswa memiliki pengetahuan dan mampu memahami dan menganalisis kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta terampil dalam memimpin pada saat bekerja nanti.
9.	Studi Konstitusi	Mata kuliah ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi dan konstitusionalisme termasuk di dalamnya UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia.	Pada akhir mata kuliah, mahasiswa mampu memahami berbagai pokok kajian yang termasuk dalam ruang lingkup konstitusionalisme antara lain, paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme, konstitusi sebagai hukum dasar negara, sejarah perkembangan

			konstitusi, materi muatan, klasifikasi konstitusi, nilai konstitusi, daya ikat konstitusi, negara dan konstitusi, perbandingan konstitusi, prosedur serta sistem perubahan konstitusi, UUD 1945 beserta seluruh amandemennya sebagai konstitusi NKRI.
10.	Perbandingan Pemerintahan	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa dalam melakukan analisis dalam membandingkan pemerintahan.	Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pelbagai teori perbandingan pemerintahan dan menganalisisnya.
11.	Kebijakan Sektor Publik	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan konsep, teori dan pendekatan serta ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa untuk melakukan analisis kebijakan khususnya kebijakan sektor publik yang mencakup aspek formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.	Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan menguasai konsep teori, pendekatan dan analisis kebijakan publik serta mampu menerapkan pelbagai teori analisis kebijakan dalam kegiatan praktis tata kelola pemerintahan.

		Pendekatan yang digunakan bersifat multi disiplin/multi perspektif.	
12.	Pelayanan Sektor Publik	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa untuk melakukan memahami konsep dasar dan mengidentifikasi isu serta mengembangkan praktek tata kelola pelayanan sektor publik untuk mendukung tata pemerintahan yang baik. Pendekatan yang digunakan bersifat multi disiplin/multi perspektif	Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar dan mengidentifikasi isu serta mengembangkan praktek tata kelola pelayanan sektor publik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik
13.	Tata Kelola SDM Pemerintahan	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa untuk melakukan praktek tata kelola SDM Pemerintahan yang mencakup fungsi, pengembangan pegawai serta teori penataan kepegawaian. pendekatan yang digunakan bersifat multi disiplin /multi perspektif	Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pelbagai teori tata kelola SDM Pemerintahan dalam kegiatan praktis, serta siap mengimplementasikan tata kelola SDM sesuai dengan standard yang berlaku.

14.	Tata Kelola Keuangan Pemerintahan	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan Pengetahuan serta ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa untuk melakukan analisis tata kelola keuangan pemerintahan. Pendekatan yang digunakan bersifat multi disiplin /multi perspektif.	Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu mampu menyajikan dan menganalisis tata kelola keuangan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.
15.	Teknologi Informasi Pemerintahan	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan keterampilan dan kapabilitas mahasiswa membahas konteks global yang melatarbelakangi berkembangnya kajian dan kebijakan aplikasi e- Government, termasuk mengenai perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi dalam era globalisasi serta dampaknya pada manajemen dan pelayanan pemerintahan	Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menerangkan dan memiliki keterampilan mengenai beragam kebijakan dan pelayanan sistem informasi yang diaplikasikan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan.
16.	Ekologi Pemerintahan	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai Hubungan penyelenggaraan	Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa akan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menganalisis berbagai faktor baik internal maupun

		pemerintahan di Indonesia dengan berbagai faktor internal dan eksternal, menyangkut struktur, fungsi, proses dan lingkungan pemerintahan baik nasional, global maupun daerah.	eksternal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terutama berbagai faktor terkait dengan struktur, fungsi, proses, hubungan kelembagaan dan lingkungan pemerintahan nasional, global dan daerah.
17.	Komunikasi Pemerintahan	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang komunikasi pemerintahan baik komunikasi internal, komunikasi antar lembaga maupun komunikasi dengan pihak luar (Masyarakat dan pihak swasta) terkait dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan kontribusi komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.	Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa memiliki pengetahuan komunikasi pemerintahan dan keterampilan berkomunikasi dalam pemerintahan, memahami fungsi dan kontribusi faktor-faktor komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks nasional, regional dan internasional, memahami pola komunikasi aktor pemerintahan dan umpan balik dari masyarakat kepada pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.
18.	Hukum Tata Pemerintahan	Mata kuliah ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum tata	Pada akhir mata kuliah, mahasiswa mampu memahami berbagai

		pemerintahan, antara lain sumber-sumber hukum tata pemerintahan, susunan pemerintahan Indonesia, keputusan tata usaha negara, badan hukum publik dan privat, barang-barang milik pemerintah atau negara, campur tangan penguasa dalam kehidupan masyarakat, kedudukan hukum para petugas publik, perbuatan pemerintah, keabsahan tindak pemerintahan, tindakan atau perlindungan hukum di Indonesia, serta peradilan tata usaha negara.	pokok kajian yang termasuk dalam ruang lingkup hukum tata pemerintahan, antara lain, pengertian hukum tata pemerintahan, hubungan hukum tata pemerintahan dengan ilmu sosial lain, mengerti dan memahami sumber-sumber hukum tata pemerintahan, susunan pemerintahan pusat dan daerah, keputusan tata usaha negara dan keputusan yang tidak dapat di PTUN-kan, badan hukum publik dan privat, barang-barang milik pemerintah pusat dan daerah, kedudukan hukum para petugas publik, dan lainlain.
19.	Metodologi Ilmu Pemerintahan	Mata kuliah ini didesain untuk membentuk kemampuan mahasiswa sehingga dapat memahami gejala-gejala pemerintahan, menganalisa masalah-masalah pemerintahan serta memecahkan berbagai problematika pemerintahan secara ilmiah dengan	Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, mengembangkan dan membangun konsep, generalisasi, dan teori, serta mampu menggunakan metode dan pendekatan yang tepat dalam menganalisa gejala-gejala

		menggunakan berbagai metode dan pendekatan. Oleh sebab itu di dalam mata kuliah ini dibahas tentang bagaimana: memahami, menguji, mengembangkan dan membangun suatu konsep, generalisasi dan teori pemerintahan (theory building). Mengkaji metode dan pendekatan-pendekatan analisa apa saja yang bisa digunakan di dalam menganalisa dan memecahkan problematika pemerintahan yang terjadi di lapangan empiris.	pemerintahan.
--	--	--	----------------------

D. RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Terkait Dengan penyusunan RPS, maka terminologi tujuan pembelajaran dan kompoonen perencanaan proses pembelajaran disajikan dalam tabel 1 berikut,

Tabel 1. Terminologi RPS dan Silabus

Komponen RPS SN Dikti
Identitas program studi dan mata kuliah
CPL yang dibebankan pada mata kuliah
Kemampaun akhir tiap tahap
Bahan kajian
Metode Pembelajaran
Waktu
Pengalaman belajar
Kriteria, Indikator dan bobot penilaian
Daftar referensi dan sumber belajar lainnya

Dari tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa komponen RPS SN Dikti nampak komponen-komponen yang harus ada dalam RPS. Selanjutnya RPS disusun dan dikembangkan yang merupakan instrumen wajib proses pembelajaran, dengan memperhatikan kesamaan terminologi yang ada di SN Dikti dan Panduan pengembangan KPT Dikti tahun 2016.

Sesuai dengan rincian komponen RPS dalam SN Dikti dan Panduan Pengembangan KPT Dikti, RPS Mata Kuliah Wajib Nasional Ilmu Pemerintahan Program Sarjana Strata Sat (S1) dikembangkan dengan komponen sebagai berikut:

a. Identitas program studi dan mata kuliah

1. Nama program studi: sesuai yang tercantum dalam ijin pembukaan/pendirian/operasional yang dikeluarkan Kementerian.

2. Nama, kode, semester, sks mata kuliah: sesuai rancangan kurikulum yang ada di program studi.
3. Nama dosen pengampu: sesuai dengan nama dosen yang mengembangkan baik secara mandiri dan/atau kelompok bidang.

b. CPL yang dibebankan pada mata kuliah

Meliputi unsur Sikap dan Keterampilan umum seperti tercantum dalam SN Dikti dengan menyesuaikan level KKNI. Sementara Pengetahuan dan Keterampilan Khusus sesuai dengan kesepakatan program studi sejenis. CPL yang digunakan adalah CPL yang telah melalui pemeriksaan format dan masa sanggah yang selanjutnya ditetapkan oleh Kemenristekdikti sebagai CPL resmi yang dapat diakses di http://kkni-kemenristekdikti.org/pendidikan/CP_final.

Program studi wajib mengidentifikasi distribusi CPL dalam mata kuliah. Hal ini diperlukan untuk menjamin kontribusi setiap mata kuliah yang diselenggarakan untuk memenuhi CPL, dan/atau sebaliknya agar tidak ada satu pun CPL yang tidak dipenuhi program studi dalam penyelenggaraan kurikulumnya.

c. Bahan kajian

Bahan kajian dalam RPS Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu (S1) terdiri atas bahan kajian keilmuan dan bahan kajian mata kuliah.

- Bahan kajian keilmuan, sebagai bagian dari kurikulum, bahan kajian keilmuan dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu beserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang

sudah disepakati forum program studi sejenis sebagai ciri bidang ilmu program studi tersebut.

- Bahan kajian mata kuliah, selanjutnya disebut sebagai materi ajar merupakan uraian dari bahan kajian keilmuan yang dipelajari dan dikembangkan oleh dosen atau kelompok dosen sesuai rancangan kurikulum program studi.

Bahan kajian keilmuan dan materi ajar hendaknya diperbaharui atau dikembangkan sesuai perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan program studi.

d. Capaian Pembelajaran mata kuliah (CPMK)

Selanjutnya CPL yang dibebankan pada mata kuliah diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK). Dalam terminologi silabus KBK, CPMK setara dengan Standar Kompetensi (SK).

CPMK harus dibuat dengan memperhatikan kecukupan unsur sikap, keterampilan umum, pengetahuan dan keterampilan khusus yang dibebankan pada mata kuliah.

e. Pengalaman belajar

Pengalaman belajar mahasiswa merupakan kegiatan belajar yang harus dikerjakan mahasiswa selama satu semester. Pengalaman belajar mahasiswa identik dengan deskripsi matakuliah pada Silabus KBK Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu (S1).

f. Daftar referensi

Berisi buku acuan dan atau sumber belajar lain yang relevan yang digunakan dalam proses pembelajaran.

g. Tahap

Berisi kode tahapan pembelajaran dalam angka romawi. Tahap pembelajaran tidak buat dalam minggu proses pembelajaran mengingat bahwa capaian pembelajaran bisa diselenggarakan tidak secara berurutan sesuai dengan sifatnya yang struktural, hirarkikal dan/atau prosedural. Selanjutnya urutan tahap pembelajaran sesuai sifatnya bisa disepakati bersama mahasiswa dalam Kontrak Perkuliahan.

h. Kemampuan akhir

Kemampuan akhir yang direncanakan untuk tiap tahap pembelajaran dirancang untuk mampu berkontribusi pada pemenuhan CPL yang dibebankan pada mata kuliah.

Dalam terminologi silabus KBK Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu (S1), kemampuan akhir tiap tahap pembelajaran setara dengan Kompetensi Dasar (KD).

i. Materi ajar

Materi ajar yang dimaksud adalah bahan kajian mata kuliah seperti telah diuraikan pada bagian bahan kajian sebelumnya.

j. Referensi

Referensi dalam bentuk buku acuan disandingkan materi ajar dengan menuliskan kode/nomor referensi yang digunakan beserta nomor halamannya. Hal ini diharapkan dapat membantu mahasiswa dan dosen dalam interaksi pembelajaran, terutama untuk mata kuliah yang menggunakan banyak referensi dan/atau sumber belajar lainnya.

k. Metode pembelajaran

Metode pembelajaran dikembangkan untuk setiap tahapan pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata kuliah. Metode yang digunakan dalam proses pembelajaran meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi mahasiswa memenuhi CPL.

Metode pembelajaran dipilih sesuai kegiatan belajar mahasiswa yang mampu memfasilitasi mahasiswa mencapai kemampuan yang diharapkan pada setiap tahapan pembelajaran.

Proses pembelajaran mata kuliah dapat menggunakan salah satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran.

l. Waktu

Waktu pembelajaran dilaksanakan dalam 16 minggu dalam satu semester. Waktu tiap tahapan mengacu pada kesetaraan sks sesuai jenis metode pembelajaran yang dipilih dalam proses pembelajaran.

1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri atas 50 menit kegiatan tatap muka, 60 menit kegiatan terstruktur dan 60 menit kegiatan mandiri per minggu per semester.

1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas 100 menit kegiatan tatap muka dan 70 menit kegiatan mandiri minggu per semester.

1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran

lain yang sejenis, setara dengan 170 menit kegiatan pembelajaran per minggu per semester.

m. Penilaian

Memuat indikator dan bobot penilaian. Kriteria penilaian sesuai dengan teknik pengukuran yang dipilih, dilampirkan menjadi satu bagian tak terpisahkan dari RPS.

- Indikator merupakan unsur-unsur yang menunjukkan ketercapaian tahap kemampuan. Kode CPL dituliskan dalam kolom indikator untuk memudahkan pemilihan teknik pengukurannya.
- Bobot penilaian merupakan ukuran dalam persen yang menunjukkan persentase keberhasilan suatu tahap terhadap keberhasilan seluruh CPL yang dibebankan pada mata kuliah.
- Kriteria merupakan ukuran yang menjadi dasar penilaian ketercapaian tahap kemampuan yang diwujudkan dalam rubrik penilaian sesuai teknik pengukuran yang dipilih .

Format RPS selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel sesuai tahap kemampuan yang direncanakan. Format ini dipilih agar lebih mudah dalam melakukan identifikasi kesesuaian antara tahap kemampuan, materi yang disajikan, metode dan kegiatan yang dipilih, waktu proses serta teknik penilaian yang digunakan.

Terlampir

BAB III

PENUTUP

Buku panduan profil lulusan; capaian pembelajaran, dan bahan kajian (mata kuliah) dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu (S1) yang telah disusun ini diharapkan memberikan manfaat bagi para penyelenggara pendidikan Program Studi Ilmu Pemerintahan pada Perguruan Tinggi di Indonesia. Dengan adanya rumusan pada buku ini menjadi langkah awal untuk mewujudkan lulusan program studi Ilmu Pemerintahan sesuai dengan kompetensi yang diharapkan dan sesuai dengan Kerangka Kompetensi Nasional Indonesia (KKNI).

DAFTAR PUSTAKA

Buku Panduan Penyusunan CP Prodi dan Panduan Penyusunan Kurikulum, Dirpemawa, Dirjen Dikti Kemendikbud, 2014.

Media Online

www.kopertis3.or.id/html/wp-content/uploads/2011/12/sosialisasi-kkni-nasional-dikti.pdf

<http://www.kopertis3.or.id/html/wp-content/uploads/2011/12/penyusunan-learning-outcomes-program-studi-dikti.pdf>.

<http://apsipi.com/files/Lampiran%20%20Capaian%20Pembelajaran%20dan%20Kurikulum%20Inti%20Nasional%20Ilmu%20Pemerintahan.pdf>.

<http://dosen.perbanas.id/wp-content/uploads/2015/05/Buku-Panduan-Kurikulum-Dikti-Pembelajaran-2014.pdf>.

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Permendikti No. 44 tahun 2015 tentang SNPT

LAMPIRAN 1

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (S1)**

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (S1)

Mata Kuliah	:	Tatakelola Keuangan Pemerintahan	Semester	:	Kode Mata Kuliah	:	SKS: 3
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan	Dosen Pengampu	:			
capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini:							
Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyajikan dan menganalisis tatakelola keuangan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.							

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Jenis Evaluasi	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai (100%)
(1) 1	Mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar keuangan publik dan sistem tatakelola keuangan pemerintahan	Pendahuluan - Perkenalan - Sosialisasi RPS Konsep Dasar Keuangan Publik dan Sistem Tatakelola Keuangan Pemerintahan: 1. Konsep dasar keuangan publik 2. Definisi dan sistem tatakelola keuangan pemerintahan	Ceramah, penayangan video, kerja kelompok, tanyajawab, penugasan	(5) 1x3x50'	(6) Review, diskusi, dan presentasi materi	(7) Tes lisan	(8) 1. Ketepatan dan kebenaran memahami Konsep Dasar Keuangan Publik dan Sistem Tatakelola Keuangan Pemerintahan 2. Ketepatan menjelaskan konsep dasar keuangan publik 3. Ketepatan menjelaskan definisi dan sistem tatakelola keuangan	(9) 5%

						3. Pendekatan tatakelola keuangan pemerintahan 4. Fungsi kebijakan anggaran pemerintahan					4. Ketepatan dan kebenaran menjelaskan pendekatan tatakelola keuangan pemerintahan 5. Ketepatan menyajikan fungsi kebijakan anggaran pemerintahan	5%
2	Mampu memahami dan menjelaskan reformasi kebijakan tentang tatakelola keuangan pemerintahan	Reformasi Tatakelola Keuangan Pemerintahan: 1. Prinsip-prinsip tatakelola keuangan pemerintahan 2. Pendekatan tatakelola keuangan pemerintahan 3. Prosedur tatakelola keuangan pemerintahan	Ceramah, penayangan video, kerja kelompok, tanya jawab, penugasan (review materi)	1 x 3 x 50'	Review, diskusi, dan presentasi materi	Tes tulis dan tes lisan	1. Ketepatan memahami reformasi kebijakan tatakelola keuangan pemerintahan 2. Ketepatan menjelaskan Prinsip-prinsip tatakelola keuangan pemerintahan 3. Ketepatan menjelaskan Pendekatan tatakelola keuangan pemerintahan 4. Ketepatan, sistimatis, dan kebenaran					

3	Mampu menjelaskan, memahami, dan mengidentifikasi kebijakan tatakelola keuangan pemerintahan	Kebijakan Tatakelola Keuangan Pemerintahan: 1. Konsep tatakelola keuangan pemerintahan 2. Kebijakan keuangan pemerintahan 3. Penerimaan pemerintahan 4. Sumber-sumber penerimaan pemerintahan 5. Pengeluaran pemerintahan 6. Bentuk-bentuk pengeluaran pemerintahan 7. Struktur kebijakan APBN	Ceramah, penayangan video, kerja kelompok, tanyajawab, penugasan	1 x 3 x 50'	Review, diskusi, dan presentasi materi	Tes tulis dan tes lisan	menjelaskan Prosedur tatakelola keuangan pemerintahan	5%
							1. Ketepatan menjelaskan Konsep tatakelola keuangan pemerintahan 2. Ketepatan dan kebenaran menjelaskan Kebijakan keuangan pemerintahan 3. Ketepatan dan kebenaran menjelaskan Penerimaan pemerintahan 4. Ketepatan dan kebenaran menjelaskan Sumber-sumber penerimaan pemerintahan 5. Ketepatan dan kebenaran menjelaskan Pengeluaran pemerintahan 6. Ketepatan dan kebenaran	

								mengidentifikasi bentuk-bentuk pengeluaran pemerintahan dan 7.Ketepatan dan kebenaran menjelaskan Struktur kebijakan APBN	
4	Mampu memahami, menjelaskan, dan mengidentifikasi dasar hukum penyusunan APBN, prinsip-prinsip penyusunan APBN, relasi eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBN, dan bentuk-bentuk dokumen penganggaran negara (APBN)	Penyusunan APBN: 1. Kebijakan APBN 2. Dasar hukum penyusunan APBN 3. Prinsip-prinsip penyusunan APBN 4. Relasi eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBN 5. Bentuk-bentuk dokumen penganggaran negara (APBN) 6. Perubahan APBN	Ceramah, penayangan video, kerja kelompok, tanya jawab, penugasan	1 x 3 x 50'	Review, diskusi, praktik, dan presentasi materi	Tes tulis dan tes lisan	1. Ketepatan memahami Penyusunan APBN 2. Ketepatan dan kebenaran menjelaskan Kebijakan APBN 3. Ketepatan dan kebenaran menjelaskan Dasar hukum penyusunan APBN 4. Ketepatan menjelaskan Prinsip-prinsip penyusunan APBN 5. Ketepatan menjelaskan Relasi eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBN 6. Ketepatan dan kebenaran menjelaskan Bentuk-bentuk	10%	

								dokumen penganggaran negara (APBN) 7. Ketepatan dan kebenaran memahami Perubahan APBN	
5	Mampu memahami, menjelaskan, dan mengidentifikasi dasar hukum penyusunan APBN, prinsip-prinsip penyusunan APBN, relasi eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBN, dan bentuk-bentuk dokumen penganggaran negara (APBN)	Penyusunan APBN: 1. Kebijakan APBN 2. Dasar hukum penyusunan APBN 3. Prinsip-prinsip penyusunan APBN 4. Relasi eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBN 5. Bentuk-bentuk dokumen penganggaran negara (APBN) 7. Perubahan APBN	Ceramah, penayangan video, kerja kelompok, tanyajawab, penugasan	1 x 3 x 50'	Review, diskusi, praktik, dan presentasi materi	Tes tulis dan tes lisan	1. Ketepatan memahami Penyusunan APBN 2. Ketepatan dan kebenaran menjelaskan Kebijakan APBN 3. Ketepatan dan kebenaran menjelaskan Dasar hukum penyusunan APBN 4. Ketepatan menjelaskan Prinsip-prinsip penyusunan APBN 5. Ketepatan menjelaskan Relasi eksekutif dan legislatif dalam penyusunan APBN 6. Ketepatan dan kebenaran menjelaskan Bentuk-bentuk dokumen penganggaran	10%	

							negara (APBN) 7. Ketepatan dan kebenaran memahami Perubahan APBN	
6	Mampu menjelaskan dan mengidentifikasi prinsip-prinsip dan pendekatan penyusunan APBD	Penyusunan APBD: 1. Prinsip-Prinsip Penyusunan APBD 2. Tahap-tahap penyusunan APBD 3. Bentuk-bentuk dokumen penganggaran keuangan daerah (APBD)	Ceramah, penayangan video, kerja kelompok, tanya jawab, penugasan	2 x 3 x 50'	Review, diskusi, praktik, dan presentasi materi	Tes tulis dan tes lisan	1. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menjelaskan Penyusunan APBD 2. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menjelaskan Prinsip-Prinsip Penyusunan APBD 3. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menjelaskan Tahap-tahap penyusunan APBD 4. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menjelaskan Bentuk-bentuk dokumen penganggaran keuangan daerah (APBD)	10%
7	Mampu memahami, menjelaskan, dan	Penyusunan Dokumen	Ceramah, penayangan	2 x 3 x 50'	Review, diskusi,	Tes tulis, tes lisan,	1. Ketepatan, kebenaran, dan	10%

	menganalisis bentuk-bentuk Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah	Penganggaran Keuangan Daerah: 1. Penyusunan RKPD 2. Penyusunan RKA OPD 3. Penyusunan KUA-PPAS	video, kerja kelompok, tanyajawab, penugasan		praktik, dan presentasi materi	susun dokumen penganggaran	sistimatis memahami dan menjelaskan Penyusunan Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah 2. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis memahami Penyusunan RKPD 3. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis memahami Penyusunan RKA OPD 4. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis memahami Penyusunan KUA-PPAS	
8.	Ujian Tengah Semester (UTS)							
9	Mampu menjelaskan, memahami, menyusun, dan menganalisis dokumen penganggaran keuangan daerah (APBD) secara teknis	Praktik Penyusunan Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah: 1. Penyusunan RKA OPD 2. Analisis	Ceramah, penayangan video, kerja kelompok, tanyajawab, penugasan	2 x 3 x 50'	Review, diskusi, praktik, dan presentasi materi	Tes tulis, tes lisan dan penyusunan dokumen penganggaran	1. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis mampu menyusun Penyusunan Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah secara teknis	15%

							2. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis mamapu menyusun RKA OPD 3. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menganalisis sinkronisasi RKA OPD dan Program Pembangunan Daerah 4. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis memahami Pembahasan dan Penetapan RKA OPD	
10	Mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis proses Pembahasan dan Penetapan APBD	Pembahasan dan Penetapan APBD 1. Pembahasan APBD 2. Relasi Eksekutif dan Legislatif dalam Pembahasan APBD 3. Evaluasi RAPBD 4. Penetapan APBD	Ceramah, penayangan video, kerja kelompok, tanya jawab, penugasan	2 x 3 x 50'	Review, diskusi, dan simulasi pembahasan dan penetapan APBD	Tes tulis, tes lisan	1. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis memahami pembahasan dan Penetapan APBD 2. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis memahami pembahasan APBD 3. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis	10%

11	Mampu memahami, menjelaskan dan mengidentifikasi Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD	Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD : 1. Persiapan Pelaksanaan APBD 2. Penyusunan dan Penetapan DPA OPD 3. Analisis sinkronisasi DPA OPD dan RKA OPD 4. Peran Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (Kepala	Ceramah, penayangan video, kerja kelompok, tanya jawab, penugasan	1 x 3 x 50'	Review, diskusi, dan simulasi pelaksanaan dan penatausahaan APBD	Tes tulis, tes lisan	menganalisis relasi Eksekutif dan Legislatif dalam Pembahasan APBD 4. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menganalisis Evaluasi RAPBD 5. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menganalisis Penetapan APBD	5%
							1. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis memahami dan menjelaskan Persiapan Pelaksanaan APBD 2. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis mahami Penyusunan dan Penetapan DPA OPD 3. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menganalisis sinkronisasi DPA OPD dan RKA OPD 4. Ketepatan,	

						Daerah 5. Peran Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Sekda). ▪ Peran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ▪ Peran Pejabat Pengelola Anggaran/Barang Daerah (OPD) ▪ Peran Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuas a Pengguna Barang					kebenaran, dan sistimatis memahami Peran Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah) (Kepala Daerah 5. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis memahami Peran Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah (Sekda) . 6. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis memahami peran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) ▪ Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis memahami peran Pejabat Pengelola Anggaran/Barang Daerah (OPD) ▪ Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis memahami peran	
--	--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	---	--

12	Mampu memahami, menjelaskan, dan menganalisis asumsi-asumsi dan tujuan perubahan kebijakan APBD	Perubahan Kebijakan APBD: 1. Asumsi-Asumsi Perubahan APBD 2. Tujuan Perubahan APBD 3. Penyusunan KAU dan PPAS Perubahan APBD 4. Penetapan Perubahan APBD	Ceramah, penayangan video, kerja kelompok, tanyajawab, penugasan	1 x 3 x 50'	Review, diskusi, dan presentasi materi	Tes tulis, tes lisan	Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang	5%
							Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menjelaskan perubahan kebijakan APBD: 1. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menjelaskan Asumsi-Asumsi Perubahan APBD 2. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menjelaskan Tujuan Perubahan APBD 3. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis memahami Penyusunan KAU dan PPAS Perubahan APBD 4. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menjelaskan Penetapan	

13	Mampu menjelaskan dan menganalisis evaluasi dan pertanggungjawabannya APBD	Evaluasi dan Pertanggungjawabannya APBD: 1. Indikator kinerja tatakelola anggaran daerah (APBD) 2. Mekanisme Pertanggungjawabannya APBD 3. Penetapan Raperda tentang Pertanggungjawabannya Pelaksanaan APBD	Ceramah, penayangan video, kerja kelompok, tanya jawab, penugasan	1 x 3 x 50'	Review, diskusi, dan presentasi materi	Tes tulis, tes lisan dan	Perubahan APBD	5%
							1. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menjelaskan dan menganalisis evaluasi dan pertanggungjawabannya APBD 2. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menjelaskan indikator kinerja tatakelola anggaran daerah (APBD) 3. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menjelaskan mekanisme pertanggungjawabannya APBD 4. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menganalisis penetapan Raperda tentang pertanggungjawabannya pelaksanaan APBD	

14	Mampu menjelaskan dan menganalisis tatakelola keuangan pemerintahan desa	Tatakelola Keuangan Pemerintahan Desa: 1. APBDes 2. Struktur Kebijakan APBDes 3. Penyusunan APBDes 4. Pelaksanaan APBDes 5. Pertanggungjawaan APBDes	Ceramah, penayangan video, kerja kelompok, tanya jawab, penugasan	1 x 3 x 50'	Review, diskusi, praktik, dan presentasi materi	Tes tulis, tes lisan	1. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menjelaskan dan menganalisis tatakelola keuangan pemerintahan Desa: 2. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menjelaskan dan Menganalisis APBDes 3. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menganalisis Struktur kebijakan APBDes 4. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menjelaskan Penyusunan APBDes 5. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menganalisis Pelaksanaan APBDes 6. Ketepatan, dan kebenaran, dan	10%
----	--	---	---	-------------	---	----------------------	---	-----

15	Mampu menjelaskan dan menganalisis Desain Kebijakan Keuangan Pemerintahan	Desain Kebijakan Keuangan Pemerintahan: 1. Collaborative Governance dalam tatakelola keuangan pemerintahan 2. Intergovernmental Collaboration dalam tatakelola keuangan pemerintahan 3. Tatakelola keuangan pemerintahan berbasis E Government (E Budgeting) 4. Open Budgeting System dalam tatakelola keuangan pemerintahan 5. Tantangan dan masa	Ceramah, penayangan video, kerja kelompok, tanyajawab, penugasan	1 x 3 x 50'	Review, diskusi, mendesain, dan presentasi materi		sistimatis menganalisis Pertanggungjawab APBDes	5%
							1. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menjelaskan dan menganalisis desain kebijakan keuangan pemerintahan 2. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menjelaskan Collaborative Governance dalam tatakelola keuangan pemerintahan 3. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menjelaskan Intergovernmental Collaboration dalam tatakelola keuangan pemerintahan 4. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menjelaskan dan	

						depan tatakelola keuangan pemerintahan					mendesain Tatakelola keuangan pemerintahan berbasis E Government (E Budgeting) 5. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menjelaskan dan mendesain Open Budgeting System dalam tatakelola keuangan pemerintah 6. Ketepatan, kebenaran, dan sistimatis menjelaskan dan mengandialis Tantangan dan masa depan tatakelola keuangan pemerintahan	
16	Ujian Akhir Semester (UAS)											

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

- Yuwono, S., & Indrajaya, A. (2005). Penganggaran sektor publik. Bayumedia Pub.
- Yuwono, S., Utomo, D. C., & Zein, H. S. (2008). Memahami APBD dan Permasalahannya (Panduan Pengelolaan Keuangan Daerah) Diyah Mutiarin (2017). Dasar-dasar keuangan publik
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Jainuri & Salahudin (2014). Relasi Negara dan Masyarakat Sipil dalam Penyusunan Kebijakan APBD. Litera Buku
- Nurmandi, A. & Salahudin (2017). Urban Planning in Decentralization and Local Autonomy Era: A Case Study on the Relationship between Local Government and Civic Group in Development and Budget Planning in Malang City (Indonesia). In *Management of Cities and Regions*. InTech.
- Salahudin, S., Nurmandi, A., & Jainuri, J. (2017). Is There Civic Groups Participa-tion in Budget Planning? A Study Budget Planning in Malang City, Indonesia. *Jurnal Studi Pemerintahan: Journal of Government and Politics*, 8(2).
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2002). Akuntansi keuangan daerah: akuntansi sektor publik. Salemba Empat.
- Bastian, I. (2014). Akuntansi sektor publik.
- Yani, A. (2002). Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah di Indonesia. Divisi Buku Perguruan Tinggi, RajaGrafindo Persada.
- Andrianto, N. (2007). Good e-government: transparansi dan akuntabilitas publik melalui e-government. Bayumedia.
- Indonesia, U. U. R. (2011). Akuntan Publik.
- Munir, D., & Djuanda, H. A. (2004). Kebijakan dan Manajemen Keuangan Daerah. Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia.
- Simatupang, D. P. N. (2005). Determinasi kebijakan anggaran negara Indonesia: studi yuridis. Papas Sinar Sinanti.

- Rai, I. G. A. (2008). Audit Kinerja pada Sektor Publik: konsep, praktik, studi kasus. Penerbit Salemba.
- Herawaty, S. A. (2007). Analisis pengaruh independensi, mekanisme corporate governance, dan kualitas audit terhadap integritas laporan keuangan. *Simpodium Nasional Akuntansi X*, 26-28.
- Ulum, I. (2008). Akuntansi sektor publik. Universitas Muhammadiyah Malang Press. Malang.
- Chalid, P. (2005). Keuangan daerah, investasi, dan desentralisasi: tantangan dan hambatan. Kemitraan.
- Isma, C. (2014). Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik sebagai Pemoderating Hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD), 12(2), 121-137.
- Prasojo, E., & Kurniawan, T. (2008, July). Reformasi Birokrasi dan Good Governance: Kasus Best Practices dari Sejumlah Daerah di Indonesia. In *Prosiding pada 5 th International Symposium of Jurnal Antropologi Indonesia*, Banjarmasin (pp. 22-25).

Pustaka Pendukung

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of public administration research and theory*, 18(4), 543-571.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of public administration research and theory*, 22(1), 1-29.
- Bevir, M. (2011). Governance as theory, practice, and dilemma. *The SAGE handbook of governance*, 1-16.
- Bevir, M. (2011). Governance as theory, practice, and dilemma. *The SAGE handbook of governance*, 1-16.
- Newman, J., Barnes, M., Sullivan, H., & Knops, A. (2004). Public participation and collaborative governance. *Journal of social policy*, 33(2), 203-223.
- Huxham, C., Vangen, S., Huxham, C., & Eden, C. (2000). The challenge of collaborative governance. *Public Management and International Journal of Research and Theory*, 2(3), 337-358.
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. (2012). Governance network theory: past, present and future. *Policy & Politics*, 40(4), 587-606.
- McGuire, M., & Silvia, C. (2010). The effect of problem severity, managerial and organizational capacity, and agency structure on intergovernmental collaboration: Evidence from local emergency management. *Public Administration Review*, 70(2), 279-288.

- Wong, E. P., Mistilis, N., & Dwyer, L. (2011). A framework for analyzing intergovernmental collaboration—The case of ASEAN tourism. *Tourism Management*, 32(2), 367-376.
- Cresswell, A. M., Pardo, T. A., Thompson, F., Canestraro, D. S., Cook, M., Black, L. J., ... & Richardson, G. P. (2002, January). Modeling intergovernmental collaboration: A system dynamics approach. In *System Sciences, 2002. HICSS. Proceedings of the 35th Annual Hawaii International Conference on* (pp. 10-pp). IEEE.
- Salahudin, S. (2018). Participatory Budgeting di Brazil. LOGOS.
- Salahudin, S. (2018). Implementasi Participatory Budgeting di China. LOGOS.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (S1)

Mata Kuliah	:	Sistem Pemerintahan Desa	Semester	:	IV	Kode Mata Kuliah	:		SKS: 3
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan	Dosen Pengampu	:					
capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini:									
Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menyajikan dan menganalisis tatakelola keuangan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.									

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Jenis Evaluasi	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai (100%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1-3	Mahasiswa mampu menjelaskan Berbagai Konsep dan Teori Pemerintahan Desa Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia dan Dinamika Perkembangan regulasi tentang Pemerintahan Desa	Pendahuluan 1. Pemahaman pengertian desa Pemerintahan Desa 2. Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia 3. Macam-macam desa dan Dinamika Perkembangan Pemerintahan Desa	Penugasan mandiri merangkum, menyimpulkan Konsep dan pengertian sistem pemerintahan desa	TM: 3(3 x 60) BM: 3(3 x 60) TS: 3(3 x 60) Buku Jurnal Video	Mhs merangkum, menyimpulkan konsep/teori sistem pemerintahan desa Mhs membentuk FGD (4/5 org), mendiskusikannya argumentasi dan menuangkan	Tes dan tugas Kuis	1. Kemampuan membuat kesimpulan teori dari beberapa ahli (pustaka) 2. Ketepatan penerapan teori dan argumentasi 3. Kemampuan presentasi, argumentasi teoritik dan kerjasama	10%

4-5	Mahasiswa mampu menjelaskan Tipe dan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, serta fungsi dan peran kepala desa beserta perangkat desa	Pengertian Tipe dan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, fungsi dan peran kepala desa dan perangkat desa,	Mengidentifikasi penyelenggaraan pemerintahan desa	TM: 2(3 x 50) BM: 2(3 x 60) TS: 2(3 x 60) Buku Jurnal Video	hasilnya ke dlm format power point (ppt).	Tes dan tugas, kuis	1. Kemampuan membuat kesimpulan teori 2. Ketepatan penerapan teori dan argumentasi 3. Kemampuan menuangkan gagasan ke dalam media power point 4. Kemampuan presentasi, argumentasi teoritik dan kerjasama	10%
6-7	Mahasiswa mampu menjelaskan Struktur dan hubungan kelembagaan dalam pemerintahan desa serta mampu menjelaskan pembentukan	Struktur dan hubungan kelembagaan dan fungsi Pemerintahan Desa Pembentukan Bumdes	Penugasan mandiri mencari contoh Struktur dan hubungan kelembagaan dan fungsi Pemerintahan Desa	TM: 2(3 x 50) BM: 2(3 x 60) TS: 2(3 x 60)	1. Mhs menganalisis ciri ciri 2. Mhs membentuk kelompok (4/5 org),	Tes dan tugas	1. Kemampuan membuat kesimpulan 2. Kemampuan menuangkan gagasan ke dalam media power point 3. Kemampuan presentasi,	10%

	Bumdes		Pembentukan Bumdes	Buku Jurnal Video			argumentasi teoritik dan kerjasama	
8	Ujian Tengan Semester (UTS)							
9-10	Mahasiswa mampu menjelaskan mekanisme pemilihan kepala desa dan mampu menjelaskan hubungan kelembagaan dan fungsi Pemerintahan Desa dengan pemerintah daerah	Mekanisme pemilihan kepala desa hubungan kelembagaan dan fungsi Pemerintahan Desa dengan pemerintah daerah	Penugasan mandiri membuat makalah Diskusi panel.	TM: 2(3 x 50) BM: 2(3 x 60) TS: 2(3 x 60) Buku Jurnal Video	1. Mhs membuat makalah 2. Mhs membentuk kelompok (4/5 org), mendiskusikan 3. Mengadakan kegiatan kunjungan lapang ke desa dan instansi pemberi pelayanan public	Tes dan tugas, kuis	1. Kemampuan membuat makalah 2. Ketepatan penerapan teori dan argumentasi teoritik 3. Kemampuan menuangkan gagasan ke dalam media <i>power point</i> 4. Kemampuan presentasi, argumentasi teoritik dan kerjasama 5. Kemampuan praktik	10%
11-12	Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan kelembagaan dan fungsi pemerintahan desa dengan pemerintahan pusat, dan mampu menjelaskan	hubungan kelembagaan dan fungsi pemerintahan desa dengan pemerintahan pusat, Pemerintahan Desa sebagai pelaksana fungsi	Penugasan mandiri membuat makalah	TM: 2(3 x 50) BM: 2(3 x 60) TS: 2(3 x 60)	1. Mhs membuat makalah 2. Mhs membentuk kelompok 3. Diskusi panel, 4. Perbanding	Tes dan tugas, kuis	1. Kemampuan membuat makalah 2. Ketepatan penerapan teori dan argumentasi teoritik dalam menganalisis 3. Kemampuan	10%

	Pemerintah Desa sebagai pelaksana fungsi pemerintah (eksekutif di Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	pemerintah (eksekutif di Desa) dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)		Buku Jurnal Video	an		menuangkan gagasan ke dalam media <i>power point</i> 4. Kemampuan presentasi, argumentasi teoritik dan kerjasama	
13	Mahasiswa mampu menjelaskan Keuangan Pemerintahan Desa dan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Mampu menjelaskan inovasi sistem pemerintahan desa Keuangan Pemerintahan Desa dan Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)manaje men pelayanan desa, <i>good governance</i> . transparansi, akuntabilitas.	Tugas kelompok mahasiswa menganalisis inovasi	TM: 3(3 x 50) BM: 3(3 x 60) TS: 3(3 x 60) Buku Jurnal Video	1. Mhs membuat makalah 2. Mhs membentuk kelompok	Tes dan tugas, kuis	1. Kemampuan membuat makalah 2. Ketepatan mengidentifikasi Kemampuan menuangkan gagasan ke dalam media <i>power point</i> 3. Kemampuan presentasi, argumentasi teoritik dan kerjasama	10%
14	Mampu menjelaskan manajemen pelayanan desa, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Mengetahui manajemen pelayanan desa, tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)	Tugas kelompok	TM: 3(3 x 50) BM: 3(3 x 60) TS:	Mhs membuat makalah Mhs membentuk kelompok	Tes dan tugas	1. Kemampuan membuat makalah 2. Ketepatan mengidentifikasi Kemampuan menuangkan gagasan ke dalam	10%

	governance)				3(3 x 60) Buku Jurnal Video				media power point 4. Kemampuan presentasi, argumentasi teoritik dan kerjasama	
15	Mahasiswa mampu menjelaskan Pertanggungjawaban Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPJ Kepala Desa)	Mengetahui mekanisme Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPJ Kepala Desa)	Tugas kelompok	TM: 3(3 x 50) BM: 3(3 x 60) TS: 3(3 x 60) Buku Jurnal Video	Mhs membuat makalah Mhs membentuk kelompok	Tes dan tugas, kuis	1. Kemampuan membuat makalah 2. Ketepatan mengidentifikasi 3. Kemampuan menuangkan gagasan ke dalam media power point 4. Kemampuan presentasi, argumentasi teoritik dan kerjasama	10%		
16	Ujian Akhir Semester (UAS)									

Daftar Pustaka

Antlov Hans, Negara Dalam Desa Patronase Kepemimpinan Lokal, Yogyakarta : Lappera Pustaka Utama, 2002.

Haris Syamsudin (ed), Cetakan Kedua, Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Desentralisasi, demokratisasi & Akuntabilitas Pemerintahan Daerah, Jakarta: LIPI Press, 2005.

Jaweng Robert Endi (Ed.), *Kompilasi Undang-Undang Otonomi Daerah & Sekilas Proses Kelahirannya 1903-2004*, Jakarta : Yayasan Tifa, 2004.

Labolo Muhadam, 2006, *Memahami Ilmu Pemerintahan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: PT Bina Aksara , 1981 .

Purwo Santoso. (Ed), *Pembaharuan Desa Secara partisipati*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar ,2003.

Poernomo Mangku, dan Yayuk Yulianti, *Sosiologi Pedesaan*, Yogyakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003.

Rozaki Abdur dan Rinandari Hesti (ed) , *Memperkuat Kapasitas Desa Dalam Membangun Otonomi*, Yogyakarta : IRE Press, 2004.

Suhartono, Dkk, *Parlemen Desa Dinamika Kalurahan dan DPRK Gotong Royong*, Yogyakarta : Lapera, 2000.

Santoso Purwo (ed.) *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Saragi Tumpal P, *Mewujudkan Otonomi Masyarakat Desa Alternatif Pemberdayaan Desa*, Yogyakarta : IRE Press, 2004

Widjaya, AW, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 (Sebuah Tinjauan)*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.

Wijaya Angger Jati (Ed), *Reformasi Tata Pemerintahan desa Menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2000.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (S1)

Mata Kuliah	:	Birokrasi Pemerintahan	Semester	:	Kode Mata Kuliah	:	SKS: 3
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan	Dosen Pengampu	:			
capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini:							
Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu pelbagai teori birokrasi dan aplikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.							

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Jenis Evaluasi	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai (100%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menyepakati Kontrak Perkuliahan	Pendahuluan Pengantar Perkuliahan 1. Pengantar Umum 2. Kontrak Perkuliahan 3. Tugas Terstruktur 4. Cara Penilaian	Ceramah Tanya Jawab (Kesepakatan)	3x50 Menit	Kesepakatan perkuliahan			5%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan arti penting birokrasi pemerintahan	1. Pentingnya mempelajari birokrasi pemerintahan 2. Teori dan Perkembangan	Ceramah <i>Brainstorming</i> (Curah Pendapat) Diskusi Kelompok	3x50 Menit	Tugas	Kuis	Keaktifan dalam diskusi	10%

3	Mahasiswa menjelaskan konsep-konsep dasar birokrasi, Mahdzab dan Aliran Birokrasi	birokrasi	Buku Jurnal	3x50 Menit	Tugas	Kuis Tugas	Keaktifan dalam diskusi Pengumpulan tugas	10%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan kultur sosial dan birokrasi	1. Perspektif Kultur sosial birokrasi 2. Pengaruh lingkungan sosial terhadap birokrasi 3. Birokrasi Sala-Riggs	Ceramah Brainstorming Tanya Jawab Buku Jurnal Film	3x50 Menit	Tugas	Kuis Tugas	Pengumpulan Tugas	5%
5	Mahasiswa menjelaskan sejarah birokrasi pemerintahan Indonesia	1. Birokrasi Indonesia pada zaman kolonial. 2. Birokrasi Indonesia pada awal kemerdekaan 3. Birokrasi Indonesia	Ceramah Brainstorming Tanya Jawab Buku Jurnal Film	3x50 Menit	Menyusun paper	Tugas presentasi	Keaktifan dalam diskusi	5%

		pada masa Orde Lama 4. Birokrasi Indonesia pada masa Orde Baru 5. Birokrasi Indonesia pada Era Reformasi							
6	Mahasiswa menjelaskan pendekatan dan teori dalam studi birokrasi pemerintahan	1. Birokrasi Klasik 2. Birokrasi Modern 3. Birokrasi perspektif politik 4. Paradigma lama birokrasi 5. Paradigma baru birokrasi	Ceramah <i>Brainstorming</i> Diskusi Kelompok Bermain Peran (Simulasi) Buku Jurnal	3x50 Menit	Menyusun paper	Tugas makalah	Pengumpulan tugas	5%	
7	Mahasiswa menjelaskan tentang birokrasi dan politik	1. Politik Birokrasi 2. Netralitas Birokrasi 3. Hubungan Kekuasaan Birokrasi	Ceramah <i>Brainstorming</i> Diskusi Kelompok Buku Jurnal Film	3x50 Menit	Tugas Presentasi	Tugas presentasi	Keaktifan dalam diskusi	5%	
8	Ujian Tengah Semester (UTS)								
9	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang format-	1. <i>Bureaucratic Authoritarianism</i> 2. <i>Bureaucratic</i>	Ceramah <i>Brainstorming</i> Diskusi	3x50 Menit	Menyusun paper	Tugas makalah	Pengumpulan tugas makalah	5%	

	format politik birokrasi	Polity 3. State Corporatism 4. Technocratic Polity	Kelompok Buku Jurnal					
10	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang birokrasi dan demokrasi	1. Konsep Demokrasi 2. Kontribusi Birokrasi terhadap Demokrasi	Ceramah Brainstorming Tanya Jawab Buku Jurnal	3x50 Menit	Menyusun paper	Tugas makalah dan presentasi	Keaktifan dalam diskusi Ketepatan analisis Kerapian presentasi	5%
11	Mahasiswa menjelaskan patologi birokrasi	1. Definisi Patologi Birokrasi 2. Bentuk Patologi Birokrasi 3. Solusi Patologi Birokrasi	Ceramah Brainstorming Tanya Jawab Buku Jurnal Film	3x50 Menit	Tugas	Kuis	Ketepatan analisis	5%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan birokrasi, politik dan korupsi di Indonesia	1. Konsep dan teori tentang Korupsi 2. Korupsi, politik dan birokrasi	Ceramah Brainstorming Studi lapangan Buku Jurnal Film	3x50 Menit	Menyusun paper dan laporan	Kuis Presentasi Resume studi lapangan	Nilai kuis Keaktifan dalam diskusi Tugas resume	5%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Akuntabilitas	1. Konsep Akuntabilitas Birokrasi Pemerintahan	Ceramah Brainstorming Studi lapangan	3x50 Menit	Pemahaman mengenai kajian teoritis dan empiris	Laporan studi lapangan	Format dan substansi laporan studi lapangan	5%

	Birokrasi Pemerintahan		Buku Jurnal Film		akuntabilitas birokrasi pemerintahan			
14	Mahasiswa mampu menjelaskan reformasi birokrasi dan rasionalisasi birokrasi	1. Situasi Problematik Birokrasi 2. Reformasi Birokrasi 3. Rasionalisasi Birokrasi	Ceramah <i>Brainstorming</i> Tanya Jawab Diskusi Kelompok (Studi Kasus) Buku Jurnal Film	3x50 Menit	Pemahaman mengenai reformasi birokrasi dan kondisi empiris di Indonesia	Presentasi Individu	Kerapian presentasi Ketepatan analisis	10%
15	Mahasiswa mampu menjelaskan <i>Reinventing Government</i>	1. Konsep Dasar RG 2. Prinsip-Prinsip RG 3. Penerapan Indonesia dan perbandingan dengan negara lain	Ceramah <i>Brainstorming</i> Tanya Jawab Buku Jurnal	3x50 Menit	Pemahaman mengenai kajian teoritis mengenai RG dan contohnya	Tugas makalah	Format makalah dan substansi.	10%
16	Ujian Akhir Semester (UAS)							

Daftar Pustaka

Budi Setiono, 2016, , Birokrasi :dalam aspek Politik dan Administrasi", Jakarta:Nuansa

Martin Albrow, 1989, Bureaucracy, London, Routledge

Peter M Blau dan MW Meyer, *Bureaucracy in Modern Society*, 1956, alih bahasa oleh Slamet Rijanto, 2000, Jakarta, Prestasi Pustakaraya

Erwan P.2005.Birokrasi Publik dalam Sistem Politik Semi Parlementer.Yogyakarta:Gava Media

B.Guy Peters.1984.The Politics of Bureaucracy;Second Editon.New York:Long Man Inc.

Paul Du Gay.2005.Values Of Bureaucracy.New York;Oxford University Press

Miftah Thoha.2008.Birokrasi Pemerintah Indonesia di Era Reformasi.Jakarta:Prenada Media

-----2014.Birokrasi Politik dan Pemilihan Umum di Indonesia.Jakarta:Prenadamedia

-----2014.Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia.Jakarta;Prenadamedia

-----2014.Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan.Jakarta;Prenadamedia

-----2017.Dinamika Ilmu Administrasi Publik.Depok:Kencana

Ngadisah & Darmanto, 2017, *Birokrasi Indonesia (Modul)*, Jakarta, Penerbit Universitas Terbuka

Heather Sunterland.1983.Terbentuknya sebuah Elite Birokrasi.Jakarta:Sinar Harapan.

Davide Osborne dan Ted Gaebler.1997.Mewirusahaakan Birokrasi;Reiventing Government;Mentransformasi Semangat Wirausaha ke dalam Sektor Publik.Jakarta:Pustaka Binaman Pressindo

Defny Holidin, dkk.2016.Reformasi Birokrasi dalam Transisi.Jakarta:Prenadamedia

Fadel Muhammad.2008.Reiventing Local Government;Pengalaman dari Daerah.Jakarta:Kompas Gramedia

Suparto Wijaya dan Prasetijo Rijadi.2015.Administrative Reform; Pakde Karwo Birokrasi itu Melayani.Jakarta:Prenadamedia

Sjamsiar Sjamsuddin Indradi.2017.Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Pemerintahan; Manajemen Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik. Malang:Instrans Publisng

Prijono Tjiptoherijanto dan Astrid Meilasari-Sugiana.2011.Bureaucratic Reforms in Four ASEAN Countries.Jakarta:Kosa Kata Kita

- Eva Etzioni dan Halevy.2011.Birokrasi dan Demokrasi;Sebuah Dilema Birokrasi.Yogyakarta:Asram Foundation
- Gerald E.Caiden. 1991 .Administrative Reform Comes of Age.Berlin:Walter de Grueter
- Prijono Tjiptoherijanto dan Astrid Meilasari-Sugiana.2011 .Bureaucratic Reforms in Four ASEAN Countries.Jakarta:Kosa Kata Kita
- Agus Dwiyanto.2011 .Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi.Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- J.Danang Widoyoko.2013.Oligarki dan Korupsi Politik Indonesia.Malang:Setara Institute
- Wahyudi Kumorotomo dan Ambar Widianingrum.2010.Reformasi Aparatur Negara Ditinjau Kembali.Yogyakarta:Gava Media
- Muhammad Labolo.2013.Kekosongan Etikalitas Pemerintahan.Jakarta:Wadi Press

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (S1)

Mata Kuliah	:	Etika Pemerintahan	Semester	:	Kode Mata Kuliah	:	SKS: 3
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan	Dosen Pengampu	:			
capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini:							
Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu mengevaluasi penerapan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Good Governance.							

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Jenis Evaluasi	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai (100%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar etika	Pendahuluan 1. Pengertian etika 2. Etika sebagai cabang ilmu filsafat	Ceramah Diskusi Buku referensi	150 menit	Berdiskusi, menemukan sumber materi, merangkum konsep	Tes dan tugas review bacaan	Kemampuan mahasiswa menjelaskan konsep dasar etika	7,14%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya etika dalam tata kelola pemerintahan	1. Hubungan etika dengan pemerintahan 2. Good governance	Ceramah Diskusi Buku referensi	150 menit	Berdiskusi, menemukan sumber materi, merangkum konsep	Tes dan tugas review bacaan	Kemampuan mahasiswa mengkaitkan konsep etika dengan konsep pemerintahan,	7,14%
3	Mahasiswa mampu menjelaskan teori	1. Teori etika 2. Landasan	Ceramah Diskusi	150 menit	Berdiskusi, menemukan	Tes dan tugas	Kemampuan mahasiswa	7,14%

	dan objek kajian pemerintahan	etika	Buku referensi		sumber materi, merangkum konsep	review bacaan	menjelaskan beragam teori dan landasan etika pemerintahan	
4	Mahasiswa mampu membandingkan etika pemerintahan	1. Perbandingan etika pemerintahan di beberapa negara	Diskusi mandiri mahasiswa Analisis kasus	150 menit	Berdiskusi	Tugas mahasiswa	Kemampuan menggunakan konsep etika, Kemampuan mencari contoh penerapan etika di beberapa negara, Kemampuan membandingkan etika di beberapa negara	7,14%
5	Mahasiswa mampu mendiskusikan efektivitas etika pemerintahan	1. Etika ASN (Kode Etik) 2. Teori Efektivitas 3. Teori Pengawasan	Diskusi mandiri mahasiswa Analisis kasus UU	150 menit	Berdiskusi, menemukan sumber materi, merangkum konsep	Tes dan tugas review bacaan	Kemampuan mendiskusikan efektivitas etika pemerintahan melalui pengawasan terhadap etika ASN	7,14%
6	Mahasiswa mampu mengadaptasi nilai – nilai budaya lokal untuk memperkuat etika pemerintahan	1. Konsep budaya 2. Hubungan budaya dengan etika 3. Kearifan lokal	Diskusi mandiri mahasiswa	150 menit	Berdiskusi, mencari contoh kasus	Tugas mandiri	Kemampuan berdiskusi, menggunakan konsep untuk menganalisa realita	7,14%
7	Mahasiswa mampu menganalisa kebijakan anti korupsi dalam	1. Konsep korupsi 2. Contoh korupsi	Ceramah Diskusi Buku Analisis kasus	150 menit	Berdiskusi, merangkum konsep, mereview	Tes dan tugas	Kemampuan berdiskusi, menggunakan konsep untuk	7,14%

	penyelenggaraan pemerintahan	3. Kebijakan anti korupsi 4. Peran etika dalam minimalisir praktik korupsi			contoh kasus		menganalisa realita	
8	Ujian Tengah Semester (UTS)							
9	Mahasiswa mampu menganalisa kebijakan anti kolusi dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Konsep kolusi 2. Contoh kolusi 3. Kebijakan anti kolusi 4. Peran etika dalam minimalisir praktik kolusi	Ceramah Diskusi Buku Analisis kasus	150 menit	Berdiskusi, merangkum konsep, mereview contoh kasus	Tes dan tugas	Kemampuan berdiskusi, menggunakan konsep untuk menganalisa realita	7,14%
10	Mahasiswa mampu menganalisa kebijakan anti nepotisme dalam penyelenggaraan pemerintahan	1. Konsep nepotisme 2. Contoh nepotisme 3. Kebijakan anti nepotisme 4. Peran etika dalam minimalisir praktik nepotisme	Ceramah Diskusi Buku Analisis kasus	150 menit	Berdiskusi, merangkum konsep, mereview contoh kasus	Tes dan tugas	Kemampuan berdiskusi, menggunakan konsep untuk menganalisa realita	7,14%
11	Mahasiswa mampu menganalisa etika politik dalam pemenuhan hak asasi manusia	1. Etika Politik 2. Konsep Hak Asasi Manusia 3. Masalah pemenuhan	Ceramah Diskusi Buku Analisis kasus	150 menit	Berdiskusi, merangkum konsep, mereview contoh kasus	Tes dan tugas	Kemampuan berdiskusi, menggunakan konsep untuk menganalisa realita	7,14%

[illegible]

Daftar Pustaka

- Bertens, K. 2011. *Etika*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Denhardt, Janet V & Denhardt, Robert B. 2007. *The New Public Service (Expanded Edition): Serving, Not Steering*. M.E. Sharpe Inc. New York
- Haryatmoko. 2011. *Etika Publik: untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Kumrotomo, Wahyudi. 2005. *Akuntabilitas Birokrasi Publik: Sketsa Pada Masa Transisi*. Penerbit Pustaka Pelajar. Yogyakarta
- Lewis, Carol W. & Stuart C. Gilman. 2005. *The Ethic Challenge in Public Service: A Problem Solving Guide*. Jossey-Bass, A Wiley Imprint: San Francisco
- Magnis-Suseno, Franz. 2003. *Etika Politik: Prinsip-prinsip Moral Dasar dan Kenegaraan Modern*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Mangunhardjana, A. 1997. *Isme-isme dalam Etika: Dari A sampai Z*. Penerbit Kanisius. Jakarta
- Matondang, H & Bachrum Siregar. 2005. *Materi Pokok Etika Birokrasi*. Pusdiklat Pegawai Bandiklat Keuangan Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Pramusinto, Agus & Purwanto, Agus Erwan (Editor). 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian tentang Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia*. Penerbit Gava Media. Yogyakarta
- Sujatno, Adi. 2007. *Moral dan Etika Kepemimpinan : Merupakan Landasan Ke Arah Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)*. Direktorat Jenderal Pemasarakatan. Departemen Hukum dan HAM RI. Jakarta
- Teichman, Jenny. 1998. *Etika Sosial*. Penerbit Kanisius. Jakarta
- Thompson, DF. 2002. *Etika Politik Pejabat Negara*. Penerbit Yayasan Obor Indonesia. Jakarta

Wijayanto & Ridwan Zachrie (Editor). 2009. *Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat dan Prospek Pemberantasan*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (S1)

Mata Kuliah	:	Pemerintahan Nasional	Semester	:	Kode Mata Kuliah	:	SKS: 3
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan	Dosen Pengampu	:			
capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini:							
Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa mampu menjelaskan aspek-aspek yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan nasional di Indonesia.							

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Jenis Evaluasi	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai (100%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan Prinsip-prinsip Sistem pemerintahan Indonesia	Pendahuluan 1. Sistem presidensial dan sistem parlementer	Tatap muka/Multi Media/Mandiri	150"	TM : Kegiatan tatap muka PT : Penugasan terstruktur AM : Kegiatan mandiri PD : Pembelajaran daring (online)	Observasi Partisipasi Unjuk Kerja Rubrik Penilaian Kinerja Tes Tertulis Tes Lisan Angket	Bila mahasiswa dpt menjelaskan konsep negara (40%) dan konsep pemerintahan (40%). Partisipasi dalam diskusi ('20%)	5%

2	Sejarah Pemerintahan Indonesia	1. Perubahan UUD 1945 dan implikasi pada sistem pemerintahan		150	TM : Kegiatan tatap muka PT : Penugasan terstruktur AM : Kegiatan mandiri PD : Pembelajaran daring (online)		Bila mahasiswa dpt menjelaskan: Tujuan dan fungsi pemerintahan (40%) Sistem (40%) dan partisipasi diskusi (20%)	5%
3	UUD 1945 dan Perubahannya serta implikasi pada sistema pemerintahan		Tatap muka/Multi Media/Mandiri	150"	TM : Kegiatan tatap muka PT : Penugasan terstruktur AM : Kegiatan mandiri PD : Pembelajaran daring (online)		Bila mhs dpt menjelaskan konsep demokrasi (20%). Konsep desentralisasi (40%), konsep otonomi daerah (20%) dan partisipasi diskusi (20%)	5%
4	Sistem Presidensial	1) Pemerintahan Nasional Sebelum Reformasi 2). Pemerintahan Nasional Pasca Reformasi	Tatap muka/Multi Media/Mandiri	150"	TM : Kegiatan tatap muka PT : Penugasan terstruktur AM : Kegiatan mandiri PD : Pembelajaran daring (online)		Bila mhs dpt menjelaskan aspek pemerintahan sbkm reformasi (40%) dan pemerintahan sebelum reformasi (40%) dan partisipasi diskusi (20%)	5%

5	Lembaga Kepresidenan	1. Organisasi dan kelembagaan pada masa Soekarno, Soeharto dan Pasca Orde Baru	Tatap muka/Multi Media/Mandiri	150"	TM : Kegiatan tatap muka PT : Penugasan terstruktur AM : Kegiatan mandiri PD : Pembelajaran daring (online)	Bila mhs dpt menjelaskan lembaga tinggi negara (40%) dan partisipasi diskusi (20%)	10%
6	Lembaga Kementerian	1. Dasar Pembentukan Kementerian dan Kabinet (Politik dan dasar hukum) 2. Perkembangan Kementerian dan Kabinet	Tatap muka/Multi Media/Mandiri	150"	TM : Kegiatan tatap muka PT : Penugasan terstruktur AM : Kegiatan mandiri PD : Pembelajaran daring (online)	Bila mhs dpt menjelaskan lembaga pemerintahan non departemen (40%) dan partisipasi diskusi (20%)	10%
7	Lembaga Komisional	1. Lembaga Pemerintahan Non Departemen			TM : Kegiatan tatap muka PT : Penugasan terstruktur AM : Kegiatan mandiri PD : Pembelajaran	Lembaga Pemerintahan Non Departemen Lembaga Komisional	

						daring (online)				
8	Ujian Tengah Semester (UTS)									
9	Proses Pengambilan Keputusan Lembaga Kepresidenan	Presiden, Kantor Kepresidenan dan Kabinet	Tatap muka/Multi Media/Mandiri	150"	TM : Kegiatan tatap muka PT : Penugasan terstruktur AM : Kegiatan mandiri PD : Pembelajaran daring (online)		Bila mhs dpt menjelaskan aspek urusan2 pemerintahan (40%) dan partisipasi diskusi (20%)	10%		
10	Lanjut		Tatap muka/Multi Media/Mandiri	150"	TM : Kegiatan tatap muka PT : Penugasan terstruktur AM : Kegiatan mandiri PD : Pembelajaran daring (online)		Bila mhs dpt menjelaskan aspek pemerintahan hubungan pusat dan daerah (40%) dan partisipasi diskusi (20%)	'10		
11	Aparatur Sipil Negara	1. Birokrasi dan ASN	Tatap muka/Multi Media/Mandiri	150"	TM :Kegiatan tatap muka PT : Penugasan terstruktur AM : Kegiatan		Bila mhs dpt menjelaskan dasar pembentukan kementerian dan kabinet (40%) dan pemerintahan	5%		

						mandiri PD : Pembelajaran daring (online)		sebelum perkembangan kementerian dan kabinet (40%) dan partisipasi diskusi (20%)	
12	Ormas dan Proses Politik	1. Kelompok Kepentingan di Indonesia dan Ormas 2. Muhammadiyah dan NU serta MUI	Tatap muka/Multi Media/Mandiri	150"		TM : Kegiatan tatap muka PT : Penugasan terstruktur AM : Kegiatan mandiri PD : Pembelajaran daring (online)		Bila mhs dpt menjelaskan pendekatan pelayanan umum (40%) dan jenis2 pelayanan (40%) dan partisipasi diskusi (20%)	5%
13	Media dan Proses Politik	1. Peran e gov dalam Pemerintahan Nasional	Tatap muka/Multi Media/Mandiri/Diskusi	150"		TM : Kegiatan tatap muka PT : Penugasan terstruktur AM : Kegiatan mandiri PD : Pembelajaran daring (online)		Bila mhs dpt menjelaskan peran e-gov (40%) dan bentuk e-gov (40%) dan partisipasi diskusi (20%)	10%
14	Kelompok Kepentingan	1. LSM dan pengaruh pada pengambilan keputusan	Tatap muka/Multi Media/ Diskusi Mandiri	150"		TM : Kegiatan tatap muka PT : Penugasan terstruktur AM : Kegiatan			10%

					mandiri PD : Pembelajaran daring (online)				
15	Kerjasama Internasional	1). Globalisasi 2) Regionalisasi	Tatap muka/Multi Media/ Mandiri/ Diskusi	150"	TM : Kegiatan tatap muka PT : Penugasan terstruktur AM : Kegiatan mandiri PD : Pembelajaran daring (online)	Bila mhs dpt menjelaskan konsep dan aspek globalisasi (40%) dan konsep dan aspek regionalisasi (40%) dan partisipasi diskusi (20%)	5%		
16	Ujian Akhir Semester (UAS)								

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

Araújo, V., Silva, T., & Vieira, M. (2016). Cabinet Rules and Power Sharing from a Comparative Perspective: Presidential and Parliamentary Democracies Reconsidered.

Aspinall, E., Mietzner, M., & Tomsa, D. (2015). The moderating president: Yudhoyono's decade in power. *The Yudhoyono presidency: Indonesia's decade of stability and stagnation*, 1-21.

- EE, F. E., & Indra, M. (2016). Perbandingan Pemberhentian Presiden dalam Masa Jabatan di Indonesia dan Amerika Serikat. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, 3(2), 1-15.
- Joko Setiono, S. H. (2016). Urgensi Pengaturan Lembaga Kepresidenan terkait Kedudukan dan Kewenangan Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Lee, D. S. (2015). *Presidential Cabinet Formation as Leadership Strategy in Asian Democracies* (Doctoral dissertation, UC San Diego).
- Lee, D. S. (2018). Executive capacity to control legislatures and presidential choice of cabinet ministers in East Asian democracies. *Governance*.
- Saafroedin Bahar et. al. (Ed). (1993) *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 29 Mei 1945 – 19 Agustus 1945*. Edisi II. Cetakan 4. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Saafroedin Bahar et. al. (Ed). (1995) *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945*. Edisi III. Jakarta: Sekretariat Negara RI.
- Bagir Manan ; Editor : N'imatul Huda, Lembaga Kepresidenan, Publisher : Yogyakarta : UII Press Year : 2006 Stock : 3 Index Page : Ind. : hlm 177-182
- Holmes, D. (2016). Understanding the Indonesian mediapolis: The role of social media during the 2014 Indonesian presidential election. *Communication, Politics & Culture*, 49(2), 50.
- Mietzner, M. (2016). Coercing Loyalty: Coalitional Presidentialism and Party Politics in Jokowi's Indonesia. *Contemporary Southeast Asia: A Journal of International and Strategic Affairs*, 38(2), 209-232.
- Mietzner, M. (2016). The Sukarno dynasty in Indonesia: Between institutionalisation, ideological continuity and crises of succession. *South East Asia Research*, 24(3), 355-368.
- Tegnan, H. (2018). ANALYSIS OF THE INDONESIAN PRESIDENTIAL SYSTEM BASED ON THE 1945 CONSTITUTION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 21(3).

- Tomsa, D. (2018). Regime resilience and presidential politics in Indonesia. *Contemporary Politics*, 24(3), 266-285.
- Ufen, A. (2018). Party presidentialization in post-Suharto Indonesia. *Contemporary Politics*, 24(3), 306-324.
- Yusa, I. G., & Hermanto, B. (2017). Gagasan rancangan undang-undang lembaga kepresidenan: cerminan penegasan dan penguatan Sistem presidensiil Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(3), 313-323.

Peraturan Perundang-undangan

- Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Konstitusi Republik Indonesia Serikat 1949
- Undang-Undang Republik Indonesia Serikat Nomor 7 Tahun 1950 (UUD Sementara 1950)
- Ketetapan-ketetapan MPRS dan MPR
- UU 7/1949 [RI-Yogyakarta]
- Lembaran Negara Tahun 1958
- Setneg (1997) 30 Tahun Indonesia Merdeka. Edisi 3. Jakarta: Setneg
- Setneg (1997) 40 Tahun Indonesia Merdeka. Edisi 2. Jakarta: Setneg
- Setneg (1997) 50 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: Setneg

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (S1)

Mata Kuliah	:	Pemerintahan Daerah	Semester	:	Kode Mata Kuliah	:	SKS: 3
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan	Dosen Pengampu	:			
capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini:							
Setelah menempuh mata kuliah ini, diharapkan :							
1. Mahasiswa mampu memahami esensi konsep dan prinsip-prinsip sistem pemerintahan daerah di Indonesia. 2. Mahasiswa mampu memahami konsep distribusi kekuasaan dalam level vertikal, federasi, desentralisasi, otonomi daerah, pemerintahan daerah dan dinamika politik lokal. 3. Mahasiswa mampu menyajikan dan menganalisis dinamika, tantangan dan peluang pemerintahan daerah dalam mencapai keefektifan kelembagaan daerah							

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Jenis Evaluasi	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai (100%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mampu memahami dan menjelaskan pokok-pokok penting dalam studi Pemerintahan Daerah	Pendahuluan Pokok penting studi Pemerintahan Daerah 1. Pengertian dan definisi pemerintahan daerah 2. Konsep dasar pemerintahan daerah	Diskusi Ceramah Interaktif Buku Video	150 menit	Kajian Teori Diskusi dan Presentasi	Kuis, Test lisan/tertulis dan tugas	1. Kebenaran mahasiswa dalam memahami pemerintahan daerah 2. kemampuan analisis dalam konsep pemerintahan daerah 3. Mampu tetapkan melaksanakan	2%

		3. Etimologi studi pemerintahan daerah 4. Perkembangan studi pemerintahan daerah					oleh mahasiswa	
2	Mampu memahami dan menjelaskan perbedaan-perbedaan peraturan hukum dan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah di setiap periode sejarah pemerintahan daerah	Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia 1. Perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia dari awal merdeka hingga sekarang 2. Identifikasi masing-masing periode sejarah pemerintahan di Indonesia	▪ Diskusi ▪ Ceramah ▪ Interaktif ▪ Buku ▪ Video	150 menit	Kajian Teori Diskusi dan Presentasi	Kuis, Test lisan/tertulis dan tugas	1. Kemampuan menampilkan data sejarah 2. kemampuan sintesis pembahasan 3. kemampuan mengidentifikasi perkembangan sejarah	3%
3	Mampu memahami teori-teori dalam pemerintahan daerah serta mengaplikasikan dalam bentuk sebuah kajian atau analisis	Teori- Teori dalam Pemerintahan Daerah 1. Teori Otonomi Daerah 2. Teori Areal Division of Power (ADP)	▪ Diskusi ▪ Ceramah ▪ Interaktif ▪ Buku ▪ Video ▪ Jurnal	150 menit	Kajian Teori Diskusi dan Presentasi	Kuis, Test lisan/tertulis dan Tugas	1. Kemampuan memahami konsep teori 2. Kemampuan perbandingan konsep teori 3. Kemampuan menghasilkan	2%

		3. Teori Kelembagaan Daerah 4. Teori Desentralisasi					analisis dari kajian teori-teori	
4	Mampu memahami dan menjelaskan konsep desentralisasi, dekonsentrasi dan otonomi daerah	Konsep Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Otonomi Daerah 1. Definisi desentralisasi, dekonsentrasi dan medebewind 2. Prinsip-prinsip otonomi daerah 3. Dasar-dasar hukum otonomi daerah	▪ Diskusi ▪ Ceramah ▪ Buku ▪ Video ▪ Jurnal	150 menit	Kajian Teori Diskusi dan Presentasi	Kuis, Test lisan/tertulis dan Tugas	1. Kemampuan memahami konsep dasar otonom 2. Mampu menganalisis konsep otonom	
5	Mampu menganalisis kelayakan pembentukan sebuah daerah	Pembentukan daerah di Indonesia 1. Tujuan Pembentukan daerah di Indonesia 2. Syarat-syarat pembentukan daerah di Indonesia	▪ Diskusi ▪ Ceramah ▪ Studi Kasus ▪ Buku ▪ Jurnal	150 menit	Kajian Teori Diskusi dan Presentasi	Kuis, Test lisan/tertulis dan Tugas	1. Kemampuan memahami tujuan pemerintah daerah 2. Kemampuan memahami bentuk pemerintah daerah 3. Ketajaman dalam menganalisis	7 %

		3. Mekanisme pembentukan daerah pasca reformasi 4. Analisis kelayakan pembentukan daerah					pembentukan daerah	
6	Mampu memahami dan menjelaskan secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 1. Hukum dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Azas umum penyelenggaraan negara 3. Pembagian urusan (kewenangan) pemerintahan pusat dan daerah 4. Identifikasi urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan pilihan	▪ Diskusi ▪ Ceramah ▪ Buku ▪ Video ▪ Jurnal	150 menit	Kajian Teori Diskusi dan Presentasi	Kuis, Test lisan/tertulis dan Tugas	1. Kemampuan menjelaskan dasar-dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah 2. Kemampuan menganalisis dasar-dasar penyelenggaraan 3. Mampu memahami penyelenggaraan	

7	Mampu memahami dan menjelaskan sistem dan mekanisme pengawasan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia	Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan Daerah 1. Pengertian dan definisi pengawasan 2. Konsep pengawasan di daerah 3. Mekanisme pengawasan tata kelola pemerintahan daerah	▪ Diskusi ▪ Ceramah ▪ Buku ▪ Jurnal ▪ Video	150 menit	Kajian Teori Diskusi dan Presentasi	Kuis, Test lisan/tertulis dan Tugas	1. Kemampuan menganalisis tata kelola pemerintahan	3%
8	Ujian Tengah Semester (UTS)							
9	Mampu memahami dan mengidentifikasi bentuk-bentuk struktur organisasi pemerintahan daerah serta tugas, pokok dan fungsi OPD	Organisasi Pemerintahan Daerah 1. Bentuk struktur kelembagaan/ organisasi pemerintahan daerah 2. Tugas, pokok dan fungsi organisasi pemerintahan daerah	▪ Diskusi ▪ Ceramah ▪ Buku ▪ Jurnal ▪ Video	150 menit	Kajian Teori Diskusi dan Presentasi	Kuis, Test lisan/tertulis dan Tugas	1. kemampuan menganalisis bentuk kelembagaan/ organisasi Pemerintahan Daerah 2. kemampuan mengidentifikasi dan menganalisis Tupoksi perangkat OPD	3%
10	Mampu memahami dan menjelaskan sistem rekrutmen ASN tingkat daerah,	Manajemen Pemerintahan Daerah 1. Sistem	▪ Diskusi ▪ Ceramah ▪ Buku ▪ Jurnal	150 menit	Kajian Teori Diskusi dan Presentasi	Kuis, Test lisan/tertulis dan Tugas	1. kemampuan memahami system rekrutmen pegawai daerah	3%

	manajemen SDM serta pengelolaan asset dan keuangan daerah	rekrutmen pegawai daerah 2. Manajemen SDM pemerintah daerah 3. Pengelolaan asset daerah 4. Pengelolaan keuangan daerah	▪ Video	150 menit	Kajian Teori Diskusi dan Presentasi	Kuis, Test lisan/tertulis dan Tugas	2. kemampuan memahami manajemen SDM pemerintah daerah 3. kemampuan menjelaskan pengelolaan asset daerah 4. kemampuan menganalisis keuangan daerah	3%
11	Mampu memahami dan menjelaskan serta menganalisis sistem pemilihan eksekutif dan legislatif daerah di Indonesia	Sistem Pemilihan Eksekutif dan Legislatif Daerah 1. Bentuk-bentuk sistem pemilihan eksekutif dan legislative daerah di Indonesia 2. Mekanisme pemilihan eksekutif dan legislatif daerah pasca reformasi 3. Mekanisme pemilihan eksekutif dan legislatif daerah sebelum	▪ Diskusi ▪ Ceramah ▪ Buku ▪ Jurnal ▪ Video	150 menit	Kajian Teori Diskusi dan Presentasi	Kuis, Test lisan/tertulis dan Tugas	1. Kemampuan komunikasi dalam menjelaskan bentuk-bentuk dan mekanisme pemilihan eksekutif dan legislatif 2. Ketajaman menganalisis Sistem Pemilihan Eksekutif dan Legislatif di daerah	3%

12	Mampu memahami, menyusun dan menganalisis pengelolaan keuangan daerah	reformasi	▪ Ceramah ▪ Diskusi ▪ Buku ▪ Jurnal ▪ Video	150 menit	Kajian Teori Diskusi dan Presentasi	Kuis, Test lisan/tertulis dan Tugas	1. Ketajaman menganalisis pengelolaan Keuangan Daerah 2. Ketepatan dalam menghitung tata kelola keuangan daerah	3%
13	Mampu menjelaskan dan menganalisis	Otonomi Khusus 1. Kewenangan khusus pemerintahan daerah provinsi DI Aceh, DI Yogyakarta, DI Papua dan DKI Jakarta 2. Anggaran khusus pemerintahan daerah provinsi DI Aceh, DI Yogyakarta, DI Papua dan DKI Jakarta	▪ Diskusi ▪ Ceramah ▪ Buku ▪ Jurnal ▪ Video	150 menit	Kajian Teori Diskusi dan Presentasi	Kuis, Test lisan/tertulis dan Tugas	1. Kemampuan menjelaskan dan memahami Daerah Otonomi Khusus 2. Ketajaman analisis dalam mengkaji isu-isu otonomi khusus	3 %

14	Mampu menganalisis tantangan dan dinamika pemerintahan daerah di Indonesia	Tantangan Pemerintahan Daerah 1. Dinamika perkembangan pemerintahan daerah di Indonesia 2. Dilematis pembentukan daerah di Indonesia 3. Politisasi tingkat daerah	▪ Diskusi ▪ Ceramah ▪ Studi Kasus ▪ Mind Mapping ▪ Buku ▪ Jurnal ▪ Video	150 menit	Kajian Teori Diskusi dan Presentasi	Kuis, Test lisan/tertulis dan Tugas	1. Kemampuan menganalisis Dinamika Perkembangan dan Tantangan Pemerintahan Daerah 2. Kreatifitas dalam mengembangkan studi kasus	10 %
15	Mampu menganalisis prospek/masa depan pemerintahan daerah	Masa Depan Pemerintahan Daerah 1. Peluang dan tantangan perkembangan Pemerintahan daerah di Indonesia	▪ Diskusi ▪ Studi Kasus ▪ Buku ▪ Jurnal ▪ Video	150 menit	Kajian Teori Diskusi dan Presentasi	Kuis, Test lisan/tertulis dan Tugas	1. Kemampuan menganalisis dan memetakan Dinamika Pemerintahan Daerah 2. Kreatifitas dalam mengembangkan studi kasus	10 %
16	Ujian Akhir Semester (UAS)							

Daftar Pustaka

C1.Abdullah, Rozali, 2000. *Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Abdurrahman, 1987. *Beberapa Pemikiran Tentang Otonomi Daerah*, Melton Putra, Jakarta.
- Cheema, G. S., dan D.A. Rondinelli (ed.), 1983. *Decentralization and Development : Policy Implementation in Developing Countries*, Beverly Hills, Sage.
- Davey, Kenneth, 1989. *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Devas, Nick et al, 1989. *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Press, Jakarta
- Djohan, Djohermansyah. 2006. *Desentralisasi Asimetrik di Aceh*, Jurnal Ilmu Pemerintahan MIPI, Edisi 22, Jakarta.
- , 2001. *Masalah Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan MIPI, Edisi 14, Jakarta
- Conyer, Diana. 1986. *Decentralization and Development : A Framework for Analysis*
- Eko, Sutoro et. Al. 2005. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*, IRE Press, Yogyakarta.
- Haynes, Robert J. 1980. *Organisation Theory and Local Government*, The New Local Government Series 19, George Allen and Unwin, Boston-Sidney.
- Hidayat, Syarif. 2006. *Membangun Format Baru Otonomi Daerah*, LIPI Press dan Obor, Jakarta.
- , Syarif dan Bhenyamin Hoessein, 2001. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah : Perspektif Teoritis dan Perbandingan*, dalam Syamsudin Haris et al, 2001, *Paradigma Baru Otonomi Daerah*. Pusat Penelitian Politik LIPI (P2P-LIPI), Jakarta.
- Hoessein, Bhenyamin, 2003. *Otonomi dan Pemerintahan Daerah : Tinjauan Teoretik*, PPW LIPI, Jakarta
- Jimung, Martin. 2005. *Politik Lokal dan Pemerintah Daerah dalam Perspektif Otonomi Daerah*, Yayasan Pustaka Nusantara, Yogyakarta.
- Litvack, Jennie and Jessica Seddon (ed.), 1999. *Decentralization : Briefing Noefing Notes*, World Bank Institute.
- Kaho, Josef Riwu. 1988. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Beberapa Faktor yang Mempengaruhi*

Penyelenggaraannya, Rajawali Pers, Jakarta.

Kaloh. J., 2002. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Suatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta.

Karim, Abdul Gaffar (eds), *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Puskata Pelajar dan Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM, Yogyakarta

Maas, Arthur (ed), 1959. *Area and Power : A Theory of Local Government*, The Free Glencoe, Illinois.

Surbakti, Ramlan. 2008. *Pemilu Kepala Daerah dan Calon Perseorangan: Urgensinya dalam Demokratisasi*, Jurnal Ilmu Pemerintahan MPI, Edisi 26, Jakarta.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (S1)

Mata Kuliah	:	Hukum Tata Pemerintahan	Semester	:		Kode Mata Kuliah	:		SKS: 3
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan	Dosen Pengampu	:					
capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini:									
Setelah mengikuti 14 kali tatap muka, mahasiswa mampu mengetahui-memahami dan menganalisa ruang lingkup dari HTP									

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Jenis Evaluasi	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai (100%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan dengan baik dan runtun tentang konsep dan teori HTP	Pendahuluan Konsep & teori HTP	1. Ceramah 2. diskusi 3. Buku 4. internet/me dia elektronik		1. pengalaman an menemukan sumber materi, 2. diskusi 3. membuat catatan.	Tes dan tugas pribadi dan kelompok	Ketepatan dan kebenaran mahasiswa dalam menyebutkan dan menjelaskan konsep dan teori HTP.	
2	Mahasiswa mampu mengetahui dengan baik terkait subyek dan obyek HTP	Subyek & obyek HTP,	1. Ceramah 2. diskusi 3. Buku 4. internet/me dia elektronik		1. pengalaman an menemukan sumber materi, 2. diskusi 3. membuat catatan.		Ketepatan dalam menjelaskan dengan baik subyek dan obyek HTP	

3	Mahasiswa mampu memahami sumber2 hukum dan azas2 HTP	Sumber2 hukum dan azas2 HTP	1. Ceramah 2. Diskusi, 3. Buku 4. nternet/ media elektronik		1. pengalaman an menemukan sumber materi, 2. diskusi 3. embuat catatan	Ketepatan dalam menjelaskan sumber2 hukum dan azas2 HTP Mampu membuat tata naskah dinas.	
4	Mahasiswa mampu menganalisa perubahan dalam lintasan sejarah HTP	Lintasan sejarah HTP	1. Ceramah 2. diskusi, 3. Buku 4. internet/me dia elektronik	5.	1. pengalaman an menemukan sumber materi, 2. diskusi 3. membuat catatan	Ketepatan dan kebenaran dalam menganalisa perubahan dalam lintasan sejarah HTP	
5	Mahasiswa mampu menjelaskan legalitas pemerintahan yang sifatnya istimewa,	Legalitas pemerintahan- (perbuatan pemerintahan)	1. Ceramah 2. Diskusi 3. FG. 4. Buku 5. internet/me dia elektronik		1. pengalaman an menemukan sumber materi, 2. diskusi 3. membuat catatan	Ketepatan menjelaskan aspek legalitas pemerintahan yang sifatnya istimewa	
6	Mahasiswa mampu memahami proses pengambilan keputusan TUN	Keputusan tata usaha Negara	1. Ceramah 2. diskusi, 3. FGD		1. pengalaman an menemukan sumber materi, 2. diskusi 3. membuat catatan	Ketepatan menjelaskan proses pengambilan keputusan TUN	

7	Mahasiswa mampu memahami dengan baik jenis,nomenklatur,be ntuk dan kewenangan badan hukum public dan privat.	Badan hukum public dan privat	1. Ceramah 2. diskusi, 3. Buku 4. internet/me dia elektronik	1. pengalam an menemukan sumber materi, 2. diskusi 3. membuat catatan	Ketepatan dan kebenaran dalam memahami jenis,nomenklatur,be ntuk dan kewenangan badan hukum public dan privat.	
8	Ujian Tengah Semester (UTS)					
9	Mahasiswa mampu mengetahui barang2/asset milik pemerintah sejak pengadaan,pengelolaan,penempatan sampai dengan penghapusan asset pemerintah	Barang2 milik pemerintah	1. Ceramah 2. diskusi 3. Buku 4. internet/me dia elektronik	1. pengalam an menemukan sumber materi, 2. diskusi 3. membuat catatan	Ketepatan dalam memahami barang2/asset milik pemerintah sejak pengadaan,pengelolaan,penempatan sampai dengan asset penghapusan asset pemerintah	
10	Mahasiswa mengetahui dengan baik tentang penataan kelembagaan,lokasi personil dan dokumen,struktur penyelenggaraan tata pemerintahan	Aspek hukum pembagian urusan pemerintahan	1. Ceramah 2. diskusi 3. Buku 4. internet/ media elektronik	1. pengalam an menemukan sumber materi, 2. diskusi 3. membuat catatan	Ketepatan dalam mengetahui kelembagaan,lokasi personil dan dokumen,struktur penyelenggaraan tata pemerintahan	
11	Mahasiswa menganalisis dengan baik terkait dengan berbagai	Perlindungan hukum di Indonesia	1. Ceramah 2. diskusi 3. FGD 4. internet/		Ketepatan dalam menganalisis terkait dengan perlindungan hukum di Indonesia	

	perlindungan hukum di Indonesia		media elektronik					
12	Mahasiswa mengetahui dan memahami adanya keputusan pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret.	Diskresi pemerintahan	1. Ceramah 2. diskusi 3. FGD 4. internet/media elektronik				Ketepatan dalam memahami keputusan pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret.	
13	Mahasiswa mengetahui model pertanggungjawaban dari hubungan Presiden dan DPR, Kepala Daerah dengan DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan	Pertanggung-jawaban penyelenggara pemerintahan	1. Ceramah 2. diskusi 3. FGD 4. internet/media elektronik					
14	Mahasiswa mampu memahami dengan baik tentang sengketa hukum dari adanya perbuatan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan	Sengketa Hukum Tata Pemerintahan	1. Ceramah 2. diskusi 3. FGD 4. internet/media elektronik				Ketepatan dalam memahami sengketa hukum dari adanya perbuatan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan	
15	Mahasiswa mampu menganalisis posisi,tantangan dimasa depan HTP .	Tantangan dan masa depan HTP	1. Ceramah 2. diskusi 3. internet/media				Ketepatan dalam menganalisis posisi ,tantangan dimasa depan HTP .	

			elektronik 4. FGD					
16	Ujian Akhir Semester (UAS)							

Daftar Pustaka

- Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, Identitas Universitas Hasanudin, Makassar, 2013.
- Bagir Manan, Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Ull, Yogyakarta, 2001.
- C.S.T Kansil, Sistem Pemerintahan Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Efik Yudianty, et.al., Keterampilan dan Kemahiran Hukum Tata Negara, Laboratorium Hukum Fakultas Hukum UNISBA, Bandung, 2012.
- Hamid Attamimi, Ilmu Perundang-Undangan, Kanisius, Jakarta, 2013.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa, Bandung, 2012.
- Jum Anggriani, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Jimly Asshiddiqie, Perihal Undang Undang, RajawaliPress, Jakarta, 2011.
- Makkatutu, Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif, Ikhtiar Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1975.
- Marbun, SF. Dan Moh. Mahfud, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Liberty, Yogyakarta, 1987.
- Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan 2, Kanisius, Jakarta, 2013.

- Nanang Nugraha, Model Kewenangan Wakil Kepala Daerah dalam Pemerintahan Daerah, Refika Aditama, Bandung, 2013.
- Pamudji Atmosudirdjo, Ekologi Administrasi Negara, Bina Aksara: Jakarta, 1985.
- Philipus M Hadjon, et.al., Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- repository.unisba.ac.id
- Utang Rosidin, Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pustaka Setia, Bandung, 2015.
- Utrecht, E, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 198

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (S1)

Mata Kuliah	:	Komunikasi Pemerintahan	Semester	:	Kode Mata Kuliah	:	SKS: 3
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan	Dosen Pengampu	:			
capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini:							
Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan teori komunikasi pemerintahan, menjalin komunikasi internal kelembagaan, antar lembaga dan internasional serta mendiagnosis isu, fakta, opini publik dan memberikan umpan balik komunikasi publik.							

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Jenis Evaluasi	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai (100%)
1	Mampu menjelaskan konsep dan teori komunikasi pemerintahan	Pendahuluan 1. Definisi pemerintahan 2. Tugas pokok pemerintahan 3. Tujuan pemerintahan 4. Definisi komunikasi 5. Elemen komunikasi 6. Makna komunikasi	ceramah, tanya jawab dan diskusi	100 menit (2 SKS)	Berinteraksi antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah	Kehadiran	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang: 1. Definisi pemerintahan 2. Tugas pokok pemerintahan 3. Tujuan pemerintahan 4. Definisi komunikasi 5. Elemen komunikasi 6. Makna komunikasi	3,85 %
2	Mampu mengidentifikasi	1. Menjaln Hubungan	ceramah, tanya jawab dan	100 menit (2 SKS)	Berinteraksi antar	Kehadiran	Mahasiswa mampu mengidentifikasi	3,85 %

	komunikasi inter dan intra personal	Intrprsonal 2. Hambatan dalam Berkomunikasi 3. Kiat Berkomunikasi Efektif 4. Prinsip Dasar Memahami Orang Lain	diskusi		mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah		tentang: 1. Menjalin Hubungan Intrprsonal 2. Hambatan dalam Berkomunikasi 3. Kiat Berkomunikasi Efektif 4. Prinsip Dasar Memahami Orang Lain	
3	mampu mengidentifikasi aktor dan proses komunikasi pemerintahan	1. Definisi aktor 2. Siapa saja aktor dalam pemerintahan 3. Proses komunikasi pemerintahan	ceramah, tanya jawab dan diskusi	100 menit (2 SKS)	Berinteraksi antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah	Kehadiran	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang:	3,85 %
4	mampu menguraikan supra dan infrastruktur dalam komunikasi politik	1. Supra dan Infrastruktur Politik 2. Komunikasi Politik Dalam Sistem Politik	ceramah, tanya jawab dan diskusi	100 menit (2 SKS)	Berinteraksi antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah	Kehadiran	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang:	3,85 %
5	Mampu membedakan saluran komunikasi pemerintahan	1. Definisi saluran komunikasi pemerintahan 2. Macem-macam saluran	ceramah, tanya jawab dan diskusi	100 menit (2 SKS)	Berinteraksi antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah	Kehadiran	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang:	3,85 %

		komunikasi pemerintahan							
6	Mampu menerangkan sistem informasi komunikasi	1. Definisi sistem 2. Sistem dalam komunikasi pemerintahan	ceramah, tanya jawab dan diskusi	100 menit (2 SKS)	Berinteraksi antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah	Kehadiran	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang:	3,85 %	
7	Mampu menjalin komunikasi internal kelembagaan, antar lembaga dan internasional		ceramah, tanya jawab dan diskusi	100 menit (2 SKS)	Berinteraksi antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah	Kehadiran Quis	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang:	3,85 %	
8	Ujian Tengah Semester (UTS)								
9	Mampu mempolakan komunikasi dalam masyarakat dan transpormasi sosial	1. Pemaknaan Komunikasi Masyarakat 2. Komunikasi dan Akulturasi 3. Perubahan Masyarakat dan Organisasi Pemerintahan 4. Perubahan Sikap dan Karakter Aparatur Pemerintahan 5. Hubungan	ceramah, tanya jawab dan diskusi	100 menit (2 SKS)	Berinteraksi antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah	Kehadiran	Mahasiswa mampu mengidentifikasi tentang: 1. Pemaknaan Komunikasi Masyarakat 2. Komunikasi dan Akulturasi 3. Perubahan Masyarakat dan Organisasi Pemerintahan 4. Perubahan Sikap dan Karakter Aparatur Pemerintahan	3,85 %	

		Pemerintah dengan Masyarakat							5. Hubungan Pemerintah dengan Masyarakat	
10	Mampu mengklasifikasikan dinamika komunikasi	1. Definisi dinamika 2. Dinamika komunikasi pemerintahan	ceramah, tanya jawab dan diskusi	100 menit (2 SKS)	Berinteraksi antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah	Kehadiran	Mahasiswa mampu mengklasifikasikan tentang: 1. Definisi dinamika 2. Dinamika komunikasi pemerintahan	3,85 %		
11	Mampu membangun komunikasi dan humas	1. Definisi pembangunan 2. Komunikasi pembangunan 3. Definisi humas 4. Fungsi, tujuan dan ruang lingkup humas	ceramah, tanya jawab dan diskusi	100 menit (2 SKS)	Berinteraksi antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah	Kehadiran	Mahasiswa mampu membangun tentang: 1. Definisi pembangunan 2. Komunikasi pembangunan 3. Definisi humas 4. Fungsi, tujuan dan ruang lingkup humas	3,85 %		
12	Mampu membiasakan beretika dalam komunikasi	1. Definisi etika 2. Etika dalam membangun komunikasi pemerintahan yang baik	ceramah, tanya jawab dan diskusi	100 menit (2 SKS)	Berinteraksi antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah	Kehadiran	Mahasiswa mampu membiasakan tentang: 1. Definisi etika 2. Etika dalam membangun komunikasi pemerintahan yang baik	3,85 %		

Daftar Pustaka

- Alfian. 1991. *Komunikasi Politik dan Sistem Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Abidin, Yusuf Zainal. 2016. *Komunikasi Pemerintahan: Filosofi, Konsep dan Aplikasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Abraham, M. Francis. 1991. *Modernisasi di Dunia Ketiga Suatu Teori Umum Pembangunan*. Terjemahan M. Rusli Karim: University Press Of America
- Budiarjo, Miriam. (2002). *Dasar- Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Hasan, Earliana. 2005. *Komunikasi Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama
- Morissan. 2009. *Teori Komunikasi Organisasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mulyana, Deddy. 2008. *Ilmu Komunikasi : Suatu Pengantar*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Nimmo, Dan. 2005. *Komunikasi Politik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Gahalia Indonesia.
- Pranadja, M. Rohidin. 2003. *Hubungan Antar Lembaga Pemerintah*. Jakarta : Sinar Grafika
- Susanto, Eko Hary. 2010. *Komunikasi Massa : Esensi Dan Aplikasi dalam Dinamika Sosial Ekonomi Politik*, Jakarta : Mitra Wacana Media
- Sumarno, AP. 1989. *Dimensi-Dimensi Komunikasi Politik*. Bandung: Citra Aditya

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (S1)

Mata Kuliah	:	Pelayanan Sektor Publik	Semester	:	Kode Mata Kuliah	:	SKS: 3
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan	Dosen Pengampu	:			
capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini:							
Setelah diselenggarakannya perkuliahan manajemen pelayanan publik bertujuan mewujudkan kemampuan mahasiswa dalam hal memahami dan menganalisis konsep maupun aplikasi manajemen pelayanan publik.							

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Jenis Evaluasi	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai (100%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa dapat menjelaskan Konsep Dasar Pelayanan Publik	Pendahuluan Konsep dasar Pelayanan Publik	Definisi pelayanan publik; hakekat makna pelayanan publik; perkembangan paradigma pelayanan publik.	Ceramah dan diskusi, mandiri	50 menit tatap muka, 50 menit diskusi, 60 menit belajar mandiri	Kuis dan tugas	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep dasar manajemen pelayanan publik	7,16
2	Mahasiswa dapat menjelaskan pendekatan dan dimensi pelayanan publik dan dapat memahami level	Deskripsi pendekatan dan dimensi pelayanan publik, jenis-jenis level pelayanan publik	Ruang lingkup pendekatan politik dalam pelayanan publik, pendekatan	Ceramah dan diskusi, mandiri	50 menit tatap muka, 50 menit diskusi, 60 menit belajar	Kuis dan tugas	Mahasiswa dapat memahami pendekatan dan dimensi pelayanan publik, dan memahami level	7,16

	dalam pelayanan publik		manajerial dalam pelayanan publik , pendekatan legal dalam pelayanan publik, level kebijakan, manajerial dan operasional pelayanan publik.		mandiri		dalam pelayanan publik.	
3	Mahasiswa dapat menjelaskan isu dan potret Buram Pelayanan Publik.	Isu dan Potret Buram Pelayanan Publik	Deskripsi gambaran pelayanan, Jenis-jenis permasalahan pelayanan, patologi birokrasi layanan, agenda strategi: Tinjauan Teoritik.	Ceramah dan diskusi, mandiri	50 menit tatap muka, 50 menit diskusi, 60 menit belajar mandiri	Kuis dan tugas	Mahasiswa dapat menjelaskan macam-macam pelayanan dan permasalahan dalam pelayanan	7,16
4	Mahasiswa dapat menjelaskan barang dan jasa pelayanan publik	Barang dan jasa	Konsep perbedaan barang dan jasa, tipologi barang dan jasa (barang publik, barang privat, common pool	Ceramah dan diskusi, mandiri	50 menit tatap muka, 50 menit diskusi, 60 menit belajar mandiri	Kuis dan tugas	Mahasiswa dapat menjelaskan konsep perbedaan barang dan jasa, tipologi barang dan jasa	7,16

5	Mahasiswa dapat menjelaskan tata kelola pelayanan sektor publik	Manajemen Pelayanan Sektor Publik	good, tools good)	Ceramah dan diskusi, mandiri	50 menit tatap muka, 50 menit diskusi, 60 menit belajar mandiri	Kuis dan tugas	Mahasiswa dapat memahami manajemen pelayanan sektor publik	7,16	
6	Mahasiswa dapat menjelaskan tata kelola pelayanan sektor privat	Pelayanan Sektor Privat	Lembaga/ Organisasi Penyedia Layanan, Peran Pemerintah Dalam Pelayanan Publik	Ceramah dan diskusi, mandiri	50 menit tatap muka, 50 menit diskusi, 60 menit belajar mandiri	Kuis dan tugas	Mahasiswa dapat memahami pelayanan sektor privat	7,16	
7	Mahasiswa dapat menjelaskan desain kualitas kinerja pelayanan publik	Kualitas kinerja pelayanan publik	Indikator kualitas layanan, Faktor yang berpengaruh terhadap kualitas layanan, mengukur kinerja layanan (beberapa konsep praktis)	Ceramah dan diskusi, mandiri	50 menit tatap muka, 50 menit diskusi, 60 menit belajar mandiri	Kuis dan tugas	Mahasiswa dapat menjelaskan kualitas kinerja pelayanan publik	7,16	

Ujian Tengah Semester (UTS)							
8							
9	Mahasiswa dapat mendiskusikan dan menjelaskan design peningkatan kualitas pelayanan publik	Design Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Pengertian dimensi dan level peningkatan kualitas layanan, strategi peningkatan layanan	Presentasi , diskusi, mandiri	30 menit presentasi, 70 menit diskusi, 60 menit belajar mandiri	Makalah, partisipasi	Mahasiswa dapat menjelaskan dan mendiskusikan design peningkatan kualitas pelayanan publik
10	Mahasiswa dapat menjelaskan privatisasi dalam layanan publik	Privatisasi dalam layanan publik	Pengertian privatisasi dalam layanan publik, pertimbangan melakukan privatisasi, model dan strategi privatisasi	Presentasi , diskusi, mandiri	30 menit presentasi, 70 menit diskusi, 60 menit belajar mandiri	Makalah, partisipasi	Mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami privatisasi dalam layanan publik
11	Mahasiswa dapat menjelaskan inovasi tata kelola pelayanan publik	Inovasi pelayanan : beberapa pengalaman praktis	Pelayanan publik dan penerapannya	Presentasi , diskusi, mandiri	30 menit presentasi, 70 menit diskusi, 60 menit belajar mandiri	Makalah, partisipasi	Mahasiswa dapat menjelaskan inovasi pelayanan
12	Mahasiswa dapat menjelaskan praktek penerapan e-Government	Penerapan E-Government	E-Government	Presentasi , diskusi, mandiri	30 menit presentasi, 70 menit diskusi,	Makalah, partisipasi	
							7,16

Daftar Pustaka

- Denhardt, Janet and Robert Denhardt. 2003. *The New Public Service : Serving notStreering*. M.E.Sharpe.London Dwiyanto, Agus (dkk). 2006. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University. Press.
- McCallum, Bruce. 1984. *The Public Service Manager, An Introduction to Personel Management in the Australian Public Service*. Longman Cheshire Pty Limited. Mulbourne.
- Jabra, Joseph G & OP Dwivedi. 1988. *Public Service Accountability : A comparative Perspective*. Kumarian Press Inc., USA.
- Dwiyanto, Agus (dkk). 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Universitas Gadjahmada.
- Savas, E.S. 2000. *Privatization and Public-Private Partnerships*. Chatam House Publishers, Seven Bridges Press, LLC. New York.
- McCallum, Bruce. 1984. *The Public Service Manager, An Introduction to Personnel Management in the Australian Public Service*. Longman Cheshire Pty Limited. Melbourne.
- Common, Richard., Norman Flynn and Elezabeth Mellon. 1993. *Managing Public Services, Competition and Decentralization*. Butterworth-Heinemann Ltd. London.
- Dwiyanto, Agus (dkk). 2002. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan. Universitas Gadjahmada.
- Savas, E.S. 2000. *Privatization and Public-Private Partnership*. Chatam House Publishers, Seven Bridges Press, LLC. New York.
- Hetifah, Sumarto.2009. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance: 20 prakarsa inovatif dan partisipatif di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (S1)

Mata Kuliah	:	Tata Kelola Sumber Daya Manusia Pemerintahan	Semester	:	Kode Mata Kuliah	:	SKS: 3
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan	Dosen Pengampu	:			
capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini:							
Di akhir perkuliahan mahasiswa akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman mengenai tata kelola Sumber Daya Manusia di sektor pemerintahan dalam perspektif teoritik dan praktik. Kebijakan pengelolaan SDM pemerintahan semakin penting karena peran dan kedudukannya yang strategis untuk menyediakan barang dan pelayanan kepada masyarakat, dengan tantangan yang semakin kompleks.							

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Jenis Evaluasi	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai (100%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Stelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui dan memahami tantangan yang dihadapi SDM Pemerintahan karena lingkungan yang terus berubah, baik demografis, ekonomi, sosial, politik, hukum dan juga perubahan	Pendahuluan Konteks lingkungan Dalam Tata Kelola SDM Pemerintahan (perubahan ekonomi,budaya, tehnologi dan lingkungan)	▪ Ceramah ▪ Tanya Jawab	150 Menit	Dilakukan tanya jawab secara acak terkait dengan isi materi perkuliahan	Kuis dan tugas	▪ Ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan jawaban atas pertanyaan yang diajukan ▪ Keaktifan mahasiswa di dalam proses perkuliahan	2%

	tehnologi								
2	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pentingnya perencanaan strategis di bidang SDM sektor pemerintahan melalui analisis lingkungan eksternal dan internal	- SDM dan Analisis Lingkungan Internal - SDM dan Analisis Lingkungan Eksternal - Strategi pengembangan SDM	- Ceramah - Tanya jawab	150 menit	Untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menyerap isi perkuliahan maka dilakukan tanya jawab terkait materi yang dibahas	Kuis dan tugas	- Ketepatan mahasiswa menjelaskan jawaban atas pertanyaan yang diajukan - Keaktifan mahasiswa dalam proses belajar mengajar	3%	
3-4	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan memahami tentang pentingnya kebijakan pengembangan SDM pemerintahan agar dapat bekerja secara profesional	- Pengertian Pengembangan SDM - Analisis dan deskripsi pekerjaan	- Ceramah - Tanya jawab	150 Menit	Untuk mengajak mahasiswa aktif maka diberikan pertanyaan terkait kebijakan kepegawaian di Indonesia	Kuis dan tugas	Mahasiswa yang aktif dan kritis akan memperoleh poin	3 %	
5	Setelah mengikuti perkuliahan maka mahasiswa diharapkan mengetahui dan memahami	- Standar dan Kualifikasi SDM Pemerintah - Teknik dalam seleksi SDM Pemerintahan	- Ceramah - Tugas	150 Menit	Tugas terstruktur agar mahasiswa mengidentifikasi	Kuis dan tugas	Ketepatan mahasiswa dalam mengidentifikasi pola rekrutmen dalam praktek penerimaan PNS di Indonesia	3 %	

9-10	Setelah mengikuti perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat mengetahui pentingnya manajemen kinerja dan evaluasi kinerja bagi SDM Pemerintahan. Hal ini juga sangat erat kaitannya dengan sistem pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM	- Program evaluasi Kinerja - Instrumen evaluasi kinerja - Umpan balik dan perbaikan kinerja	- Ceramah - Tanya jawab	300 menit	Setiap akhir pokok bahasan dilakukan tanya jawab untuk melihat kemampuan mahasiswa dalam menyerap isi pokok bahasan	Kuis dan tugas	Diberikan poin bagi mahasiswa yang mampu menjawab dengan benar atas pertanyaan yang dilontarkan	5 %
11-12	Setelah mengikuti perkuliahan maka mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kedudukan dan pengaturan SDM pemerintahan	- SDM pemerintahan sebagai pelayan publik dan aparatur negara - Hak dan kewajiban SDM pemerintahan (Gaji, pensiun, Perlindungan kesehatan dll)	- Ceramah - Diskusi	300 Menit	Diskusi kecil tentang apa peran utama SDM sektor pemerintahan	Kuis dan tugas	Mahasiswa aktif berpendapat dalam diskusi	5 %
13-14	Setelah mengikuti perkuliahan maka mahasiswa dapat mengetahui dan memahami pentingnya	- Pentingnya sistem informasi pegawai - Jenis sistem informasi pegawai	- Ceramah - Tanya jawab	300 menit	Tanya jawab kepada mahasiswa terkait isi pokok bahasan	Kuis dan tugas	Bagi mahasiswa yang mampu menjawab dengan benar akan diberikan poin	5 %

Daftar Pustaka

- Arvey, Richard D., 1979, *Fairness in Selecting Employee*, Addison-Wesley Publishing Co
- Churden, Jerbert J. And Sherman. Arthur W., 1984, *Managing Human Resources*, South-Western Publishing Co
- David, Fred R, 2007, *Strategic Management: Concept and Cases*, 13th Ed, Prentice Hall
- David Louis E., and Taylor, James C., (eds), 1979, *Design of Jobs*, 2nd Ed, Goodyear Publishing Company Inc.
- Effendi, Taufik, 2008, *Permasalahan dan Peningkatan Kinerja SDM Aparatur Negara Menghadapi Persaingan Global*, UNDIP
- Gomes, Faustino Cordoso, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi
- Latham, Gary P., and Wexley. Kenneth N, *Increasing Productivity Through Performance Appraisal*, Addison-Wesley Publishing Co
- Pynes, Joan E., 2004, *Human Resources Management for Public and Nonprofit Organizations*, 2nd Ed, Bjossey-Bass
- Walker, James W., and Gutteridge Thomas G, 1979, *Career Planning Practice*. AMACOM
- , 1980, *Human Resources Planning*, McGraw-Hill Book Co

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (S1)

Mata Kuliah	:	Studi Konstitusi	Semester	:	Kode Mata Kuliah	:	SKS: 3
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan	Dosen Pengampu	:			
capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini:							
Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu mengevaluasi penerapan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Good Governance.							

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Jenis Evaluasi	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai (100%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mhs Memahami CP; proses pembelajaran dan penilaian untuk memenuhi CP serta berkomitmen melaksanakan kontrak belajar	Pendahuluan Kontrak Belajar: a. RPS b. RTM c. Rubrik Penilaian	Penjelasan RPS, Rencana Tugas Mahasiswa, dan Rubrik Penilaian Kesepakatan RPS, RTM, dan Rubrik Penilaian Membangun komitmen mematuhi kontrak belajar	TM: (3 x 50) BM: (3 x 60) TS: (3 x 60)	a. Mhs mendapat penjelasan RPS, RTM, Rubrik penilaian dan arahan strategi dan metode belajar yang efektif untuk memenuhi CP dan standar	Kuis, tugas	Tingkat kerealistikan rencana strategi dan metode belajar Observasi penerapan 8 sikap	5%

			penilaian CP b. Mhs memahami isi dan tanggungjawab mematuhi kontrak belajar; Mhs c. Mhs merencanakan strategi dan metode belajar yang tepat untuk memenuhi kontrak belajar; Mhs belajar membiasakan 8 sikap: proaktif, visioner, fokus skala prioritas, berpikir menang-menang (<i>win-win solution</i>), empatik, bersinergi, reformis,				
			menyusun rencana strategi dan metode belajar				

2	Mhs menguasai konsep teoritis konstitusi (konstitusionalisme)	Perkembangan, Pengertian dan Makna konstitusi: a. Sejarah perkembangan konstitusi b. Pengertian dan makna konstitusi	Penjelasan pokok bahasan Tugas mandiri: merangkum pokok bahasan dari sumber referensi dan memetakan konsep teoritis konstitusi (konstitusionalisme) dalam bentuk <i>timeline</i> menggunakan <i>office power point</i> yg dilengkapi dengan narasi dan diekspor ke dalam format MP4	TM: (3 x 50) BM: (3 x 60) TS: (3 x 60)	a. Mhs mendapat penjelasan sejarah perkembangan, pengertian dan makna konstitusi; b. Mhs mempelajari materi pokok bahasan dari referensi wajib dan melakukan pengayaan materi dari referensi pendukung (yang dipilih); c. Mhs membuat rangkuman pokok bahasan dan memetanya	Kuis, tugas	Ketepatan isi, desain dan narasi rangkuman serta waktu penyelesaian tugas Respon publik Ketepatan menjawab soal (online)	7,5%
---	---	--	---	---	--	-------------	---	------

3	Mhs mampu menganalisis kedudukan, sifat, dan materi muatan konstitusi	Kedudukan, Sifat dan Materi Muatan Konstitusi: a. Kedudukan konstitusi b. Sifat konstitusi c. Materi muatan konstitusi	Penjelasan pokok bahasan Tugas mandiri: menganalisis kedudukan, sifat, dan materi muatan UUD 1945 (sebelum amandemen), Konstitusi RIS, dan UUD 1945 (pasca amandemen) berdasarkan konsep teoritis konstitusi dalam bentuk paparan menggunakan office power point yg dilengkapi dengan narasi dan diekspor ke dalam format MP4	TM: (3 x 50) BM: (3 x 60) TS: (3 x 60)	online dan mendapatkan umpan balik secara langsung tingkat pemenuhan CP	Kuis, tugas	Ketepatan isi, desain dan narasi paparan serta waktu penyelesaian tugas Respon publik Ketepatan menjawab soal (online)	7,5%
---	---	--	--	--	---	-------------	--	------

				paparan hasil analisis kedudukan, sifat, dan materi muatan konstitusi menggunak an office power point yg dilengkapi dengan narasi dan dieksport ke dalam format MP4 d. Mhs mengonsult asikan hasil karyanya kepada dosen pengampu matakuliah e. Mahasiswa mengunggag h hasil karyanya ke elearning dan ke Youtube setelah mendapat					
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--

4	Mhs mampu mengevaluasi nilai konstitusi dan budaya berkonstitusi	Nilai Konstitusi dan Budaya Berkonstitusi: a. Nilai Konstitusi b. Budaya berkonstitusi	Penjelasan pokok bahasan Tugas mandiri: Membuat analisis nilai konstitusi dan budaya berkonstitusi dalam bentuk/ menggunakan office power point yg dilengkapi dengan narasi dan dieksport ke dalam format MP4	TM: (3 x 50) BM: (3 x 60) TS: (3 x 60)	a. Mhs mendapat penjelasan mengenai nilai konstitusi dan budaya berkonstitusi i; b. Mhs mempelajari materi pokok bahasan dari referensi wajib dan melakukan pengayaan materi dari referensi pendukung (yang dipilih); c. Mhs membuat paparan hasil evaluasi nilai konstitusi dan budaya	Kuis, tugas	Ketepatan isi, desain dan narasi hasil evaluasi serta waktu penyelesaian tugas Respon publik Ketepatan menjawab soal (online)	7,5%
---	--	---	---	--	---	-------------	---	------

			berkonstitus i. menggunakan office power point yg dilengkapi dengan narasi dan dieksport ke dalam format MP4 d. Mhs mengonsultasikan hasil karyanya kepada dosen pengampu matakuliah e. Mahasiswa mengunggah hasil karyanya ke elearning dan ke Youtube setelah mendapat persetujuan dosen f. Mhs mengerjakan soal online dan				

5	Mhs mampu menganalisis keterkaitan konstitusionalisme dengan konstitusi tentang susunan dan bentuk negara, sistem dan bentuk pemerintahan	Bentuk Negara dan Pemerintahan: a. Susunan Negara b. Bentuk Negara c. Sistem Pemerintahan d. Bentuk Pemerintahan	Penjelasan pokok bahasan Tugas mandiri: Membuat paparan hasil analisis susunan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan bentuk pemerintahan yang dianut UUD 1945 (amandemen) berdasarkan konsep teoritis dalam bentuk/menggunakan office power point yg dilengkapi dengan narasi dan dieksport ke dalam format MP4	TM: (3 x 50) BM: (3 x 60) TS: (3 x 60)	a. Mhs mendapat penjelasan mengenai susunan dan bentuk negara, sistem dan bentuk pemerintahan; b. Mhs mempelajari materi pokok bahasan dari referensi wajib dan melakukan pengayaan materi dari referensi pendukung (yang dipilih); c. Mhs	mendapatkan umpan balik secara langsung tingkat pemenuhan CP	Kuis, tugas	Ketepatan isi, desain dan narasi hasil analisis serta waktu penyelesaian tugas Respon publik Ketepatan menjawab soal (online)	7,5%
---	---	---	---	--	--	--	-------------	---	------

				membuat paparan hasil analisis susunan negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan bentuk pemerintahan yang dianut UUD 1945 (amandemen) berdasarkan konsep teoritis menggunakan office power point yg dilengkapi dengan narasi dan dieksport ke dalam format MP4 d. Mhs mengonsultasikan hasil karyanya				
--	--	--	--	---	--	--	--	--

					kepada dosen pengampu matakuliah e. Mahasiswa mengunggah hasil karyanya ke elearning dan ke Youtube setelah mendapat persetujuan dosen f. Mhs mengerjakan soal online dan mendapatkan umpan balik secara langsung tingkat pemenuhan CP	Kuis, tugas	Ketepatan isi, desain dan narasi hasil analisis serta waktu penyelesaian tugas Respon publik	7,5%
6	Mhs mampu menganalisis keterkaitan konstitusionalisme dengan konstitusi tentang negara hukum, negara kesejahteraan, dan	Negara Hukum: a. Negara Hukum b. Negara Kesejahteraan c. Perlindungan HAM	Penjelasan pokok bahasan Tugas mandiri: Membuat paparan hasil analisis negara hukum, negara	TM: (3 x 50) BM: (3 x 60) TS: (3 x 60)	a. Mhs mendapat penjelasan mengenai konsep negara hukum dan negara			

	HAM	kesejahteraan, dan perlindungan HAM yang dianut UUD 1945 (amandemen) berdasarkan konsep teoritis dalam bentuk/menggu- na-kan office power point yg dilengkapi dengan narasi dan dieksport ke dalam format MP4		kesejahtera- an; b. Mhs mempelajar- i materi pokok bahasan dari referensi wajib dan melakukan pengayaan materi dari referensi pendukung (yang dipilih); c. Mhs membuat paparan hasil analisis konsep negara hukum, negara kesejahtera- an, dan perlindunga- n HAM yang dianut UUD 1945 (amandeme- n) berdasarka-		
--	-----	--	--	--	--	--

7	Mhs mampu menganalisis hubungan antar lembaga negara berdasarkan UUD 1945 pasca amandemen	Hubungan Antar Lembaga Negara (1): a. Konsep teoritis Lembaga Negara b. Pengisian jabatan, tugas, dan wewenang lembaga negara	Penjelasan pokok bahasan Tugas mandiri: Membuat paparan hasil analisis pengisian jabatan, tugas, wewenang lembaga2 negara dan hubungan antar lembaga negara menurut UUD 1945 (amandemen) berdasarkan konsep teoritis dalam bentuk/menggunakan office power point yg dilengkapi dengan narasi dan diekspor ke dalam format	TM: (3 x 50) BM: (3 x 60) TS: (3 x 60)	a. Mhs mendapat penjelasan mengenai konsep konsep teoritis lembaga negara; pengisian jabatan, tugas, wewenang lembaga negara dan hubungan antar lembaga negara b. Mhs mempelajari materi pokok bahasan dari referensi wajib dan	mendapatkan umpan balik secara langsung tingkat pemenuhan CP	Kuis, tugas	Ketepatan isi, desain dan narasi hasil analisis serta waktu penyelesaian tugas Respon publik Ketepatan menjawab soal (online)	7,5%
---	---	--	--	--	--	--	-------------	--	------

[illegible]

[illegible]

9-10	Mhs mampu menganalisis hubungan antar lembaga negara berdasarkan UUD 1945 pasca amendemen	Hubungan Antar Lembaga Negara (2): c. Hubungan antar lembaga negara	Penjelasan pokok bahasan Tugas mandiri: Membuat paparan hasil analisis pengisian jabatan, tugas, wewenang lembaga2 negara dan hubungan antar lembaga negara menurut UUD 1945 (amandemen) berdasarkan konsep teoritis dalam bentuk/menggunakan office power point yg dilengkapi dengan narasi dan dieksport ke dalam format MP4	TM: 2(3x50) BM: 2(3x60) TS: 2(3 x 60)	a. Mhs mendapat penjelasan mengenai hubungan antar lembaga negara b. Mhs mempelajari materi pokok bahasan dari referensi wajib dan melakukan pengayaan materi dari referensi pendukung (yang dipilih); c. Mhs membuat paparan hasil analisis hubungan antar lembaga negara menurut UUD 1945 (amandemen)	Kuis, tugas	Ketepatan isi, desain dan narasi hasil analisis serta waktu penyelesaian tugas Respon publik Ketepatan menjawab soal (online)	10%
------	---	---	--	---	---	-------------	---	-----

11-13	Mhs mampu menganalisis perbandingan konstitusi antar negara	Perbandingan Konstitusi: a. Konstitusi Amerika b. Konstitusi Inggris c. Konstitusi Uni Emirat Arab d. Konstitusi Australia	Penjelasan pokok bahasan Tugas mandiri: menganalisis perbandingan konstitusi antar negara dalam bentuk tabel dalam bentuk/menggunakan office power point yg dilengkapi dengan narasi dan diekspor ke dalam format MP4	TM: 2(3x50) BM: 2(3x60) TS: 2(3 x 60)	a. Mhs mendapat penjelasan mengenai perbandingan konstitusi antar negara b. Mhs mempelajari materi pokok bahasan dari referensi wajib dan melakukan pengayaan materi dari referensi pendukung (yang dipilih); c. Mhs membuat paparan hasil	Kuis, tugas	Ketepatan isi, desain dan narasi hasil analisis serta waktu penyelesaian tugas Respon publik Ketepatan menjawab soal (online)	10%
-------	---	---	--	--	--	-------------	---	-----

14	Mhs mampu menjelaskan sistem, prosedur dan praktek perubahan konstitusi	Perubahan Konstitusi: a. Teori perubahan konstitusi b. Sistem dan Prosedur Perubahan Konstitusi menurut UUD 45, Konstitusi RIS & UUDS 50 c. Praktek perubahan konstitusi melalui amandemen, maklumat, dekrit, dan konvensi d. Perkembangan isu amandemen	Penjelasan pokok bahasan	TM: (3 x 50) BM: (3 x 60) TS: (3 x 60)	a. Mhs merangkum, menyimpulkan konsep/teori dan prosedur perubahan UUD 45, Konstitusi RIS dan UUDS 50; (tugas mandiri), minimal dari 3 pustaka	f. Mhs mengerjakan soal online dan mendapatkan umpan balik secara langsung tingkat pemenuhan CP	Kuis, tugas	a. Ketepatan merangkum b. Ketepatan mengklasifikasikan sistem dan prosedur perubahan UUD 45, Konstitusi RIS dan UUDS 50; c. Kedisipinan dan ketepatan waktu menyelesaikan tugas d. Kemampuan menuangkan gagasan ke dalam media presentasi slide <i>power point</i>, dan MP4 e. Kemampuan presentasi, argumentasi teoritik dan	7,5%
----	---	--	--------------------------	---	--	---	-------------	--	------

		UUD 1945 ke-5	power point (dilengkapi dg audio narasi); mengeksport ke format MP4; Mengunggah hasilnya ke elearning dan Youtube		an argumentasi teoritik dalam mengklasifikasi sistem dan perosedur perubahan UUD 45, Konstitusi RIS dan UUDS 50, menuangkan hasilnya ke dlm format power point (ppt) c. Mengkonsultasikan hasil kerjanya kepada dosen pengampu d. Memperbaiki karyanya hingga mendapatkan persetujuan dosen e. Mengunggah		kerjasama f. Ketepatan menjawab soal	
--	--	---------------	---	--	---	--	---	--

15	Mhs mampu menganalisis konstitusionalitas peraturan perundang-undangan	Interpretasi dan Penemuan Hukum: a. Interpretasi/ penafsiran hukum b. Penemuan hukum oleh Hakim MK c. Penemuan hukum oleh Hakim MA	Penjelasan pokok bahasan Tugas mandiri: merangkum, menyimpulkan dan menerapkan teori untuk membangun argumentasi teoritik dalam	TM: (3 x 50) BM: (3 x 60) TS: (3 x 60)	a. Mhs mendapat penjelasan mengenai interpretasi dan penemuan hukum b. Mhs mempelajari materi pokok bahasan dari referensi wajib dan melakukan pengayaan	Kuis, tugas	Ketepatan isi, desain dan narasi hasil analisis serta waktu penyelesaian tugas Respon publik Ketepatan menjawab soal (online)	7,5%
					h hasilnya ke elearning dan Youtube f. Mhs mengerjakan soal online dan mendapatkan umpan balik secara langsung tingkat penguasaan CP			

			materi dari referensi pendukung (yang dipilih); c. Mhs membuat paparan hasil analisis interpretasi dan penemuan hukum beserta contohnya mengundkan office power point yg dilengkapi dengan narasi dan dieksport ke dalam format MP4 d. Mhs mengonsultasikan hasil karyanya kepada dosen pengampu matakuliah e. Mhs				
--	--	--	--	--	--	--	--

							mengunggah hasil karyanya ke elearning dan ke Youtube setelah mendapat persetujuan dosen f. Mhs mengerjakan soal online dan mendapatkan umpan balik secara langsung tingkat pemenuhan CP			
16	Ujian Akhir Semester (UAS)									

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

Asshiddiqie, Jimly dan Syafaat, M. Ali., 2011, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

Asshiddiqie, Jimly., 2006, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum, Seijen & Kepaniteraan MK-RI*, Jakarta (<http://pascasarjanaumj.org>)

[/file/TEORI%20HANS%20KELSEN%20TENTANG%20HUKUM.pdf](#)

_____, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 1*, Seijen & Kepaniteraan MK-RI, Jakarta

_____, 2006, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid 2*, Seijen & Kepaniteraan MK-RI, Jakarta ([http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid2.pdf](http://mitrahukum.org/wp-content/uploads/2012/09/Pengantar%20Ilmu%20Hukum%20Tata%20Negara%20Jilid2.pdf))

Sri Soemantri, 1987, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Bandung

Pustaka Pendukung

1. Dody Nur Andriyan, 2016, *Hukum Tata Negara dan Sistem Politik*, Deepublish, Yogyakarta

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (S1)

Mata Kuliah	:	Dasar-dasar Ilmu Pemerintahan	Semester	:	Kode Mata Kuliah	:	SKS: 3
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan	Dosen Pengampu	:			
capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini:							
Setelah menempuh mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat mengidentifikasi, menjelaskan, dan menganalisis tentang gejala-gejala pemerintahan, <i>state of the art</i> dari ilmu pemerintahan.							

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Jenis Evaluasi	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai (100%)
1	Mahasiswa mampu Mengidentifikasi munculnya masalah dan gejala pemerintahan	Pendahuluan Munculnya masalah dan gejala pemerintahan	Ceramah dan tanya jawab - Buku - Jurnal - Video - Website	3 x 50 menit	- Mendengarkan materi - Membaca materi - Melakukan identifikasi	- Tanya Jawab - Kuis	Mahasiswa mampu menjelaskan masalah dan gejala pemerintahan	5%
2	Mahasiswa mampu Mengidentifikasi dan menjelaskan hubungan pemerintahan dengan kehidupan manusia,	Hubungan pemerintahan dengan kehidupan manusia	Ceramah dan tanya jawab Penugasan 1: Mahasiswa diminta mengidentifikasi semua kebutuhan manusia dalam hidup dan	3 x 50 menit	- Membaca materi - Melakukan diskusi dan telaah - Melakukan identifikasi - Mengemukakan	- Tanya Jawab - Kuis - Tugas / Portofolio	- Mahasiswa mampu mengidentifikasi hubungan pemerintah dengan kehidupan manusia, - Mahasiswa mampu menjelaskan hubungan pemerintah dengan	7,5%

			hubungan kebutuhan tersebut dengan pentingnya diakomodir oleh pemerintah		pendapat dan gagasan	kehidupan manusia	
3	Mahasiswa mampu Menjelaskan pemerintahan sebagai kebutuhan manusia,	Pemerintahan sebagai kebutuhan manusia	• Buku • Jurnal • Video • Website	3 x 50 menit	• Mendengar kan materi • Membaca materi	Mahasiswa mampu menjelaskan pemerintahan sebagai kebutuhan manusia	5%
4	Mahasiswa mampu Menjelaskan eksistensi pemerintahan sebagai suatu gejala empiris	Existensi pemerintahan sebagai suatu gejala empiris	• Buku • Jurnal • Video • Website	3 x 50 menit	• Mendengar kan materi • Membaca materi	Mahasiswa mampu Menjelaskan eksistensi pemerintahan sebagai suatu gejala empiris	5%
5	Mahasiswa mampu Menjelaskan Munculnya ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu	Munculnya ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu dan seni.	• Buku • Jurnal	3 x 50 menit	• Mendengar kan materi • Membaca materi	Mahasiswa mampu Menjelaskan Munculnya ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu	5%

9	Mahasiswa mampu Mengidentifikasi problematika dan menjelaskan penelitian pemerintahan,	Problematika dan penelitian pemerintahan	Ceramah dan tanya jawab Penugasan 3: Mahasiswa diminta mengidentifikasi semua problematika masyarakat dan memilih problem tersebut menjadi problematika IP • Buku • Jurnal • Video • Website	3 x 50 menit	• Membaca materi • Melakukan diskusi dan telaah • Melakukan identifikasi • Mengemukakan pendapat dan gagasan	• Tanya Jawab • Kuis • Tugas / Portofolio	Mahasiswa mampu Mengidentifikasi problematika dan menjelaskan penelitian pemerintahan,	10%
10	Mahasiswa mampu Menjelaskan konsep dan teori pemerintahan	Konsep dan teori pemerintahan	Ceramah dan Tanya Jawab • Buku • Jurnal • Video • Website	3 x 50 menit	• Mendengarkan materi • Membaca materi	• Tanya Jawab • Kuis	Mahasiswa mampu Menjelaskan konsep dan teori pemerintahan	7,5%
11	Mahasiswa mampu Menjelaskan azas dan fungsi pemerintah,	Azas dan Fungsi Pemerintah	Ceramah dan Tanya Jawab • Buku • Jurnal • Video	3 x 50 menit	• Mendengarkan materi • Membaca materi	• Tanya Jawab • Kuis	Mahasiswa mampu Menjelaskan azas dan fungsi pemerintah,	5%

12	Mahasiswa mampu Menjelaskan Bentuk-bentuk dan sistem pemerintahan	Bentuk-bentuk dan sistem pemerintahan	- Website Ceramah dan Tanya Jawab - Buku - Jurnal - Video - Website	3 x 50 menit	- Mendengarkan materi - Membaca materi	- Tanya Jawab - Kuis	Mahasiswa mampu Menjelaskan Bentuk-bentuk dan sistem pemerintahan	5%	
13	Mahasiswa mampu Menjelaskan Metode dan pendekatan analisa dalam ilmu pemerintahan	Metode dan pendekatan analisa dalam ilmu pemerintahan	Ceramah dan Tanya Jawab Penugasan 4: Mahasiswa diminta untuk menganalisis problematika pemerintahan yang sudah diketahui dengan metode dan pendekatan analisis dalam IP - Buku - Jurnal - Video - Website	3 x 50 menit	- Membaca materi - Melakukan diskusi dan telaah - Melakukan identifikasi - Mengemukakan pendapat dan gagasan	- Tanya Jawab - Kuis - Tugas / Portofolio	Mahasiswa mampu Menjelaskan Metode dan pendekatan analisa dalam ilmu pemerintahan	15%	
14	Mahasiswa mampu Menjelaskan dan menganalisis	Perkembangan dan pertumbuhan ilmu	Ceramah dan Tanya Jawab	3 x 50 menit	- Mendengarkan materi - Membaca	- Tanya Jawab - Kuis	Mahasiswa mampu Menjelaskan dan menganalisis	5%	

	Perkembangan dan pertumbuhan ilmu pemerintahan	pemerintahan	• Buku • Jurnal • Video • Website	3 x 50 menit	materi	• Tanya Jawab • Kuis • Tugas / Portofolio	Perkembangan dan pertumbuhan ilmu pemerintahan	
15	Mahasiswa mampu Menganalisis Tantangan dan Masa Depan Ilmu Pemerintahan	Tantangan dan Masa Depan Ilmu Pemerintahan	Ceramah dan Tanya Jawab Penugasan 5: Mahasiswa diminta untuk menganalisis tantangan keilmuan IP di masa depan • Buku • Jurnal • Video • Website		• Membaca materi • Melakukan diskusi dan telaah • Melakukan identifikasi • Mengemukakan pendapat dan gagasan		Mahasiswa mampu Menganalisis Tantangan dan Masa Depan Ilmu Pemerintahan	10%
16	Ujian Akhir Semester (UAS)							

Daftar Pustaka

Bayu Surya Ningrat, Pengantar Ilmu Pemerintahan.
 Budiman, Arief. 1996. Teori Negara. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
 Hague, Rod. Harrop, Martin. 1982. Comparative Government and Politics An Introduction. Palgrave Macmillan. New York.
 Labolo, Muhadam. 2011. Memahami Ilmu Pemerintahan. Raja Grafindo Persada. Jakarta

- Ndraha, Talizi. 2005. *Kybernologi Sebuah Rekontruksi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Bandung
- Ndara, Talizi. 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Bandung
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Pustaka Rineka Cipta. Bandung
- Syafiie, Inu Kencana. 1992. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Refika Aditama. Bandung
- Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Politik*. Rineka Cipta. Bandung
- Hoogerwerf A., Ed., (1983), *Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Erlangga.
- Poelye, G.A. Van (terjemahan B. Mang Reng Say), (1953), *Pengantar Umum Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Soeroengan.
- McIver, (1983), *Jaring-Jaring Pemerintahan (Terjemahan Lila Hasyim)*, Jakarta: Aksara Baru.
- Surianingrat, Bayu, (1980), *Mengenal Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Aksara Baru.
- Mariun, (1970), *Asas-Asas Ilmu Pemerintahan*, Yogyakarta: Fakultas Sospol UGM.
- Sumendar, R., (1985), *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Semarang: Karya Aksara.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (S1)

Mata Kuliah	:	Perbandingan Pemerintahan	Semester	:	Kode Mata Kuliah	:	SKS: 3
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan	Dosen Pengampu	:			
capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini:							
Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pelbagai teori perbandingan pemerintahan dan menganalisisnya.							

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Jenis Evaluasi	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai (100%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	Pendahuluan	Ceramah dan tanya jawab - Buku - Jurnal - Video - Website	3 x 50 menit	- Mendengarkan materi - Membuat kontrak belajar	- Tanya Jawab - Kuis	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	5%
2	Hardskills: Menguasai konsep dasar dan teori politik, negara, demokrasi dan pemerintahan. Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan	Perbandingan Politik dan Pemerintahan	- Ceramah - Diskusi - Buku - Jurnal - Video - Website	3 x 50 menit	- Membaca materi - Melakukan diskusi dan telaah - Melakukan identifikasi	- Tanya Jawab - Kuis	Hardskills: Menguasai konsep dasar dan teori politik, negara, demokrasi dan pemerintahan. Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan	5%

	etika akademik;						etika akademik;	
3	Hardskills: Menguasai konsep dasar dan teori politik, negara, demokrasi dan pemerintahan. Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	Negara dan Rezim	Ceramah dan tanya jawab • Buku • Jurnal • Video • Website	3 x 50 menit	• Mendengarkan materi • Membaca materi	• Tanya Jawab • Kuis	Hardskills: Menguasai konsep dasar dan teori politik, negara, demokrasi dan pemerintahan. Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	5%
4	Hardskills: Menguasai konsep dasar dan teori politik, negara, demokrasi dan pemerintahan. Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	Institusi Politik	Ceramah dan tanya jawab • Buku • Jurnal • Video • Website	3 x 50 menit	• Mendengarkan materi • Membaca materi	• Tanya Jawab • Kuis	Hardskills: Menguasai konsep dasar dan teori politik, negara, demokrasi dan pemerintahan. Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	5%
5	Hardskills: Menguasai konsep dasar dan teori politik, negara, demokrasi dan pemerintahan. Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	Aktor-aktor Politik	Ceramah dan tanya jawab • Buku • Jurnal • Video • Website	3 x 50 menit	• Mendengarkan materi • Membaca materi	• Tanya Jawab • Kuis	Hardskills: Menguasai konsep dasar dan teori politik, negara, demokrasi dan pemerintahan. Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	5%

	nilai, norma, dan etika akademik;		3 x 50 menit				nilai, norma, dan etika akademik;	
6	Hardskills: Menguasai konsep lembaga politik dalam negara demokratis dalam konteks global Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	Globalisasi dan demokratisasi	Ceramah dan tanya jawab • Buku • Jurnal • Video • Website		• Mendengarkan materi • Membaca materi	• Tanya Jawab • Kuis	Hardskills: Menguasai konsep lembaga-lembaga politik dalam negara demokratis dalam konteks global Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	5%
7	Hardskills: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya; Mampu mendokumentasikan	Konsep-konsep dalam perbandingan pemerintahan	Take home essay • Buku • Jurnal • Video • Website	3 x 50 menit	• Membaca materi • Melakukan diskusi dan telaah • Melakukan identifikasi • Mengemukakan pendapat dan gagasan	• Tanya Jawab • Kuis • Tugas / Portofoli - o Take home/ Essay	Hardskills: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan keahliannya; Mampu mendokumentasikan, menyimpan,	30%

	an, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.						mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.		
	Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;						Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;		
8	Ujian Tengah Semester (UTS)								
9	Hardskills: Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional dan global menyangkut masalah-masalah pemerintahan	Perbandingan Pemerintahan I	Group discussion • Buku • Jurnal • Video • Website	3 x 50 menit	• Membaca materi • Melakukan diskusi dan telaah • Melakukan identifikasi	• Presentasi berkelompok	Hardskills: Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional dan global menyangkut masalah-masalah pemerintahan	Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;	5%
	Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;						Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;		

	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;						Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;		
10	Hardskills: Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional dan global menyangkut masalah-masalah pemerintahan Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	Perbandingan Pemerintahan II	Ceramah dan Tanya Jawab • Buku • Jurnal • Video • Website	3 x 50 menit	• Mendengarkan materi • Membaca materi	• Presentasi berkelompok	Hardskills: Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional dan global menyangkut masalah-masalah pemerintahan Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	5%	
11	Hardskills: Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional dan global menyangkut masalah-masalah pemerintahan	Perbandingan Pemerintahan III	Group discussion • Buku • Jurnal • Video • Website	3 x 50 menit	• Mendengarkan materi • Membaca materi	• Presentasi berkelompok	Hardskills: Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional dan global menyangkut masalah-masalah pemerintahan	5%	

	Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;						Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	
12	Hardskills: Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional dan global menyangkut masalah-masalah pemerintahan	Perbandingan Pemerintahan IV	Group discussion • Buku • Jurnal • Video • Website	3 x 50 menit	• Mendengarkan materi • Membaca materi	• Presentasi berkelompok	Hardskills: Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional dan global menyangkut masalah-masalah pemerintahan	5%
	Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;						Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	
13	Hardskills: Mampu melakukan analisis permasalahan pemerintahan nasional,	Perbandingan Pemerintahan V	Ceramah dan Tanya Jawab • Buku • Jurnal • Video	3 x 50 menit	• Membaca materi • Melakukan diskusi dan telaah • Melakukan	Presentasi berkelompok	Hardskills: Mampu melakukan analisis permasalahan pemerintahan nasional,	5%

	pemerintahan daerah, pemerintahan kota dan desa Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;		• Website		identifikasi		pemerintahan daerah, pemerintahan kota dan desa Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;		5%
14	Hardskills: Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional dan global menyangkut masalah-masalah pemerintahan Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;	Perspektif masa depan	Group discussion • Buku • Jurnal • Video • Website	3 x 50 menit	• Mendengarkan materi • Membaca materi	• Presentasi berkelompok	Hardskills: Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional dan global menyangkut masalah-masalah pemerintahan Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;		

15	Hardskills: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Menunjukkan sikap bertanggungjawab	Perbandingan Pemerintahan	Group paper • Buku • Jurnal • Video • Website	3 x 50 menit	• Membaca materi • Melakukan diskusi dan telaah • Melakukan identifikasi • Mengemukakan pendapat dan gagasan	• Tanya Jawab • Kuis • Tugas / Portofolio - o Hasil penelitian berkelompok	Hardskills: Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Softskills: Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya	30%
----	---	---------------------------	---	--------------	---	---	--	-----

	atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;						secara mandiri;	
16	Ujian Akhir Semester (UAS)							

Daftar Pustaka

- Bourchier, David dan Hadiz, Vedi R. 2003. *Indonesian Politics and Society A Reader*. London dan New York: Rouledge Curzon.
- Caramani, Daniele . 2008. *Comparative Politics*. Oxford: Oxford University Press
- Cheema, G.Shabbir & Rondenelli, Dennisa A. 1992. *Decentralization of Governance: Emerging Concepts and Practices*. Virginia: RR Donelley.
- Diamond, Larry. 2003. *Developing Democracy toward Consolidation* . Yogyakarta: IRE Press.
- Hadiz, Vedi. 2000. *Dinamika Kekuasaan: Ekonomi Politik Indonesia Pasca-Soeharto*. Jakarta: LP3ES.
- Hidayat, Syarif. 2007. *Too Much Too Soon, Local State Elites Perspective on and the Puzzle of Contemporary Indonesian Regional Autonomy Policy*. Jakarta: Raja Grafindo
- Karl Fields, Patrick O'Neil and Don Sher. 2006. *Cases in Comparative Politics*. 2nd Ed.
- Li, Jieli. 2002. "State Fragmentation: Toward a Theoretical Understanding of the Territorial Power of the State." *Sociological Theory* 20(2).
- Maliki, Zainuddin. 2010. *Sosiologi Politik: Makna Kekuasaan dan Transformasi Politik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Michels, Robert. *The Iron Low of Oligarchy (Hukum Besi Oligarki)*.
- Migdal, Joel S. 2001. *State in society: studying how state and societies transform constitute one another*. Cambridge, New York: Cambridge University Press. New York: W.W. Norton & Co
- Newton, Kenneth and Jan W. van Deth. 2010. *Foundations of Comparative Politics 2nd Edition*. New York: Cambridge University

- Putnam, Robert D, Robert Leonardi, and Raffaella Nanetti. 1993. *Making Democracy Work Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton, N.J: Princeton University Press, bab terpilih.
- Sen, Amartya. 2006. *Identity and Violence: the Illusion of Destiny*. New York dan London: W.W. Norton & Company.
- Smith, B.C. 1985. *Decentralization: the Territorial Dimension of the State*. London, Boston dan Sydney: George Allen & Unwin.
- Stoker, Gerry. 2006. *Why Politics Matters: making democracy work*. Palgrave MacMillan
- White, Stephen K dan Moon, J.Donald. 2004. *What is political theory?* London: Sage publication.
- Winters, Jeffrey A. 2011. *Oligarki*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Yoshino, Kosaku. 1995. *Consuming Ethnicity and Nationalism*. Asean

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (S1)

Mata Kuliah	:	Tata Kelola Pemerintahan	Semester	:	Kode Mata Kuliah	:	SKS: 3
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan	Dosen Pengampu	:			
capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini:							
Mahasiswa mampu melakukan analisis dan mengimplementasikan secara nyata pada bidang tatakelola pemerintahan.							

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Jenis Evaluasi	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai (100%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa mampu memahami dan mengerti arti tatakelola pemerintahan	- Kontrak belajar - Arti Penting Tata Kelola pemerintahan	Ceramah		Mendengarkan, memperhatikan	Tes, tugas	- Pemahaman materi - Keaktifan di kelas	4%
2	Memahami sejarah tata kelola pemerintahan Indonesia	- Sejarah Tata Kelola Pemerintahan - Tata kelola pemerintahan zaman kolonial, order lama, order baru dan reformasi	Ceramah		Mendengarkan, memperhatikan	Tes, tugas		4%
3	Mampu memahami	- Teori Tata	Ceramah		Mendengarkan	Tes, tugas		4%

	teori tentang tata kelola pemerintahan	Kelola Pemerintahan			n, Memperhatikan		
4	Memahami secara konseptual serta mengidentifikasi aktor-aktor dalam tata kelola pemerintahan	- Aktor-aktor dalam Tata Kelola Pemerintahan	Ceramah dan Visual (gambar)		Mendengarkan, Memperhatikan, melihat	Tes, tugas	4%
5	Mampu memahami teori governance dan menjelaskan aktor-aktor yang terlibat di dalamnya	- Teori Governance - Aktor Publik Dalam Governance	Ceramah, Visual dan Tanya jawab		Mendengarkan, memperhatikan, melihat, terlibat secara aktif (bertanya dan menjawab)	Tes, tugas	5%
6	Mampu menjelaskan peran dan mengidentifikasi yang termasuk aktor privat dalam governance	- Aktor Private dalam Governance	Ceramah, Visual dan Tanya jawab		Mendengarkan, memperhatikan, melihat, terlibat secara aktif (bertanya dan menjawab)	Tes, tugas	5%
7	Mampu menjelaskan peran peran civil society dan perbedaannya dengan aktor lainnya.	- Aktor Civil Society Dalam Governance	Ceramah, Visual dan Tanya jawab		Mendengarkan, memperhatikan, melihat, terlibat secara aktif	Tes, tugas	5%

							(bertanya dan menjawab)				
8	Ujian Tengah Semester (UTS)										
9	Memahami dan menganalisis media yang digunakan antar aktor serta pengaruh media dalam relasi antar aktor	- Relasi atau Media antara Aktor Publik, Privat dan Civil Society	Ceramah, Video, tanya jawab		Mendengarkan, memperhatikan, melihat, terlibat secara aktif (bertanya dan menjawab)	Tes, tugas					8%
10	Mampu mengidentifikasi hal-hal yang menentukan tata kelola pemerintahan	- Faktor-Faktor Pokok Yang Menentukan Tata Kelola Pemerintahan	Collaborative Learning, Tanya jawab		Mendengarkan, memperhatikan, melihat, terlibat secara aktif (bertanya dan menjawab)	Tes, tugas					8%
11	Mampu menganalisis antara konteks dan konsep dalam tata kelola pemerintahan	- Konteks dan Proses Dalam Tata Kelola Pemerintahan	Ceramah dan tanya jawab		Mendengarkan, memperhatikan, melihat, terlibat secara aktif (bertanya dan menjawab)	Tes, tugas					9%
12	Mampu melihat secara nyata serta melakukan analisis	- Observasi lapangan/instansi pemerintahan	Observasi, wawancara lapangan,		Melihat, mencatat, berinteraksi,	Tes, tugas					15%

Daftar Pustaka

- Bradley AO., Dennis, Prof. *University Governance-Governing What ?*. Makalah yang disampaikan pada Business Higher Education Round Table Conference, November 2003
- Effendi, Sofian. *Membangun Good Governance : Tugas Kita Bersama*. Prosiding Seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi Universitas Gadjah Mada, 25-27 September 2003
- International Monetary Fund. *The Role of the IMF in Governance Issues: Guidance Note*. IMF Executive Board, July 25, 1997)
- Osborne, David; Ted Gaebler. *Reinventing Government*. Reading, Addison-Wesley, 1992.
- Recomendations for Good University Governance in Denmark, report by the committee "University Boards in Denmark", 2003
- Sjahrir. Dr. "Good Governance di Indonesia Masih Utopia : Tinjauan Kritis Good Governance". [Jurnal Transparansi Edisi 14/Nov 1999](#). Masyarakat Transparansi Indonesia, 1999
- Sumarto, Hetifah Sji.. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance : 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatif di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta, 2003
- Woods, Ngaire. "The Challenge of Good Governance for the IMF and the World Bank Themselves". *World Development* Vol. 28 No. 5. Great Britain, 2000

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (S1)

Mata Kuliah	:	Teknologi Informasi Pemerintahan	Semester	:	Kode Mata Kuliah	:	SKS: 3
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan	Dosen Pengampu	:			
capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini:							
Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang teori dan praktik pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi dalam konteks e-Government.							

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Jenis Evaluasi	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai (100%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan deskripsi mata kuliah, definisi dan pentingnya teknologi informasi, serta jenis-jenis informasi digital.	1. Pendahuluan : - Pembukaan - Perkenalan - Kesepakatan Aturan Perkuliahan - Sosialisasi RPS 2. Pengertian-pengertian: - Teknologi Informasi - Pentingnya Teknologi Informasi Dalam Bidang Pemerintahan	Pembelajaran Kolaboratif	150 menit	Ceramah	Tanya Jawab	<u>Kriteria Penilaian:</u> Edukatif. <u>Indikator:</u> Kemampuan komunikasi	

		(Cloud, Web, Media Sosial) - Jenis-jenis informasi digital							
2	Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan perubahan pemerintahan dari masa ke masa	Transformasi Pemerintahan dari Konvensional ke Digital (perubahan era) - <i>Disruption of ICT</i>	Pembelajaran kooperatif	150 menit	Tugas	Tanya Jawab	<u>Kriteria Penilaian:</u> Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, dan Transparan <u>Indikator:</u> Kerapian sajian, Kreativitas ide, Banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas		
3	Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan Perubahan Paradigma Pemerintahan (OPA, NPM, NPS, NPG)	Perubahan Paradigma Pemerintahan: - OPA (Old Public Administration) - NPM (New Public Management) - NPS (New Public Service) - NPG (New Public Governance)	Studi kasus, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis masalah.	150 menit	Studi banding	Tanya Jawab	<u>Kriteria Penilaian:</u> Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, dan Transparan <u>Indikator:</u> Ketepatan analisis, Kerapian sajian		
4	Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan	<i>Electronic Government</i> - Definisi dan	Diskusi Kelompok	150 menit	Menyusun Paper	Tanya Jawab	<u>Kriteria Penilaian:</u> Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel,		

	definisi, pengertian, dan kemunculan <i>Electronic Government</i> .	Pengertian e-Government - Kemunculan e-Government					dan Transparan <u>Indikator:</u> Ketepatan analisis, Kerapian sajian, Kreatifitas ide, Kemampuan komunikasi, Banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas	
5	Mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tujuan, manfaat dan ruang lingkup e-Government.	- Tujuan e-Government - Manfaat e-Government - Ruang lingkup e-Government	pembelajaran kooperatif	150 menit	Tugas	Tanya Jawab	<u>Kriteria Penilaian:</u> Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, dan Transparan <u>Indikator:</u> Ketepatan analisis	
6	Mahasiswa diharapkan mampu menunjukkan Fase Perkembangan e-Government (<i>Publish, Interact, Transact</i>).	Fase Perkembangan e-Government: - <i>Publish</i> - <i>Interact</i> - <i>Transaction</i>	Simulasi	150 menit	Studi banding	Analisa Perbandingan	<u>Kriteria Penilaian:</u> Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, dan Transparan <u>Indikator:</u> Ketepatan analisis	
7	Mahasiswa diharapkan mampu merinci dimensi dan relasi e-Government (G to G, G to B, & G to C)	Dimensi dan Relasi e-Government: - Government to Government (<i>G to G</i>)	Studi kasus	150 menit	Studi banding	Tanya Jawab	<u>Kriteria Penilaian:</u> Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, dan Transparan	

		- Government to Bussiness (G to B) - Government to Citizen (G to C)							Indikator: Kreativitas ide	
8	Ujian Tengah Semester (UTS)									
9	Mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi Kebijakan tentang e-Government di Indonesia	Kebijakan e-Government di Indonesia - Dasar hukum.	Studi kasus	150 menit	Tugas	Analisis Kebijakan	Kriteria Penilaian: Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, dan Transparan Indikator: Ketepatan analisis			
10	Mahasiswa diharapkan mengalokasikan Elemen-elemen Sukses e-Government	Elemen-elemen Sukses e-Government: - Sumber Daya Manusia - Sumber Daya Keuangan - Infrastruktur - Kelembagaan - Kepemimpinan - Budaya	Pembelajaran berbasis masalah	150 menit	Studi banding	Hasil Perbandingan	Kriteria Penilaian: Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, dan Transparan Indikator: Ketepatan analisis, Kerapian sajian			
11	Mahasiswa diharapkan membandingkan kajian e-	Kajian e-Government di Beberapa Negara - Amerika	Diskusi dan Studi kasus	150 menit	Tugas	Tanya Jawab	Kriteria Penilaian: Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, dan Transparan			

	Government di beberapa Negara, seperti: Amerika, Eropa, Asia, Afrika.	- Eropa - Asia - Afrika					Indikator: Ketepatan analisis, Kerapian sajian.	
12-13	Mahasiswa diharapkan mampu mengemukakan berbagai bentuk inovasi, aplikasi, dan tools e-Government.	Inovasi e-Government - Contoh aplikasi e-Government (website, blog) - CMS-Joomla & Wordpress - IT Tools for Government (System Information Management)	Simulasi	150 menit	Survai	Praktek	Kriteria Penilaian: Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, dan Transparan Indikator: Kreativitas ide, Banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas	
14	Mahasiswa diharapkan mampu menerapkan aplikasi e-government.	Aplikasi e-government: - E-Voting - E-Regulation - E-Budgeting - E-Democracy - Dll.	Studi kasus	150 menit	Tugas	Praktek	Kriteria Penilaian: Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, dan Transparan Indikator: Ketepatan analisis, Kerapian sajian, Kreativitas ide, Banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas	
15	Mahasiswa diharapkan mampu menganalisis keamanan,	- Keamanan - Tantangan - Masa Depan Teknologi	Diskusi	150 menit	Tugas	Tanya Jawab	Kriteria Penilaian: Edukatif, Otentik, Objektif, Akuntabel, dan Transparan	

	tantangan, dan masa depan Teknologi Informasi Pemerintahan	Informasi Pemerintahan					Indikator: Ketepatan analisis.	
16	Ujian Akhir Semester (UAS)							

Daftar Pustaka

- Al-Hakim, Latif. 2007. *Global e-Government Theory, Applications and Benchmarking*. Melbourne:Idea Group Publishing.
- Andrianto, Nico. 2007. *Good Governance: Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Anwar, Khoirul, Asianti Oetojo S. 2004. *SIMDA: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintahan di Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hamdi, Muchlis. 2002. *Bunga Rampai Pemerintahan*. Jakarta: Yarsif Watampone.
- Holmes, Douglas. 2001. *E-Gov, E-Business Strategies for Government*. London:Nicholas Brealey Publishing.
- Indrajit, Ricardus Eko, Rudianto Dudy dan Zainuddin Akbar. 2005. *E-Government in Action: Ragam Kasus Implementasi Sukses di Berbagai Belahan Dunia*. Yogyakarta: Andi.
- _____. 2006. *Electronic Government: Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi.
- Indrayani Etin, Gatningsih. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan: Konsep dan Aplikasinya pada Organisasi Pemerintahan/Pemda*. Sumedang: IPDN Press.
- Jeong, Kuk-Hwan. 2006. *E-Government, The Road to Innovation: Principles and Experiences in Korea*. USA: Acid-Free Paper.
- Miller, Frederic P, ect. 2009. *E-Government: E-Government, Elecronics, Government, Transformational Government, Neologism,*

- Information Tecnology, Digital Divide, E-Democracy, Paperless Office, Open Government in Canada. USA: Alphascript Publishing.*
- Misuraca, Gianluca C. 2007. *E-Governance in Africa From Theory to Action: a Handbook on icts for local governancel. New Jersey:International Development Research Centre.*
- Pratama, Arif Budy. 2017. *Citra Pemerintah di Era Digital Tipologi dan Manajemen Reputasil. Yogyakarta: Gava Media.*
- Sutanta, Edy.2003. *Sistem Informasi Manajemen. Graha Ilmu: Yogyakarta.*
- Sutabri, Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen. Andi: Yogyakarta.*
- Suradinata, Ermaya. 1996. *Sistem Informasi Manajemen dan Proses Pengambilan Keputusan. Penerbit Ramadan: Bandung.*
- Syaujani, dkk. 2002. *Otonomi Dalam Negara Kesatuan RI.*
- Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.*
- Kristanto, Andri. 2007. *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya. Gava Media: Yogyakarta.*
- Bunga Rampai. 2006. *Sistem Informasi dalam Berbagai Perspektif. Informatika: Bandung.*
- Kadir, Abdul. 2002. *Pengenalan Sistem Informasi. Andi:Yogyakarta.*
- Indrayani, Etin. 2013. *Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan. IPDN Press: Jatinangor.*
- Yuliar, Sonny. 2009. *Tata Kelola Teknologi; Perspektif Teori Jaringan Aktor. Penerbit ITB: Bandung.*

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (S1)

Mata Kuliah	:	Kepemimpinan Pemerintahan	Semester	:	Kode Mata Kuliah	:	SKS: 3
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan	Dosen Pengampu	:			
capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini:							
Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis efektivitas kepemimpinan dalam pemerintahan.							

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Jenis Evaluasi	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai (100%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Menjelaskan pentingnya studi kepemimpinan dalam pemerintahan	Pendahuluan Pentingnya studi kepemimpinan dalam pemerintahan	• Ceramah • Diskusi • Buku • Video di https://www.youtube.com/watch?v=hg3h8VZUXNg	150	• Pengalaman menemukan sumber materi • Berdiskusi • Membuat catatan	Tes dan tugas	• Ketepatan menjawab soal • Kemampuan browsing tentang arti penting kepemimpinan dalam organisasi pemerintahan • Kemampuan memberikan contoh kepemimpinan dari berbagai Negara	
2	Menjelaskan konsep dan pengertian	Konsep dan pengertian	Ceramah dan diskusi	150	• Pengalaman menemukan	Tes dan tugas	• Ketepatan menjawab soal	

	kepemimpinan pemerintahan	kepemimpinan pemerintahan	Buku Sumber belajar dari internet		sumber materi - Berdiskusi - Membuat catatan		Kemampuan menyusun tulisan tentang menjelaskan konsep kepemimpinan	
3	Mengaplikasikan teori dan pendekatan dalam studi kepemimpinan	Teori dan pendekatan dalam studi kepemimpinan	- Ceramah - diskusi - Studi lapangan - Kajian terhadap sumber di internet - Simulasi	150	- Pengalaman menemukan sumber materi - Berdiskusi - Membuat catatan - Pengalaman menerapkan konsep dan teori - kemimpinan dalam skope laboratorium di kampus	Tes Tugas Praktik skala mini	- Kemampuan menjawab tes - Kemampuan membuat tugas - Kemampuan melaksanakan praktik dalam skala mini	
4	Mengaplikasikan gaya gaya kepemimpinan dalam pemerintahan	Gaya gaya kepemimpinan dalam pemerintahan	- Ceramah - diskusi - Studi lapangan - Kajian terhadap sumber di internet - Simulasi	150	- Pengalaman menemukan sumber materi - Berdiskusi - Membuat catatan - Pengalaman menerapkan gaya kepemimpinan	Tes Tugas Praktik skala mini	- Kemampuan menjawab tes - Kemampuan membuat tugas - Kemampuan melaksanakan praktik dalam skala mini	

5	Mengaplikasikan model kepemimpinan dalam pemerintahan	Model kepemimpinan dalam pemerintahan	• Ceramah • diskusi • Studi lapangan • Kajian terhadap sumber di internet • Simulasi	150	dalam skope laboratorium di kampus	Tes Tugas Praktik skala mini	• Kemampuan menjawab tes • Kemampuan membuat tugas • Kemampuan melaksanakan praktik dalam skala mini	
6	Mengaplikasikan fungsi kepemimpinan dalam pemerintahan	Fungsi kepemimpinan dalam pemerintahan	• Ceramah • diskusi • Studi lapangan • Kajian terhadap sumber di internet • Simulasi	150	dalam skope laboratorium di kampus	Tes Tugas Praktik skala mini	• Kemampuan menjawab tes • Kemampuan membuat tugas • Kemampuan melaksanakan praktik dalam skala mini	

7	Menjelaskan kepemimpinan dalam organisasi sector public	Kepemimpinan dalam organisasi sector public	Ceramah dan diskusi Buku Internet	150	• Pengalaman menemukan sumber materi • Berdiskusi • Membuat catatan	Tes dan tugas	• Ketepatan menjawab soal • Kemampuan menyusun tulisan tentang menjelaskan konsep kepemimpinan	
8	Ujian Tengah Semester (UTS)							
9	Menjelaskan kecakapan dan seni dalam kepemimpinan pemerintahan	Kecakapan dan seni dalam kepemimpinan pemerintahan	Ceramah dan diskusi Buku Internet	150	• Pengalaman menemukan sumber materi • Berdiskusi • Membuat catatan	Tes dan tugas	• Ketepatan menjawab soal • Kemampuan menyusun tulisan tentang menjelaskan konsep kepemimpinan	
10	Menganalisis kepemimpinan pemerintahan di Indonesia	Kepemimpinan pemerintahan di Indonesia	Ceramah dan diskusi Buku Internet	150	• Pengalaman menemukan sumber materi • Berdiskusi • Melakukan analisis	Tes Studi kasus	• Kemampuan menjawab tes • Kemampuan memecahkan masalah	
11	Menganalisis kepemimpinan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Kepemimpinan pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Ceramah dan diskusi Buku Internet	150	• Pengalaman menemukan sumber materi • Berdiskusi • Melakukan analisis	Tes Studi kasus	• Kemampuan menjawab tes • Kemampuan memecahkan masalah	

Daftar Pustaka

- J. Kaloh. 2009. *Kepemimpinan Kepala Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Luthans, F. 1989. *Organizational Behavior 5th United State*: McGraw Hill, Inc.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Kencana, Inu. 2009. *Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Nurcholis, Hanif. 2007. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*.
- Grasindo: Jakarta Prasetyo, dkk. 2004. *Pendopo Untuk Rakyat: Jejak Langkah Bupati Sejuta Ide : Membangun Purbalingga dengan Visi dan Misi*. Yogyakarta
- Purwanto, Widi. 2010. *Sepuluh Tahun Kepemimpinan Putra Daerah Membangun Purbalingga*. Purbalingga: Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- Sedarmayanti, 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan*. Bandung : Penerbit Refika Aditama
- Suradinata, Ermaya. 2008. *Kepemimpinan Daerah dan Nasional, Membangun Daerah Menuju Indonesia Bangkit*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo
- Sutrisno. 2010. *Membedah Perjalanan Sang Penggagas: Historiografi Triyono Budi Sasongko*. Purbalingga: Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- Sweeney, P.D. and McFarlin, D.B. 2002. *Organizational Behavior: Solutions for Management* New York: McGrawHill/Irwin.
- Yulk, G. 2001. *Kepemimpinan dalam Organisasi 5th. Edisi Terjemahan*. Jakarta: PT Indeks.
- Zaini, Subanto. 2011. *Leadership in Action*. Jakarta: Elex Media Komputindo

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (S1)

Mata Kuliah	:	Kebijakan Sektor Publik	Semester	:	Kode Mata Kuliah	:	SKS: 3
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan	Dosen Pengampu	:			
capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini:							
Mahasiswa mampu menganalisis kebijakan publik dalam kaitannya terhadap proses tata kelola pemerintahan.							

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Jenis Evaluasi	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai (100%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Kompetensi Utama: Mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup studi kebijakan sektor publik Sub Kompetensi: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan pengertian kebijakan sektor public 2. Mahasiswa mampu	Pendahuluan Ruang Lingkup Studi Kebijakan Sektor Publik 1. Istilah dan definisi kebijakan sektor publik 2. Urgensi kebijakan sektor publik	Diskusi dan tanya jawab	100 menit	Memperoleh pemahaman teoritis definisi dan urgensi kebijakan sector publik	▪ Kuis	▪ Presensi/Kehadiran ▪ Keaktifan Tanya jawab ▪ Ketepatan jawaban kuis	5%

	menjelaskan urgensi kebijakan sector public								
2-3	Kompetensi Utama: Mahasiswa mampu menjelaskan proses kebijakan sektor publik Sub Kompetensi: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan kerangka dan perspektif proses kebijakan sektor publik	Proses Kebijakan Sektor Publik 1. Proses pengkajian kebijakan sektor publik 2. Proses pembuatan kebijakan sektor publik 3. Proses komunikasi kebijakan sektor publik 4. Perspektif kebijakan sektor publik	Diskusi dan tanya jawab	100 menit	Memperoleh pemahaman teoritis proses kebijakan sektor publik	Kuis	- Presensi/Kehadiran - Keaktifan Tanya jawab - Ketepatan jawaban kuis	10%	
4	Kompetensi Utama: Mahasiswa mampu menjelaskan pendekatan dalam studi kebijakan sektor publik Sub Kompetensi: 1. Mahasiswa mampu	Pendekatan dalam Studi Kebijakan Sektor Publik 1. Pendekatan dalam studi kebijakan sektor publik	Diskusi, Tanya jawab, dan presentasi tugas	100 menit	Memperoleh pemahaman teoritis dan praktis pendekatan-pendekatan dalam studi kebijakan sektor publik	Tugas kelompok	- Presensi/Kehadiran - Keaktifan tanya jawab - Paper tugas kelompok - Presentasi tugas kelompok	10%	

	menjelaskan pendekatan dalam studi kebijakan sektor publik		Diskusi, Tanya jawab, dan media <i>short video/foto/artikel</i> media massa/ artikel media elektronik/film dokumenter	100 menit	Memperoleh pemahaman teoritis dan praktis masalah kebijakan sektor publik	▪ Kuis ▪ Tugas individu	▪ Presensi/Kehadiran ▪ Keaktifan Tanya jawab ▪ Ketepatan jawaban kuis ▪ Tugas individu: <i>paper/short video/foto/artikel</i> media massa/artikel media elektronik	15%
5-6	Kompetensi Utama: Mahasiswa mampu menganalisis masalah kebijakan sektor publik Sub Kompetensi: 1. Mahasiswa mampu m cirri masalah dan kelas masalah kebijakan sector publik 2. Mahasiswa mampu menganalisa masalah-masalah kebijakan sektor publik	Masalah – Masalah Kebijakan Sektor Publik 1. Ciri-cirimasalah Vs. 2. Masalah Vs. Isu 3. Tiga kelas masalah kebijakan sektor publik						
7	Kompetensi Utama: Mahasiswa mampu menjelaskan model kebijakan sektor publik.	Model Kebijakan Sektor Publik 1. Model deskriptif 2. Model normative	Diskusi dan Tanya jawab	100 menit	Memperoleh pemahaman teoritis model kebijakan sector publik	▪ Kuis	▪ Presensi/Kehadiran ▪ Keaktifan Tanya jawab ▪ Ketepatan jawaban kuis	5%

	Sub Kompetensi: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan tipe-tipe model kebijakan sektor public	3. Model verbal 4. Model simbolis 5. Model procedural 6. Model sebagai pengganti dan perspektif					
8	Ujian Tengah Semester (UTS)						
9	Kompetensi Utama: Mahasiswa mampu menganalisis penyusunan agenda kebijakan sektor publik Sub Kompetensi: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan systemic agenda dan institutional agenda 2. Mahasiswa mampu menganalisis systemic agenda dan institutional agenda	Penyusunan Agenda Kebijakan Sektor Publik 1. Systemic agenda 2. Institutional agenda 3. Dinamika penyusunan agenda	Diskusi, Tanya jawab, dan role play	100 menit	Memperoleh pemahaman teoritis dan praktis penyusunan agenda kebijakan sektor publik melalui role play	Tugas kelompok Role play Presensi/Kehadiran Keaktifan tanya jawab Paper tugas kelompok Role play: Simulasi penyusunan agenda kebijakan sektor publik	20%
10	Kompetensi Utama:	Formulasi Kebijakan	Diskusi dan Tanya jawab	100 menit	Memperoleh pemahaman	Tugas individu Presensi/Kehadiran	10%

	Mahasiswa mampu menganalisis formulasi kebijakan sektor publik Sub Kompetensi: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi formulasi, aktor yang terlibat, dan tipe-tipe formulasi kebijakan sektor publik 2. Mahasiswa mampu menganalisis formulasi kebijakan sektor publik	Sektor Publik 1. Definisi formulasi kebijakan sektor publik 2. Aktor yang terlibat 3. Tipe-tipe formulasi kebijakan sektor publik			teoritis mekanisme formulasi kebijakan sector publik	u	▪ Keaktifan Tanya jawab ▪ Tugas individu: formulasi kebijakan		5%
11	Kompetensi Utama: Mahasiswa mampu menganalisis legitimasi kebijakan sektor publik Sub Kompetensi: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi legitimasi, aktor	Legitimasi Kebijakan Sektor Publik 1. Definisi legitimasi kebijakan sektor publik 2. Aktor yang terlibat 3. Proses-proses legitimasi kebijakan	Diskusi dan Tanya jawab	100 menit	Memperoleh pemahaman teoritis mekanisme legitimasi kebijakan sector publik	▪ Kuis	▪ Presensi/Kehadiran ▪ Keaktifan Tanya jawab ▪ Ketepatan jawaban kuis		

	yang terlibat, dan proses-proses legitimasi sektor publik 2. Mahasiswa mampu menganalisis definisi legitimasi, aktor yang terlibat, dan proses-proses legitimasi sektor publik	sektor publik						
12	Kompetensi Utama: Mahasiswa mampu menganalisis implementasi kebijakan sektor publik Sub Kompetensi: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi implementasi, aktor yang terlibat, pilar implementasi dan tantangan implementasi kebijakan sektor publik	Implementasi Kebijakan Sektor Publik 1. Definisi implementasi kebijakan sektor publik 2. Aktor yang terlibat 3. Pilar implementasi 4. Tantangan implementasi kebijakan sektor publik 5. Proses-proses implementasi kebijakan sektor publik	Diskusi dan Tanya jawab	100 menit	Memperoleh pemahaman teoritis mekanisme implementasi kebijakan sector publik	Kuis	- Presensi/Kehadiran - Keaktifan Tanya jawab - Ketepatan jawaban kuis	5%

	2. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi implementasi, actor yang terlibat, pilar implementasi dan tantangan implementasi kebijakan sektor publik							
13	Kompetensi Utama: Mahasiswa mampu menganalisis monitoring kebijakan sektor publik Sub Kompetensi: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan kandefinisi monitoring, tujuan dan manfaat monitoring kebijakan sektor public 2. Mahasiswa mampu menganalisis definisi	Monitoring Kebijakan Sektor Publik 1. Definisi monitoring kebijakan sektor publik 2. Tujuan monitoring kebijakan sektor publik 3. Manfaat monitoring kebijakan sektor publik 4. Proses-proses monitoring kebijakan sektor publik	Diskusi dan Tanya jawab	100 menit	Memperoleh pemahaman teoritis mekanisme monitoring kebijakan sector publik	Kuis	- Presensi/Kehadiran - Keaktifan Tanya jawab - Ketepatan jawaban kuis	5%

	monitoring, tujuan dan manfaat monitoring kebijakan sektor publik								
14	Kompetensi Utama: Mahasiswa mampu menganalisis evaluasi kebijakan sektor publik Sub Kompetensi: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan definisi evaluasi, tujuan dan manfaat evaluasi kebijakan sektor publik 2. Mahasiswa mampu menganalisis definisi evaluasi, tujuan dan manfaat evaluasi kebijakan sektor publik	Evaluasi Dan Rekomendasi Kebijakan Sektor Publik 1. Definisi evaluasi dan rekomendasi kebijakan sektor publik 2. Tujuan evaluasi dan rekomendasi kebijakan sektor publik 3. Manfaat evaluasi dan rekomendasi kebijakan sektor publik 4. Proses-proses evaluasi dan rekomendasi kebijakan sektor publik	Diskusi dan Tanya jawab	100 menit	Memperoleh pemahaman teoritis mekanisme evaluasi dan rekomendasi kebijakan sector publik	Kuis	- Presensi/Kehadiran - Keaktifan Tanya jawab - Ketepatan jawaban kuis	10%	

15	Kompetensi Utama: Mahasiswa mampu menganalisis sebab-sebab kegagalan kebijakan sektor publik Sub Kompetensi: 1. Mahasiswa mampu menjelaskan sebab-sebab kegagalan kebijakan sektor publik melalui sebuah kasus 2. Mahasiswa mampu menjelaskan sebab-sebab kegagalan kebijakan sektor publik melalui sebuah kasus	Refleksi: Sebab-Sebab Kegagalan Kebijakan Sektor Publik 1. Sebab-sebab kegagalan kebijakan sektor publik (kasus)	Kuliah dosen tamu/pakar/praktisi: Diskusi dan Tanya jawab	100 menit	Memperoleh pemahaman praktis dari dosen tamu/pakar/praktisi terkait sebab-sebab kegagalan kebijakan sector publik	Diskusi - Presensi/Kehadiran - Keaktifan Tanya jawab	5%
16							

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

- Dunn, William. 1981. *An Introduction to Public Policy Analysis*. Boston: Simon-Schuster.
- Jones, Charles O. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. California: Wadsworth, Inc, Belmont.
- Dye, Thomas R. 2002. *Understanding Public Policy*. Upper Saddle River: Prentice Hall.

Pustaka Pendukung

- Anderson, James E. 1979. *Public Policy Making*. New York: Holt, Rinehart & Winston.
- Budiman, Arief, Barbara Hatley and Damien Kingsbury. 1999. *Reformasi: Crisis and Change in Indonesia*. Clayton: Monash Asia Institute.
- Dresang, Dennis L. dan James J. Gosling. 1999. *Politics and Policy in American States and Communities*. Boston: Allyn & Bacon.
- Emmerson, Donald K. (ed.). 1999. *Indonesia Beyond Suharto: Polity, Economy, Society, Transition*. New York: Asia Society.
- Jenkins-Smith, Hank C. 1990. *Democratic Politics and Policy Analysis*. California: Brooks/Cole Publishing Company.
- Peters, Guy B. 1996. *American Public Policy: Promise and Performance*. New Jersey: Chatham House Publishers, Inc.
- Stone, Deborah. 2002. *Policy Paradox: The Art of Political Decision Making*. New York: W.W. Norton & Company.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (S1)

Mata Kuliah	:	Metodologi Ilmu Pemerintahan	Semester	:	Kode Mata Kuliah	:	SKS: 3
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan	Dosen Pengampu	:			
capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini:							

Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu mengevaluasi penerapan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Good Governance.

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Jenis Evaluasi	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai (100%)
1	Mampu menjelaskan arti penting ilmu pemerintahan, konsep dan syarat sebagai ilmu	Pendahuluan Ilmu Pemerintahan sebagai suatu Ilmu : a. Konsep Ilmu dan syarat-syarat ilmu b. Ilmu Pemerintahan Sebagai Ilmu c. Arti Penting Ilmu Pemerintahan	• Ceramah /Tatap Muka • Tanya Jawab	1	- Berinteraksi antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah	Quiz	Mahasiswa menjelaskan konsep dan syarat ilmu, Ilmu pemerintahan sebagai ilmu serta arti penting ilmu pemerintahan,	(9)
2	Mampu menjelaskan	Perkembangan paradigmatik	• Ceramah		- Berinteraksi antar	Tugas Critical	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep	

	perkembangan paradigma Ilmu Pemerintahan	ilmu pemerintahan a. Konsep Paradigma Ilmu dan Ilmu Pemerintahan b. Perkembangan paradigmatik ilmu pemerintahan internasional c. Perkembangan paradigmatik ilmu pemerintahan di Indonesia	/Tatap Muka		mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah	review	dan perkembangan paradigim, khususnya di Indonesia	
3	Mampu menjelaskan Metodologi Ilmu Pemerintahan	Konseptual Metodologi Ilmu Pemerintahan a. Konsep Metodologi b. Arti Penting Metodologi Ilmu c. Konsep Metodologi Ilmu Pemerintahan d. Relevansi Kajian Metodologi Ilmu Pemerintahan	• Ceramah /Tatap Muka		- Berinteraksi antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah	Tugas Critical review	Mahasiswa mampu menjelaskan metodologi ilmu pemerintahan secara konseptual, serta arti pentingnya dan relevansi kajiannya	

4	Mampu menjelaskan Ontologi, epistemologi dan aksiologi dari Ilmu Pemerintahan	Ontologi, epistemologi dan aksiologi dari Ilmu Pemerintahan a. Ontologi Ilmu Pemerintahan b. Epistemologi Ilmu Pemerintahan c. Aksiologi Ilmu Pemerintahan	• Ceramah /Tatap Muka		- Berinteraksi antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah	Tugas Critical review	Mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan ontology, epistemologi dan aksiologis dari ilmu pemerintahan, serta mampu memberikan contoh penggunaannya	
5	Mampu menjelaskan perbedaan Lingkup Kajian Ilmu Pemerintahan Ranah state dan government Ranah Intermediari dan Ranah Civil Society	Lingkup Kajian Ilmu Pemerintahan a. Ranah state dan government b. Ranah Intermediari c. Ranah Civil Society	• Ceramah /Tatap Muka		- Berinteraksi antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah	Tugas Critical review	Mahasiswa mampu membedakan dan mengklasifikasikan lingkup kajian ilmu pemerintahan, baik <i>state & government</i> , <i>intermediary</i> dan <i>civil society</i>	
6	Mampu menjelaskan Konsep dan Teori-teori Pemerintahan a. Pengertian Teori b. Fungsi Teori c. Mengoperasionalkan Teori	Konsep dan Teori-teori Pemerintahan a. Pengertian Teori b. Fungsi Teori c. Mengoperasionalkan Teori	• Ceramah /Tatap Muka		- Berinteraksi antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah	Tugas Critical review	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menggunakan konsep dan teori dalam penelitian secara tepat	
7	Mampu menjelaskan dan	Theory Building untuk mengkaji	• Ceramah /Tatap Muka		- Berinteraksi antar	Tugas artikel	Mahasiswa mampu memahami	

	merangkai teori-teori dalam isu-isu <i>state</i> , <i>civil society</i> dan <i>intermediary</i> dengan tepat.	issue-isue <i>state</i> dan <i>government</i> ; <i>civil society</i> dan <i>intermediary</i> a. Teori untuk menganalisis <i>state</i> dan <i>government</i> b. Teori untuk menganalisis <i>Intermediary</i> c. Teori untuk menganalisis <i>Civil Society</i>			mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah		bangunan teoritik secara tepat dalam isu-isu yang berbeda. Selain itu mahasiswa juga mampu membangun teori secara tepat pada ranah isu yang diteliti	
8	Ujian Tengah Semester (UTS)							
9	Mampu menjelaskan dan mendudukkan teori secara tepat dalam penelitian	Hubungan teori dan penelitian dalam Ilmu Pemerintahan a. Berfikir deduktif b. Berfikir induktif c. Pentingnya Kajian Teori dalam Penelitian	Ceramah /Tatap Muka		- Berinteraksi antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah	Tugas Critical review	Mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan penggunaan teori dalam penelitian ilmu pemerintahan.	
10	Mampu merancang metode kuantitatif dalam penelitian ilmu pemerintahan	Metode dan pendekatan kuantitatif dalam analisa pemerintahan a. Pendekatan	Ceramah /Tatap Muka		- Berinteraksi antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah	Tugas merancang desain penelitian	Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan metode dan pendekatan kuantitatif dalam pendekatan	

		deskriptif b. Pendekatan survei c. Pendekatan Eksperimental					deskriptif, survei dan eksperimental	
11	Mampu merancang metode kualitatif dalam penelitian ilmu pemerintahan	Metode dan pendekatan kualitatif dalam analisa pemerintahan a. Pendekatan deskriptif b. Pendekatan Historis c. Pendekatan Etnografi d. Pendekatan Analisis Kebijakan e. Studi Kasus	• Ceramah /Tatap Muka		- Berinteraksi antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah	Tugas merancang desain penelitian	Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan metode dan pendekatan kualitatif dalam pendekatan deskriptif, historis, etnografi, analisis kebijakan dan studi kasus	
12	Mampu merancang metode campuran (Mixed method) dalam penelitian ilmu pemerintahan	Metode dan pendekatan campuran (mixed Method) dalam analisa pemerintahan a. Pendekatan deskriptif kuantitatif b. Interpretasi kuantitatif c. Triangulasi data	• Ceramah /Tatap Muka		- Berinteraksi antar mahasiswa dan dosen pengampu mata kuliah	Tugas merancang desain penelitian	Mahasiswa mampu menjelaskan penggunaan metode dan pendekatan mixed method dalam pendekatan deskriptif dan interpretasi kuantitatif, dan triangulasi data	

[illegible]

Daftar Pustaka

- Taliziduhu Ndraha, Metodologi Ilmu Pemerintahan, 2001, Penerbit Rineka Cipta Jakarta.
- Taliziduhu Ndraha, Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan, 2005, Penerbit Rineka Cipta Jakarta.
- Bayu Suryaningrat, Mengenal Ilmu Pemerintahan, 1992, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.
- Catherine Dawson, Metode Penelitian Praktis Sebuah Panduan 2001, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sudarwan Danim, Pengantar Studi Penelitian Kebijakan, 1997, Bumi Aksara Jakarta.
- John W. Creswell, Research Design, Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, 2012, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Finifter, Ada W., ed., (1993), *Political Science: The State of Discipline*, Washington DC: APSA.
- Goodin, Robert E., & Klingeman, Hans Dieter, eds., (1996), *New Handbooks of Political Science*, Oxford University Press: New York.
- Greenstein, Frederick & Polsby Nelson W., (1975), *Handbook of Political Science*, 8 Volumes, Reading, Mass.: Addison – Wesley.
- Ndraha, Taliziduhu, (1991), *Kybernologi Jilid I*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, (2003), *Kybernologi Jilid II*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, (2003), *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Majchrzak, Ann, (1984), *Methods for Policy Research*, Sage Publication Beverly Hills: London, New Delhi.
- Redjo, Samugyo Ibnu, (1998), *Analisa Pemerintahan di Indonesia*, Bandung: Media FISIP Press – Unpad.
- Labolo, Muhadam, (2010), *Memahami Ilmu Pemerintahan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Syafie, Inu Kencana, (2010), *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Refika Aditama.

Syafie, Inu Kencana, (2002), *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
JENJANG STRATA SATU (S1)

Mata Kuliah	:	Ekologi Pemerintahan	Semester	:	Kode Mata Kuliah	:	SKS: 3
Jurusan/Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan	Dosen Pengampu	:			
capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini:							
Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu mengevaluasi penerapan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Good Governance.							

Minggu ke	Kemampuan Akhir yang diharapkan	Bahan Kajian (Materi Ajar)	Metode Pembelajaran	Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Jenis Evaluasi	Kriteria Penilaian dan Indikator	Bobot Nilai (100%)
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mahasiswa dapat: Menjelaskan pengertian yang terkandung dalam istilah Ekologi Pemerintahan; 1. Menjelaskan ruang lingkup Ekologi Pemerintahan; 2. Menjelaskan perbedaan antara ekologi pemerintahan dengan ekologi administrasi negara dan	Pendahuluan Pengantar: Pengertian & Lingkup Ekologi Pemerintahan a. Pengertian & Lingkup Ekologi Pemerintahan b. Keterkaitan/int eraksi manusia sebagai suatu komunitas biologi dan budaya dengan	Ceramah/ Tanya Jawab			Tugas Individual (Resume)		

	pemerintahan ekologi; 3. Memahami dan mengembangkan mata kuliah ekologi pemerintahan melalui struktur mata kuliah ekologi pemerintahan;	lingkungan hidupnya. c. Penjelasan Umum Struktur Kuliah	Ceramah/ Tanya Jawab/	Tugas Individual (Resume)		
2-3	Mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan istilah dan pengertian ekologi; 2. Menjelaskan pembagian ekologi dalam ruang lingkungannya; 3. Menjelaskan tingkatan organisme makhluk hidup; 4. Menjelaskan konsep-konsep dalam ekologi	Tinjauan Umum Konsep-konsep Ekologi a. Konsep Ekosistem b. Produksi dan dekomposisi di alam c. Rantai pangan (food chain), jaringan pangan (food web), dan tingkat trofik (trophic levels). d. Homeostatis pada tingkatan organisme e. Energi f. Hukum Termodinamika				

[illegible]

	pemerintahan; 3. Menjelaskan keterkaitan konsep-konsep ekologi tersebut dengan kajian ekologi pemerintahan.	legalistic institution), merupakan organisasi formal yang bergerak atas konsepsi birokrasi.	Ceramah/ Tanya Jawab	Tugas Individual (Resume)		
6	Mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan perbedaan istilah kependudukan dan demografi; 2. Menjelaskan pengertian kependudukan; 3. Menguraikan ruang lingkup bidang kajian antara kependudukan dan demografi; 4. Menguraikan teori-teori dasar dalam ilmu kependudukan; 5. Menjelaskan konsep-konsep penting dalam ilmu kependudukan; 6. Kependudukan dan	Tinjauan Umum Konsep-konsep Kependudukan (1) a. Kependudukan dan demografi b. Teori Malthus dan teori-teori alamiah c. Teori transisi demografi d. Sejarah perkembangan penduduk dunia dan di Indonesia				

	Pembangunan; 7. Menjelaskan keterkaitan konsep-konsep kependudukan dengan kajian ekologi pemerintahan.								
7	Mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan perbedaan istilah kependudukan dan demografi; 2. Menjelaskan pengertian kependudukan; 3. Menguraikan ruang lingkup bidang kajian antara kependudukan dan demografi; 4. Menguraikan teori-teori dasar dalam ilmu kependudukan; 5. Menjelaskan konsep-konsep penting dalam ilmu kependudukan; 6. Kependudukan dan	Tinjauan Umum Konsep-konsep Kependudukan (2) a. Komposisi dan piramida penduduk b. Pengaruh kematian, kelahiran dan migrasi (gerak penduduk & urbanisasi) terhadap piramida penduduk c. Angkatan kerja, partisipasi angkatan kerja, pengangguran dan kesempatan kerja d. Penduduk,	Ceramah/ Tanya Jawab			Tugas Individual (Resume)			

	Pembangunan; 7. Menjelaskan keterkaitan konsep-konsep kependudukan dengan kajian ekologi pemerintahan.	lahan, pangan, revolusi hijau dan kemiskinan						
8	Ujian Tengah Semester (UTS)							
9	Mahasiswa dapat Menemukanli berbagai dimensi yang terdapat dalam organisme pemerintahan, dalam hal:.. 1. Menjelaskan pembagian dimensi ekologi pemerintahan; 2. Menjelaskan butir-butir dimensi organisme pemerintahan (faktor internal); 3. Menjelaskan butir-butir dimensi lingkungan fisik pemerintahan (faktor eksternal);	Dimensi Organisme Pemerintahan (1) a. Struktur Organisasi Pemerintahan ; b. Jaringan Organisasi; c. Kewenangan; d. Birokrasi/Prosedur;	Diskusi Kelompok (Makalah)				Tugas Individual (Resume)	

		4. Menjelaskan butir-butir dimensi lingkungan sosial pemerintahan (faktor eksternal).							
10		Mahasiswa dapat Menemukanli berbagai dimensi yang terdapat dalam organisme pemerintahan, dalam hal:.. - Menjelaskan pembagian dimensi ekologi pemerintahan; - Menjelaskan butir-butir dimensi organisme pemerintahan (faktor internal); - Menjelaskan butir-butir dimensi lingkungan fisik pemerintahan (faktor eksternal); - Menjelaskan butir-butir	Dimensi Organisme Pemerintahan (2) - Program; - Personalialia; - Anggaran; - Peralatan/Teknologi; - Pelayanan Umum; - Etika Pemerintahan	Diskusi Kelompok (Makalah)				Tugas Individual (Resume)	

	dimensi lingkungan sosial pemerintahan (faktor eksternal).									
11	Mahasiswa dapat: 1. Menguraikan faktor lingkungan geografis yang mempengaruhi ekologi pemerintahan; 2. Menguraikan faktor ketersediaan sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik; 3. Menjelaskan berbagai problem yang masih dihadapi pemerintah saat ini terkait dengan faktor lingkungan fisik pemerintahan.	Dimensi Lingkungan Fisik Pemerintahan (1) a. Lingkungan geografis: b. Sumber daya alam dan kekayaan alam.	Diskusi Kelompok (Makalah)				Tugas Individual (Resume)			
12	Mahasiswa dapat: 1. Menguraikan faktor	Dimensi Lingkungan Fisik Pemerintahan (2)					Tugas Individual (Resume)			

	lingkungan geografis yang mempengaruhi ekologi pemerintahan; 2. Menguraikan faktor ketersediaan sumber daya alam yang tidak dikelola dengan baik; 3. Menjelaskan berbagai problem yang masih dihadapi pemerintah saat ini terkait dengan faktor lingkungan fisik pemerintahan.	Penduduk: 1). Penduduk sebagai faktor lingkungan fisik; 2). Penduduk sebagai faktor ekonomi; 3). Jumlah penduduk dan daya dukung lingkungan; 4). Pengendalian pertumbuhan penduduk.							
13	Mahasiswa dapat: 1. Menjelaskan faktor ideologi yang mempengaruhi sistem dan bentuk pemerintahan; 2. Menjelaskan faktor politik yang mempengaruhi pemerintahan;	Dimensi Lingkungan Sosial Pemerintahan (1) a. Ideologi b. Sosial Budaya c. Sosial Politik	Diskusi Kelompok (Makalah)			Tugas Individual (Resume)			

3. Menjelaskan faktor sosial yang mempengaruhi pemerintahan; 4. Menjelaskan faktor budaya yang mempengaruhi pemerintahan; 5. Menjelaskan faktor ekonomi yang mempengaruhi pemerintahan; 6. Menjelaskan faktor keamanan sosial yang mempengaruhi pemerintahan;									
14	Mahasiswa dapat: - Menjelaskan faktor ideologi yang mempengaruhi sistem dan bentuk pemerintahan; - Menjelaskan faktor politik yang mempengaruhi pemerintahan;	Dimensi Lingkungan Sosial Pemerintahan (2)	- Sosial - Ekonomi - Kearifan Sosial	Diskusi Kelompok (Makalah)					Tugas Individual (Resume)

3. Menjelaskan faktor sosial yang mempengaruhi pemerintahan;									
4. Menjelaskan faktor budaya yang mempengaruhi pemerintahan;									
5. Menjelaskan faktor ekonomi yang mempengaruhi pemerintahan;									
6. Menjelaskan faktor keamanan sosial yang mempengaruhi pemerintahan;									
15	Mahasiswa dapat mengenal berbagai pendekatan dalam ekologi pemerintahan yang menjadi dasar perilaku aparat pemerintah, yaitu: 1. Menguraikan berbagai pendekatan dalam ekologi pemerintahan;	Pendekatan-pendekatan dalam ekologi pemerintahan Pendekatan ekologi pemerintahan:: a. Pendekatan Awal (Asli) b. Pendekatan determinisme c. Pendekatan	Ceramah/ Tanya Jawab					Tugas Individual (Resume)	

	2. Menjelaskan masing-masing pendekatan dalam ekologi pemerintahan; 3. Menerapkan masing-masing pendekatan tersebut dalam analisis ekologi pemerintahan;	posibilisme d. Pendekatan ekologi kebudayaan e. Pendekatan ekosistem f. Pendekatan system						
16	Ujian Akhir Semester (UAS)							

Daftar Pustaka

Pustaka Utama

- Apriansyah, 2003, **Bahan Ajar: Mata Kuliah Ekologi (Ber) Pemerintahan (Governance Ecology)**, Jurusan Pemerintahan Fisip Unlam.
- Apriansyah, 2001, **Pengisian Karakter Sosial-Budaya Komunitas Atas Terpencil Dayak Panikin (Desa Mayanau, Kecamatan Aawayan, Kab. HSU Kalsel)**, Hasil Penelitian. Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Kalimantan Selatan.
- Heddy, Suwasono, dan Metty Kurniawati, 1996, **Prinsip-prinsip Dasar Ekologi: Suatu Bahasan tentang Kaidah Ekologi dan Penerapannya**, Rajawali Pers, Jakarta.
- Resosoedarmo, Soedjiran., Kuswata Kartawinata, dan Apriliani Soegiarto, 1992, **Pengantar Ekologi**, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Roosadijo, Marmin Martin., 1982, **Ekologi Pemerintahan di Indonesia**, Alumnii, Bandung.

Setiono, Budi, 2002, **Jaring Birokrasi: Tinjauan dari Aspek Politik dan Administrasi**, Gugus Press, Bekasi.

Sitanggang, H., 1996, **Ekologi Pemerintahan**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Syafie, Inu Kencana, tanpa tahun, **Ekologi Pemerintahan**, PT. Perija Jakarta.

Pustaka Pendukung

Adiwibowo, Soeryo, 1983, **Sistem Sosial Ekologi Tambak dan Sawah di Wilayah Pesisir Kabupaten Karawang**, Tesis, Belum Dipublikasikan, Fakultas Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.

Ricklefs, Robert E., 1979, **Ecology**, Fourth Printing, Chiron Press incorporated New York & Concord.

Rusli, Said, 1995, **Pengantar Ilmu Kependudukan**, LP3ES, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1990, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali, Jakarta.

Sunito, Satyawati, 1997, **Pengantar Sosiologi**, (Bahan Kuliah Program Pra-Pascasarjana IPB), IPB, Bogor.

Keessing, Roger M., dan Samuel Gunawan, 1992, **Antropologi Budaya**,: **Suatu Perspektif Kontemporer (Jilid 1&2)**, Erlangga, Jakarta.

Odum, Eugene P., 1996, **Dasar-dasar Ekologi**, Tjahjono Samangan (Penerjemah), Edisi Ketiga, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta.

LAMPIRAN 2
DAFTAR HADIR LOKAKARYA
KURIKULUM



KESATUAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA

KAPSIPI

Sekretariat: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad Lt. 3 Gedung D
Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21 Jatinangor HP: 082240048555 - 08561900653
E-mail : pengurus@kapsipi.org

Mengetahui

NO	NAMA PESERTA DARI PRODI ILMU PEMERINTAHAN	ASAL UNIVERSITAS	TANDA TANGAN
1.	Prof. Dr. Drs. H. Utang Suwaryo, M.A	Universitas Padjajaran	
2.	Dr. H. Aos Kuswandi, Drs., M.Si.	Universitas Islam 45 Bekasi	
3.	Dr. Hj. Dewi Kurniasih, M.Si	Universitas Komputer Indonesia	
4.	Restu Karlina Rahayu, SIP., M.Si.	Universitas Brawijaya	
5.	Indra Aditya, S.IP., M.I.Pol,	Universitas Singaperbangsa Karawang	
6.	Dr. Teguh Yuwono, M.Pol.	Universitas Diponegoro	
7.	Sopyan Resmana, S. IP., MA	Universitas Singaperbangsa Karawang	
8.	Ika Arinia Indriyany, MA	Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	
9.	Analius Giawa, S.IP, M.Si	STPMD "APMD" Yogya	
10.	Dr. Siti Aisyah, M.Pd	Universitas Terbuka	
11.	Dra. Mani Festati Broto, M.Ed	Universitas Terbuka	
12.	Rendra Setyadiharja, S.Sos, M.IP	STISIPOI Raja Haji	
13.	Rahmatullah. S.IP, M. Si	Universitas Hassanudin	
14.	Bahtiar SH, MSi	Universitas Muhammadiyah Jember	
15.	Yamardi, S.IP., M.Si.	Universitas Jendral A. Yani	
16.	Dr. Amalia Syauket, SH., M.Si	Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Tangerang	
17.	Dr. M. Nur Alamsyah, S.IP. M.Si;	Universitas Mulawarman	
18.	Dra. Nurhamni, M.Si.	Universitas Tadulako	
19.	Nur Hasanah, S. Sos., M.Si.	Universitas Mulawarman	
20.	Ferri Wicaksono, S.IP., MA.	AMIKOM Yogyakarta	
21.	Hj. Hikmah Muhaimim, S.Sos.I., M.PSDM	Universitas Islam Majapahit	
22.	Bramantyo Tri Asmoro, S.Hub.Int., M. PSDM	Universitas Islam Raden Rahmat	
23.	Dra. Puji Astuti, M.Si.	Universitas Diponegoro	



KESATUAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA

K A P S I P I

Sekretariat: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad Lt. 3 Gedung D
Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21 Jatinangor HP: 082240048555 - 08561900653
E-mail: pengurus@kapsipi.org

24.	Anyualatha Haridison, M.Si.	Universitas Palangkaraya	
25.	Salahudin, S.IP., M.Si., M.P.A.	Universitas Muhammadiyah Malang	
26.	Novia Kencana, MPA.	Universitas Indo Global Mandiri	
27.	Dr. Sitti Chaeriyah, M.Si.	Universitas Tadulako	
28.	Hj. Siti Nuraini, Dra., M.Si.	Universitas Islam 45 Bekasi	
29.	Kiki Endah, S.Sos., M.Si.	Universitas Galuh	
30.	Drs. Itok Wicaksono, M.Si.	Universitas Muhammadiyah Jember	
31.	Tatik Fidowaty, S.IP., M.Si.	Universitas Komputer Indonesia	
32.	Drs. Apriansyah, M.Si.	Universitas Lambung Mangkurat	
33.	Raja Dachroni, S.Sos, M.Si.	Stisipol Raja Haji	
34.	Rema Marina, S.Sos	STISIP Amal Yapis ^{Yapis} ^{Amal}	
35.	Baskoro Wicaksono, S.IP., MIP	Universitas Riau	
36.	Muhammad Zuhdan, S.IP., MA.	Universitas AMIKOM Yogyakarta	
37.	Rahmad Gustomay, S.IP., M.IP.	Universitas Brawijaya	
38.	Tri Endah Karya Lestiyani, S.IP, M.IP	UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi	
39.	Dr. Alfon Kimbal, S.Sos., M.Si.	Universitas Sam Ratulangi	
40.	Edhi Siswanto, SIP, M.Si.	Universitas Muhammadiyah Jember	
41.	Budi Mulianto, S.IP, M.Si	Universitas Islam Riau	
42.	Dr. Agus Joko Purwanto, SIP, M.Si.	Universitas Terbuka	
43.	Panca Setyo Prihatin, S.IP, M.Si	Universitas Islam Riau	
44.	M. Eko Atmojo, M.IP.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	
45.	Dr. Rahyu Nur Raufi, M.Si.	Universitas Islam Riau	
46.	Dr. Dyah Mutiarin, M.Si.	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	
47.	Eva Kurnia Farhan, S.IP., MPA	Universitas Musi Rawas	



KESATUAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA

K A P S I P I

Sekretariat: Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unpad Lt. 3 Gedung D
Jl. Raya Bandung Sumedang Km. 21 Jatinangor HP: 082240048555 - 08561900653
E-mail: pengurus@kapsipi.org

48.	Dr. Suswanta, M.Si	Universitas Muhammadiyah Yogyakarta	
49.	Muh. Fadil, S.IP., M.Si	Universitas Islam 45 Bekasi	

LAMPIRAN 3

**PERATURAN PRESIDEN NO. 08 TAHUN
2012 TENTANG KKNP**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2012
TENTANG
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
3. Penyetaraan adalah proses penyandingan dan pengintegrasian capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja.
4. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNi.
5. Pengalaman kerja adalah pengalaman melakukan pekerjaan dalam bidang tertentu dan jangka waktu tertentu secara intensif yang menghasilkan kompetensi.
6. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional, dan/atau Standar Khusus.

7. Sertifikat ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

7. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
8. Profesi adalah bidang pekerjaan yang memiliki kompetensi tertentu yang diakui oleh masyarakat.

BAB II JENJANG DAN PENYETARAAN

Pasal 2

- (1) KKNi terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi.
- (2) Jenjang kualifikasi KKNi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jenjang 1 sampai dengan jenjang 3 dikelompokkan dalam jabatan operator;
 - b. jenjang 4 sampai dengan jenjang 6 dikelompokkan dalam jabatan teknisi atau analis;
 - c. jenjang 7 sampai dengan jenjang 9 dikelompokkan dalam jabatan ahli.
- (3) Setiap jenjang kualifikasi pada KKNi mencakup nilai-nilai sesuai deskripsi umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.

Pasal 3

Setiap jenjang kualifikasi pada KKNi memiliki kesetaraan dengan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan, pelatihan kerja atau pengalaman kerja.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4

- (1) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja dinyatakan dalam bentuk sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (3) Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan.
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bentuk pengakuan atas capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan kerja.
- (5) Capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pengalaman kerja dinyatakan dalam bentuk keterangan yang dikeluarkan oleh tempat yang bersangkutan bekerja.

Pasal 5

Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:

- a. lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;
- b. lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;
- c. lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
- d. lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
- e. lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;
- f. lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6;
- g. lulusan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- g. lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8;
- h. lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
- i. lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
- j. lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9.

Pasal 6

- (1) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI terdiri atas:
 - a. lulusan pelatihan kerja tingkat operator setara dengan jenjang 1, 2, dan 3;
 - b. lulusan pelatihan kerja tingkat teknisi/analisis setara dengan jenjang 4, 5, dan 6;
 - c. lulusan pelatihan kerja tingkat ahli setara dengan jenjang 7, 8, dan 9.
- (2) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pelatihan kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI dilakukan dengan sertifikasi kompetensi.

Pasal 7

- (1) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja dengan jenjang kualifikasi pada KKNI mempertimbangkan bidang dan lama pengalaman kerja, tingkat pendidikan serta pelatihan kerja yang telah diperoleh.
- (2) Lama pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing sektor atau subsektor.
- (3) Penyetaraan capaian pembelajaran yang dihasilkan melalui pengalaman kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan sertifikasi kompetensi.

Pasal 8 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 8

- (1) Pengakuan dan penyetaraan kualifikasi pada KKNI dengan kerangka kualifikasi negara lain atau sebaliknya, baik secara bilateral maupun multilateral dilakukan atas dasar perjanjian kerja sama saling pengakuan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian kerja sama saling pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan notifikasi dan perjanjian kerja sama saling pengakuan.

BAB III

PENERAPAN KKNI

Pasal 9

- (1) Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi ditetapkan oleh kementerian atau lembaga yang membidangi sektor atau bidang profesi yang bersangkutan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penerapan KKNI pada setiap sektor atau bidang profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada deskripsi jenjang kualifikasi KKNI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan KKNI diatur oleh Menteri yang membidangi ketenagakerjaan dan Menteri yang membidangi pendidikan baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai bidang tugasnya masing-masing.

BAB IV ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini, penjenjangan kualifikasi kompetensi pada sektor atau bidang profesi yang telah ada dilakukan penyesuaian dengan mengacu pada Peraturan Presiden ini dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Dalam hal penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terikat oleh perjanjian internasional atau telah diatur dengan peraturan perundangan-undangan yang lebih tinggi dilakukan harmonisasi dan/atau konversi.
- (3) Penyesuaian penjenjangan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan harmonisasi dan/atau konversi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui forum konvensi yang diinisiasi oleh kementerian yang membidangi ketenagakerjaan dan kementerian yang membidangi pendidikan dengan melibatkan pemangku kepentingan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet,

Agus Sumartono, S.H., M.H.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 8 TAHUN 2012

TANGGAL 17 Januari 2012

DESKRIPSI JENJANG KUALIFIKASI KKNI

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
Deskripsi umum	a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya. c. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia. d. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya. e. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain. f. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
1	Mampu melaksanakan tugas sederhana, terbatas, bersifat rutin, dengan menggunakan alat, aturan, dan proses yang telah ditetapkan, serta di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab atasannya.
	Memiliki pengetahuan faktual.
	Bertanggung jawab atas pekerjaan sendiri dan tidak bertanggung jawab atas pekerjaan orang lain.
2	Mampu melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya.
	Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

Mampu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
3	Mampu melaksanakan serangkaian tugas spesifik, dengan menerjemahkan informasi dan menggunakan alat, berdasarkan sejumlah pilihan prosedur kerja, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur, yang sebagian merupakan hasil kerja sendiri dengan pengawasan tidak langsung.
	Memiliki pengetahuan operasional yang lengkap, prinsip-prinsip serta konsep umum yang terkait dengan fakta bidang keahlian tertentu, sehingga mampu menyelesaikan berbagai masalah yang lazim dengan metode yang sesuai.
	Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas kuantitas dan mutu hasil kerja orang lain.
4	Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
	Menguasai beberapa prinsip dasar bidang keahlian tertentu dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya.
	Mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.
5	Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku dengan menganalisis data, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
	Mampu mengelola kelompok kerja dan menyusun laporan tertulis secara komprehensif.
	Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.
6	Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

Menguasai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural. Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.
7	Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner. Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.
8	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.
9	Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner.

Mampu ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

~ 4 ~

JENJANG KUALIFIKASI	URAIAN
	Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 17 Januari 2012

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Bidang Kesejahteraan Rakyat
Sekretariat Kabinet,

Agus Sumartono, S.H., M.H.

LAMPIRAN 4
PERMENRISTEKDIKTI NO. 44 TAHUN
2015 TENTANG SNPT

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (3) dan Pasal 54 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Standar Nasional Penelitian adalah kriteria minimal tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
6. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
7. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
8. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.

10. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
11. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.
12. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
13. Satuan Kredit Semester, yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
14. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
15. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

Pasal 2

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan;

- b. Standar Nasional Penelitian; dan
 - c. Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (2) Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 3

- (1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi bertujuan untuk:
- a. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan;
 - b. menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - c. mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.
- (2) Standar Nasional Pendidikan Tinggi wajib:
- a. dipenuhi oleh setiap perguruan tinggi untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
 - b. dijadikan dasar untuk pemberian izin pendirian perguruan tinggi dan izin pembukaan program studi;
 - c. dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;

- d. dijadikan dasar penyelenggaraan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
 - f. dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) wajib dievaluasi dan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan, sesuai dengan tuntutan perubahan lokal, nasional, dan global oleh badan yang ditugaskan untuk menyusun dan mengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

BAB II

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan

Pasal 4

- (1) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:
- a. standar kompetensi lulusan;
 - b. standar isi pembelajaran;
 - c. standar proses pembelajaran;
 - d. standar penilaian pembelajaran;
 - e. standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - f. standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - g. standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - h. standar pembiayaan pembelajaran.
- (2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum.

Bagian Kedua
Standar Kompetensi Lulusan

Pasal 5

- (1) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI; dan
 - b. memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

Pasal 6

- (1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.

- (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- (3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
 - a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
 - b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Pasal 7

- (1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh perguruan tinggi.
- (3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh:
 - a. forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau
 - b. pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis.
- (4) Rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.
- (5) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikaji dan ditetapkan oleh Menteri sebagai rujukan program studi sejenis.
- (6) Ketentuan mengenai penyusunan, pengusulan, pengkajian, penetapan rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur dengan Peraturan Menteri.

Bagian Ketiga

Standar Isi Pembelajaran

Pasal 8

- (1) Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada capaian pembelajaran lulusan.

- (3) Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, spesialis, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 9

- (1) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl.
- (2) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. lulusan program diploma satu paling sedikit menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;
 - b. lulusan program diploma dua paling sedikit menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - c. lulusan program diploma tiga paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum;
 - d. lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - e. lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu;
 - f. lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan

g. lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspesialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.

- (3) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat kumulatif dan/atau integratif.
- (4) Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah.

Bagian Keempat

Standar Proses Pembelajaran

Pasal 10

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.

Pasal 11

- (1) Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.

- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.

- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 12

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- (2) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (3) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;

- c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.
- (2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
- (4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 14

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- (2) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. kuliah;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.

- (6) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan.
- (7) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (8) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal 15

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran sks.
- (2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.

- (3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- (4) Semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan:
 - a. selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;
 - b. beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
 - c. sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (5) Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

Pasal 16

- (1) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:
 - a. paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;
 - b. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;
 - c. paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;
 - d. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;
 - e. paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;

- f. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau
 - g. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.
- (2) Program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan.
 - (3) Perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 17

- (1) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (2) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
 - a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- (3) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- (4) 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Pasal 18

- (1) Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.
- (2) Mahasiswa program magister, program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan, setelah paling sedikit 2 (dua) semester mengikuti program magister atau program magister terapan, tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut.
- (3) Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor.
- (4) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.

- (5) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.

Bagian Kelima
Standar Penilaian Pembelajaran

Pasal 19

- (1) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 20

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.

- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 21

- (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 22

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
- a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;

- b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
 - c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program subspesialis, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Pasal 24

- (1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:
- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
 - b. huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
 - c. huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
 - d. huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
 - e. huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- (2) Perguruan tinggi dapat menggunakan huruf antara dan angka antara untuk nilai pada kisaran 0 (nol) sampai 4 (empat).
- (3) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- (4) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).

- (5) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (6) Indeks prestasi semester (IPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (7) Indeks prestasi kumulatif (IPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

Pasal 25

- (1) Mahasiswa program diploma dan program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol).
- (2) Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol); atau

- c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- (3) Mahasiswa program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol).
- (4) Kelulusan mahasiswa dari program profesi, program spesialis, program magister, program magister terapan, program doktor, program doktor terapan, dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:
- a. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);
 - b. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,51(tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima); atau
 - c. mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima).
- (5) Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:
- a. ijazah, bagi lulusan program diploma, program sarjana, program magister, program magister terapan, program doktor, dan program doktor terapan;
 - b. sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi;

- c. sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya;
 - d. gelar; dan
 - e. surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- (6) Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b diterbitkan oleh perguruan tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.
- (7) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c diterbitkan oleh perguruan tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.

Bagian Keenam

Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pasal 26

Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 27

- (1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.

- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- (3) Kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.
- (4) Dosen program diploma satu dan program diploma dua harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (5) Dosen program diploma satu dan program diploma dua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat menggunakan instruktur yang berkualifikasi akademik paling rendah lulusan diploma tiga yang memiliki pengalaman relevan dengan program studi dan paling rendah setara dengan jenjang 6 (enam) KKNI.
- (6) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (7) Dosen program diploma tiga dan program diploma empat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (8) Dosen program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi.
- (9) Dosen program sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

- (10) Dosen program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (11) Dosen program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
- (12) Dosen program magister dan program magister terapan harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi.
- (13) Dosen program magister dan program magister terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (12) dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.
- (14) Dosen program spesialis dan subspesialis harus berkualifikasi lulusan subspesialis, lulusan doktor atau lulusan doktor terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun.
- (15) Dosen program doktor dan program doktor terapan:
 - a. harus berkualifikasi akademik lulusan doktor atau doktor terapan yang relevan dengan program studi, dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI; dan

- b. dalam hal sebagai pembimbing utama, dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir telah menghasilkan paling sedikit:
 - 1. 1 (satu) karya ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional yang bereputasi; atau
 - 2. 1 (satu) bentuk lain yang diakui oleh kelompok pakar yang ditetapkan senat perguruan tinggi.
- (16) Penyetaraan atas jenjang 6 (enam) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5), jenjang 8 (delapan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (7), ayat (9), dan ayat (11), dan jenjang 9 (sembilan) KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dan ayat (15) dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau.

Pasal 28

- (1) Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:
- a. kegiatan pokok dosen mencakup:
 - 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - 3. pembimbingan dan pelatihan;
 - 4. penelitian; dan
 - 5. pengabdian kepada masyarakat;
 - b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c. kegiatan penunjang.
- (2) Beban kerja pada kegiatan pokok dosen sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) huruf a disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan.

- (3) Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.
- (4) Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa.
- (5) Nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 29

- (1) Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada 1 (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.
- (3) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
- (4) Jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang.
- (5) Dosen tetap untuk program doktor atau program doktor terapan paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor.
- (6) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.

Pasal 30

- (1) Tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya.

- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tenaga administrasi.
- (3) Tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat.
- (4) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.

Bagian Ketujuh

Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran

Pasal 31

Standar sarana dan prasarana pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Pasal 32

- (1) Standar sarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas:
 - a. perabot;
 - b. peralatan pendidikan;
 - c. media pendidikan;
 - d. buku, buku elektronik, dan repositori;
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. instrumentasi eksperimen;
 - g. sarana olahraga;
 - h. sarana berkesenian;
 - i. sarana fasilitas umum;
 - j. bahan habis pakai; dan
 - k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.

- (2) Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

Pasal 33

- (1) Standar prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 paling sedikit terdiri atas:
 - a. lahan;
 - b. ruang kelas;
 - c. perpustakaan;
 - d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;
 - e. tempat berolahraga;
 - f. ruang untuk berkesenian;
 - g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
 - h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
 - i. ruang dosen;
 - j. ruang tata usaha; dan
 - k. fasilitas umum.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
 - a. jalan;
 - b. air;
 - c. listrik;
 - d. jaringan komunikasi suara; dan
 - e. data.

Pasal 34

- (1) Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a harus berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- (2) Lahan pada saat perguruan tinggi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara perguruan tinggi.

Pasal 35

Pedoman mengenai kriteria prasarana pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf k ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Pasal 36

- (1) Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara.
- (2) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- (3) Standar kualitas bangunan perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan pada peraturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.

Pasal 37

- (1) Perguruan tinggi harus menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang berkebutuhan khusus.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelabelan dengan tulisan *Braille* dan informasi dalam bentuk suara;
 - b. lerengan (*ramp*) untuk pengguna kursi roda;
 - c. jalur pemandu (*guiding block*) di jalan atau koridor di lingkungan kampus;
 - d. peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan
 - e. toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.

- (3) Pedoman mengenai sarana dan prasarana bagi mahasiswa yang berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.

Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan Pembelajaran

Pasal 38

- (1) Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.
- (2) Standar pengelolaan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

Pasal 39

- (1) Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi.
- (2) Unit Pengelola program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
 - b. menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
 - c. melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;

- d. melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e. melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- (3) Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
- a. menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
 - b. menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
 - e. memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan
 - f. menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Bagian Kesembilan
Standar Pembiayaan Pembelajaran

Pasal 40

- (1) Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.
- (2) Biaya investasi pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi.
- (3) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- (4) Biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- (5) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh Menteri dengan mempertimbangkan:
 - a. jenis program studi;
 - b. tingkat akreditasi perguruan tinggi dan program studi; dan
 - c. indeks kemahalan wilayah;

- (6) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.

Pasal 41

Perguruan tinggi wajib:

- a. mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan program studi;
- b. melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan; dan
- c. melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 42

- (1) Badan penyelenggara perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa.
- (2) Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, antara lain:
 - a. hibah;
 - b. jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - c. dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - d. kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- (3) Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

BAB III

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Standar Nasional Penelitian

Pasal 43

Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

- a. standar hasil penelitian;
- b. standar isi penelitian;
- c. standar proses penelitian;
- d. standar penilaian penelitian;
- e. standar peneliti;
- f. standar sarana dan prasarana penelitian;
- g. standar pengelolaan penelitian; dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.

Bagian Kedua

Standar Hasil Penelitian

Pasal 44

- (1) Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- (2) Hasil penelitian di perguruan tinggi diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (4) Hasil penelitian mahasiswa harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

- (5) Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat.

Bagian Ketiga Standar Isi Penelitian

Pasal 45

- (1) Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- (3) Materi pada penelitian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- (4) Materi pada penelitian terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- (5) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.
- (6) Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

Bagian Keempat
Standar Proses Penelitian

Pasal 46

- (1) Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- (2) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- (3) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
- (5) Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).

Bagian Kelima
Standar Penilaian Penelitian

Pasal 47

- (1) Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- (2) Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;

- b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- (3) Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.
 - (4) Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.
 - (5) Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

Bagian Keenam

Standar Peneliti

Pasal 48

- (1) Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.
- (2) Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- (3) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil penelitian.

- (4) Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Bagian Ketujuh Standar Sarana dan Prasarana Penelitian

Pasal 49

- (1) Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian.
- (2) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;
 - b. proses pembelajaran; dan
 - c. kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Sarana dan prasarana penelitian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan Penelitian

Pasal 50

- (1) Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.

- (2) Pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola penelitian.
- (3) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga penelitian, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Pasal 51

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
 - e. melakukan diseminasi hasil penelitian;
 - f. memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
 - g. memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
 - h. melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
- (2) Perguruan tinggi wajib:
 - a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;

- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
- e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Bagian Kesembilan

Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

Pasal 52

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- (2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal.

- (3) Selain dari anggaran penelitian internal perguruan tinggi, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan penelitian;
 - b. pelaksanaan penelitian;
 - c. pengendalian penelitian;
 - d. pemantauan dan evaluasi penelitian;
 - e. pelaporan hasil penelitian; dan
 - f. diseminasi hasil penelitian.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 53

- (1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian.
- (2) Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;
 - b. peningkatan kapasitas peneliti; dan
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).

BAB IV STANDAR NASIONAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Ruang Lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 54

Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- a. standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- b. standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- c. standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- d. standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- e. standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- f. standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- g. standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat;
dan
- h. standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 55

- (1) Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

- (2) Hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;
 - b. pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - c. bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - d. bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.

Bagian Ketiga

Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 56

- (1) Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- (4) Hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. hasil penelitian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat;

- c. teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;
- d. model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; atau
- e. kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

Bagian Keempat

Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 57

- (1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
 - a. pelayanan kepada masyarakat;
 - b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya;
 - c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
- (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.

- (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4).
- (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Bagian Kelima

Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 58

- (1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

- (3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tingkat kepuasan masyarakat;
 - b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 - c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;
 - d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
 - e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- (5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Keenam

Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 59

- (1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
- (3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. kualifikasi akademik; dan
 - b. hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (4) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.

Bagian Ketujuh

Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 60

- (1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

- (2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:
 - a. memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan;
 - b. proses pembelajaran; dan
 - c. kegiatan penelitian.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

Bagian Kedelapan

Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 61

- (1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

Pasal 62

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) wajib:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;
 - f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
 - g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;
 - h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
 - j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.
- (2) Perguruan tinggi wajib:
 - a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;

- b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;
- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;
- e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

Bagian Kesembilan
Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada
Masyarakat

Pasal 63

- (1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- (4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat;
 - d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat;
 - e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur oleh pemimpin perguruan tinggi.

Pasal 64

- (1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. peningkatan kapasitas pelaksana.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 65

Ketentuan tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk pendidikan program studi di luar domisi, pendidikan jarak jauh, akademi komunitas, dan program pendidikan yang memerlukan pengaturan khusus diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

- a. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Menteri, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi;

- b. persyaratan pembimbing utama, wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (15) huruf b paling lama 3 (tiga) tahun;
- c. lahan dan bangunan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib disesuaikan dengan ketentuan Pasal 34 dan Pasal 36 paling lama 20 (dua puluh tahun);
- d. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri ini paling lama 2 (dua) tahun; dan
- e. semua ketentuan tentang kriteria minimum yang berfungsi sebagai standar pendidikan tinggi dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 belum ditetapkan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Desember 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1952

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001

LAMPIRAN 5
PANDUAN KURIKULUM PENDIDIKAN
TINGGI TAHUN 2016



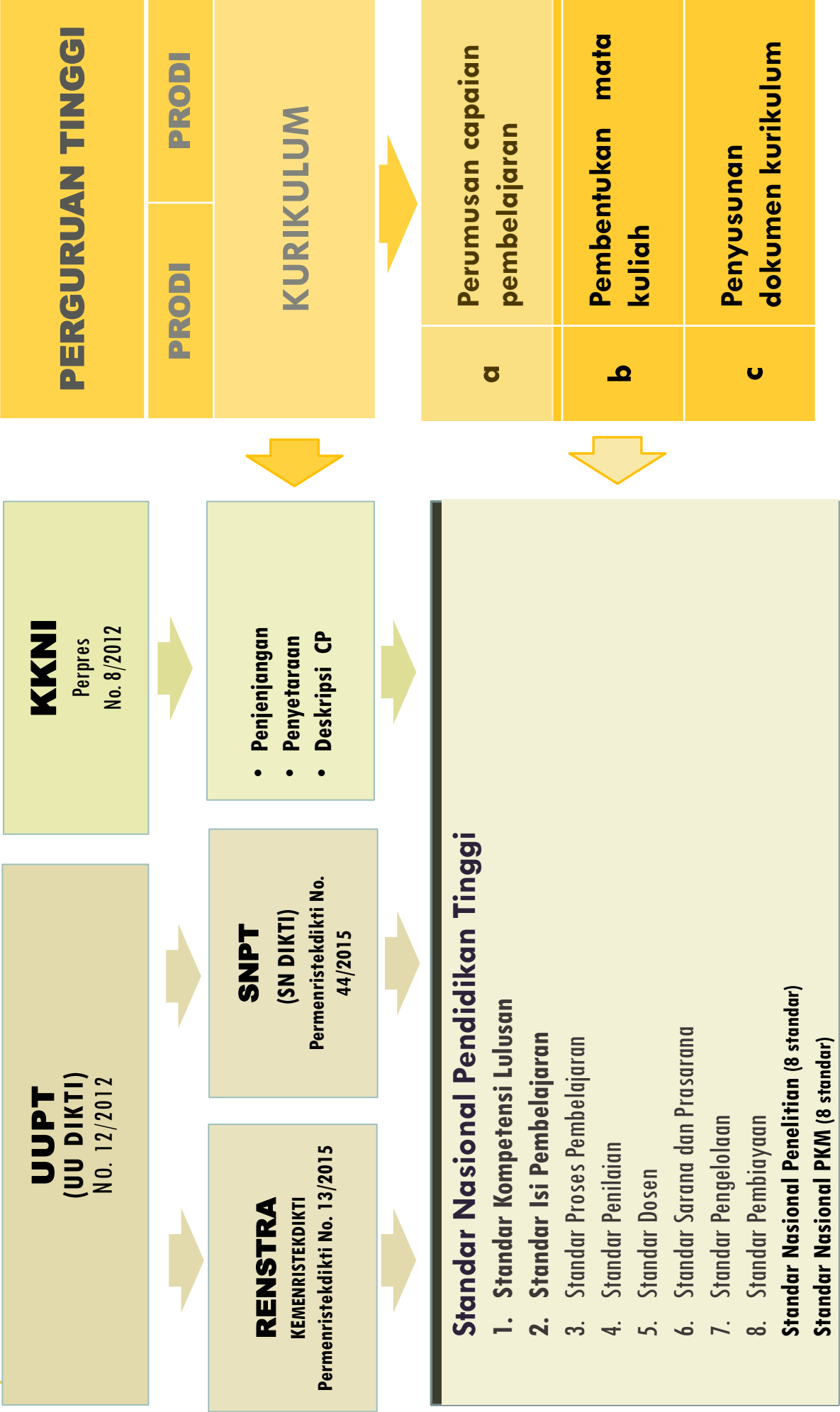
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
DIREKTORAT PEMBELAJARAN



PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI



ATURAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN DALAM
MENYUSUN DAN MENGEMBANGKAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI



DOKUMEN KURIKULUM

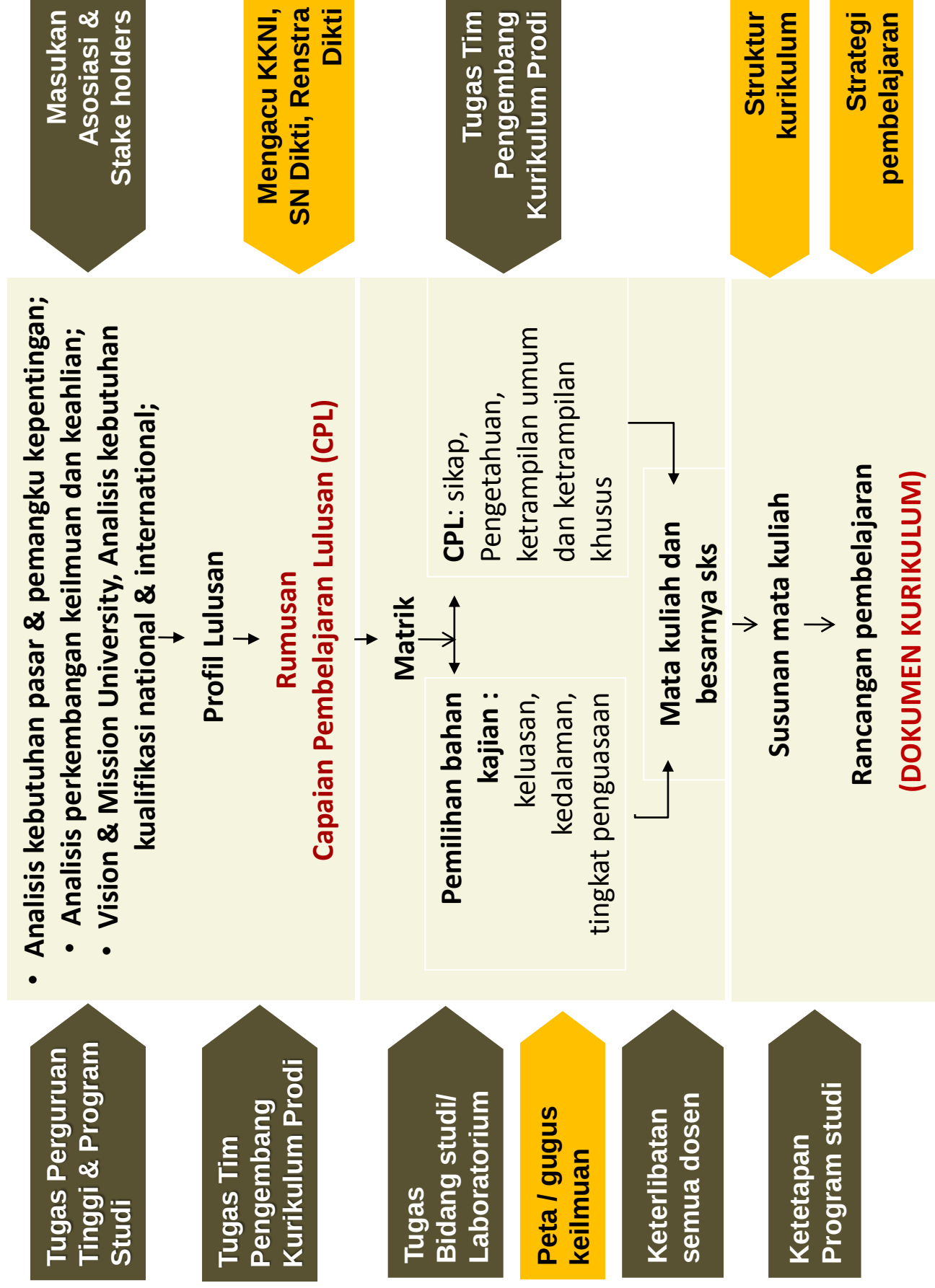
- I. **Identitas Program Studi** - Menuliskan identitas Program Studi meliputi : Nama PT, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.
- II. **Kondisi pelaksanaan kurikulum saat ini** – Menjelaskan pelaksanaan kurikulum saat sebelum dilakukan pengembangan kurikulum, evaluasi kurikulum, dan hal-hal penting yang menjadi landasan pengembangan kurikulum.
- III. **Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang dinyatakan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** – CPL terdiri dari aspek: Sikap, Ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan Pengetahuan yang dirumuskan berdasarkan SN-Dikti dan Diskriptor KKNl sesuai dengan jenjang nya.
- IV. **Penentuan Bahan Kajian** - Menggambarkan Body of Knowledge suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk menetapkan bahan kajian.
- V. **Pembentukan Mata Kuliah dan penentuan bobot sks** - Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah dan perhitungan bobot sks nya.
- VI. **Distribusi mata kuliah tiap semester** - Menggambarkan peta penempatan mata kuliah secara logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.
- VII. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** – dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi.

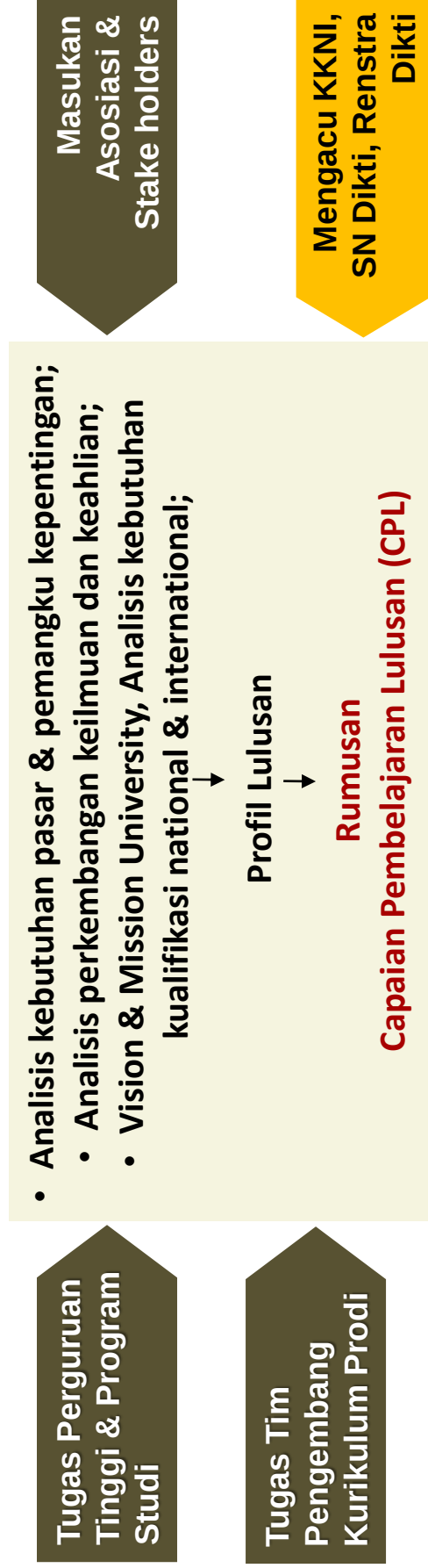
TAHAP PENYUSUNAN KURIKULUM

PENDIDIKAN TINGGI



TAHAPAN PERANCANGAN KURIKULUM





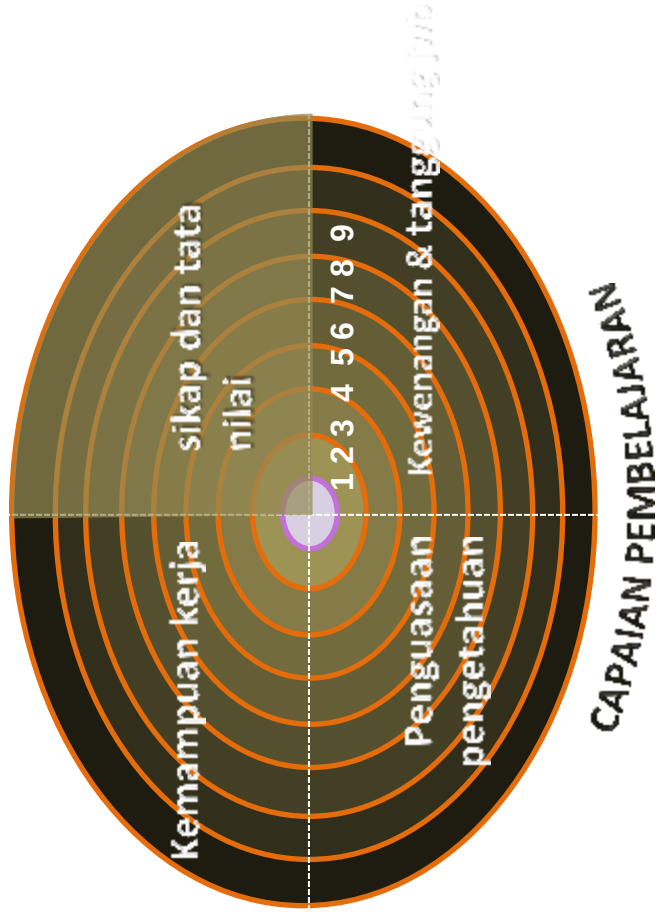
Tabel-1: Penetapan Profil Lulusan & Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

No	Profil	Deskripsi Profil *) Jika diperlukan	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)
	Peran yang dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya.	Penjelasan tentang profil	SIKAP
			Diambil dari SN-Dikti, dan dapat ditambah
			KETRAMPILAN UMUM
			Diambil dari SN-Dikti, dan dapat ditambah
			KETRAMPILAN KHUSUS
			Dirumuskan berdasarkan diskriptor KKNl
			PENGETAHUAN
			Dirumuskan berdasarkan diskriptor KKNl

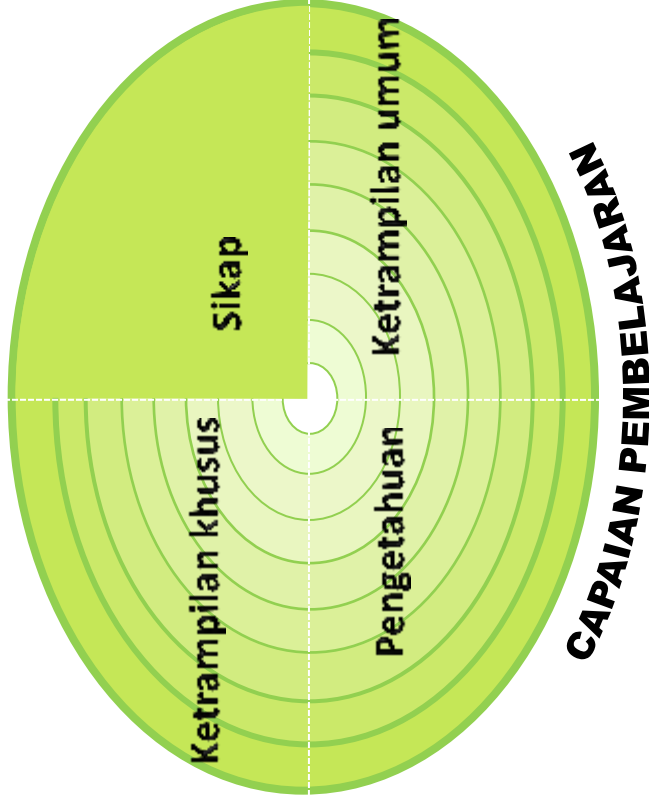
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan **capaian pembelajaran** lulusan

DESKRIPSI CAPAIAN PEMBELAJARAN

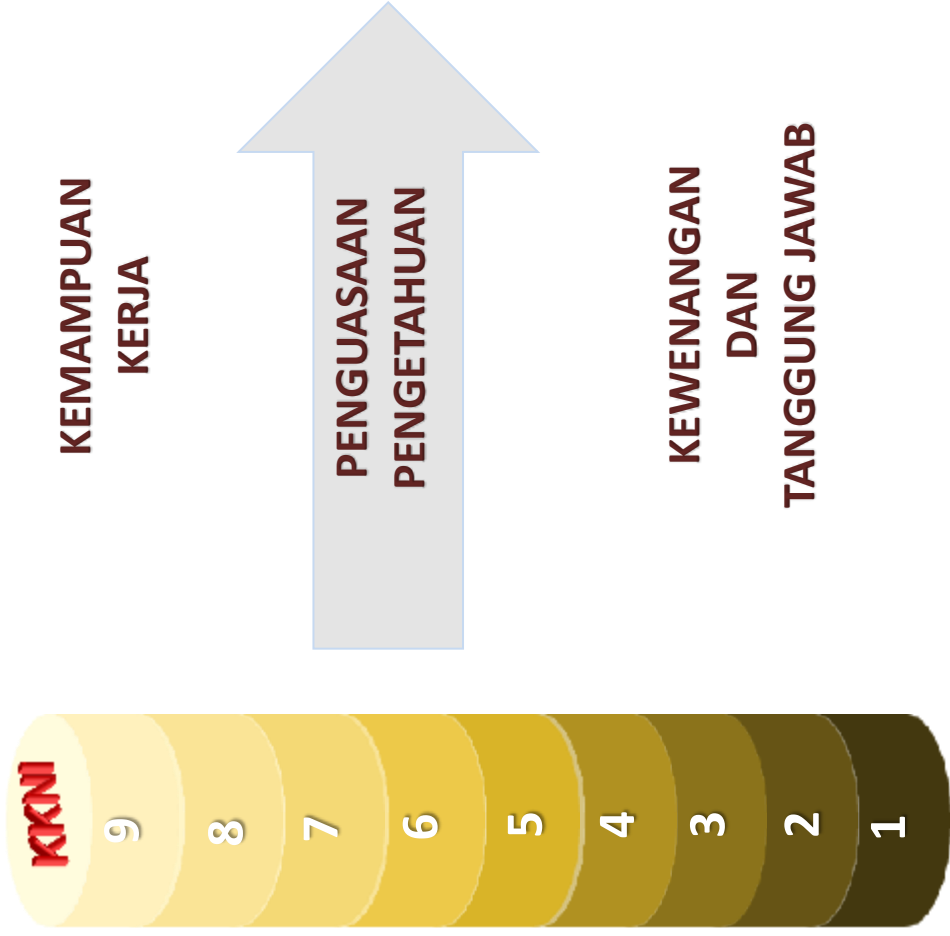


Dalam KKNI



Dalam SN DIKTI

**b. PENYETARAAN MUTU LULUSAN LEWAT
DESKRIPSI KKNI**



DESKRIPSI LEVEL 6
(setara dengan lulusan S1)

- Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.
- Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

**b. PENYETARAAN MUTU LULUSAN LEWAT
DESKRIPSI KKNI**



**KEMAMPUAN
KERJA**

**PENGUASAAN
PENGETAHUAN**

**KEWENANGAN
DAN
TANGGUNG JAWAB**

DESKRIPSI LEVEL 5
(setara dengan lulusan D-3)

Mampu menyelesaikan **pekerjaan** berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari **beragam pilihan** yang sudah maupun belum baku dengan **menganalisis data**, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian **masalah prosedural**.

Mampu **mengelola kelompok kerja** dan **menyusun laporan tertulis** secara **komprehensif**.
Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

LEVEL 5

(setara dgn lulusan D3)

Mampu menyelesaikan **pekerjaan** berlingkup luas, memilih metode yang sesuai dari **beragam pilihan** yang sudah maupun belum baku dengan **menganalisis data**, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur.

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta mampu memformulasikan penyelesaian **masalah prosedural**.

Mampu **mengelola kelompok kerja** dan **menyusun laporan tertulis** secara **komprehensif**.

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok.

LEVEL 6

(setara dgn lulusan S1)

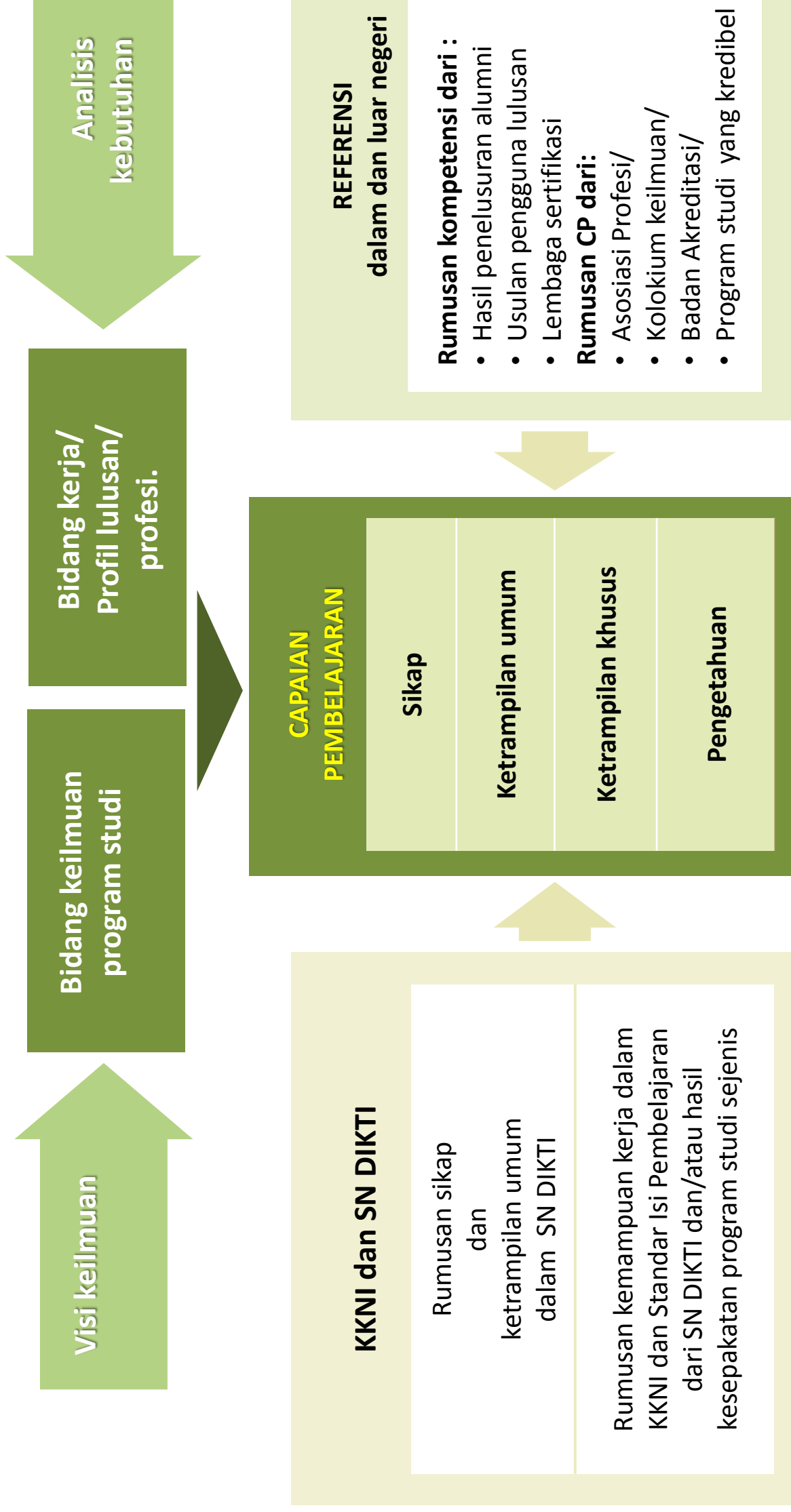
Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Skema penyusunan capaian pembelajaran lulusan program studi



PARMETER CP	
SIKAP	Unsur sikap harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur sikap yang ditetapkan di dalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur sikap dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri perguruan tinggi pada lulusan atau bagi program studi yang lulusannya membutuhkan sikap-sikap khusus untuk menjalankan profesi tertentu.
KETERAMPILAN UMUM	Unsur keterampilan umum harus mengandung makna yang sesuai dengan rincian unsur ketrampilan umum yang ditetapkan di dalam SN DIKTI. Penambahan pada unsur keterampilan dimungkinkan bagi program studi untuk menambahkan ciri lulusan.
KETERAMPILAN KHUSUS	Unsur keterampilan khusus harus menunjukkan kemampuan kerja di bidang yang terkait program studi, metode atau cara yang digunakan dalam kerja tersebut, dan tingkat mutu yang dapat dicapai, serta kondisi/proses dalam mencapai hasil tersebut. Lingkup dan tingkat keterampilan harus memiliki kesetaraan dengan lingkup dan tingkat kemampuan kerja yang tercantum di dalam deskripsi CP KKNl menurut jenis dan jenjang pendidikan. Jumlah dan macam keterampilan khusus ini dapat dijadikan tolok ukur kemampuan minimal lulusan dari suatu jenis program studi yang disepakati.
PENGETAHUAN	Unsur pengetahuan harus menunjukkan dengan jelas bidang/cabang ilmu atau gugus pengetahuan atau keahlian yang menggambarkan kekhususan program studi, dengan menyatakan tingkat penguasaan, keluasan, dan kedalaman pengetahuan yang harus dikuasai lulusannya. Hasil rumusan pengetahuan harus memiliki kesetaraan dengan Standar Isi Pembelajaran dalam SN DIKTI. Dalam pemetaan atau penggambaran bidang keilmuan tersebut dapat menggunakan referensi rumpun ilmu atau bidang keahlian yang telah ada atau kelompok bidang keilmuan/pengetahuan yang dibangun oleh program studi sejenis.

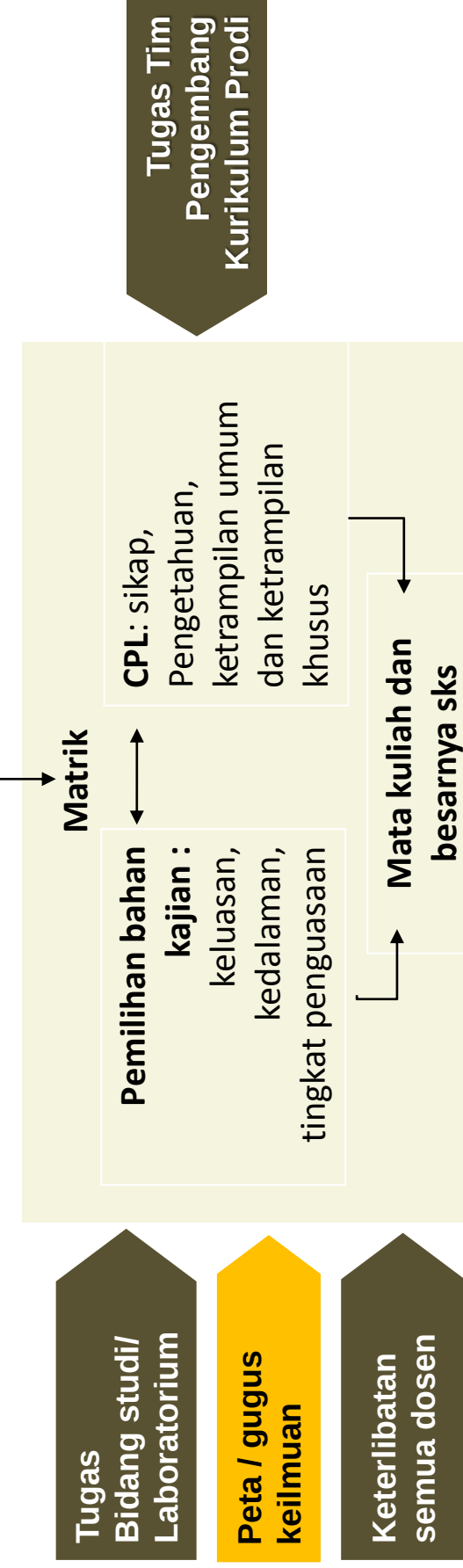
Kata kunci untuk rumusan ketrampilan khusus

LEVEL KUALIFIKASI	KATA KUNCI KEMAMPUAN KERJA DALAM KKNI	KESETARAAN PROGRAM
9	Melakukan pendalaman dan perluasan IPTEKS baru melalui riset, menyelesaikan masalah dengan pendekatan multi atau transdisiplin	Doktor
8	Mengembangkan IPTEKS melalui riset, inovasi dan teruji, menyelesaikan masalah dengan pendekatan inter/multi disiplin	Magister
7	Mengelola sumber daya, mengevaluasi secara komprehensif untuk pengembangan strategis organisasi, menyelesaikan masalah dengan pendekatan monodisiplin.	Profesi
6	Mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan IPTEKS dalam menyelesaikan masalah prosedural.	Sarjana
5	Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih berbagai metode, memformulasi penyelesaian masalah prosedural.	Diploma 3
4	Menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik, memilih metode baku, menyelaraskan masalah faktual	Diploma 2
3	Melaksanakan serangkaian tugas spesifik, menyelesaikan masalah yang lazim.	Diploma 1



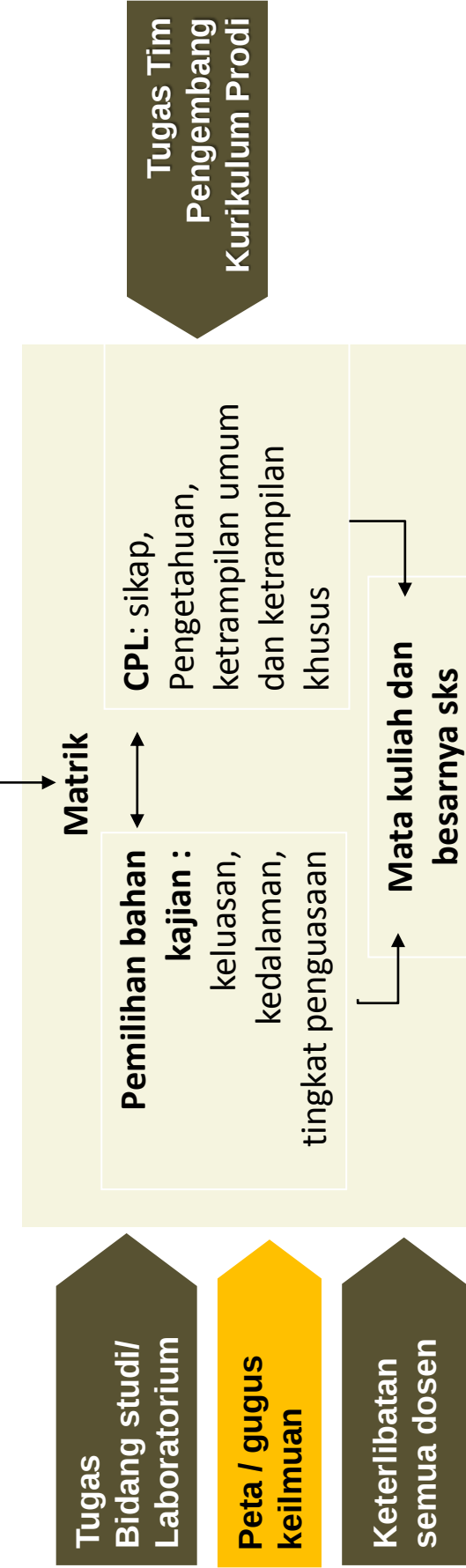
Tingkat penguasaan pengetahuan sesuai Standar Isi Pembelajaran

PROGRAM	PENGUASAAN PENGETAHUAN	LEVEL KUALIFIKASI
Doktor/Doktor - Terapan/ Spesialis II	menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	9
Magister/Magister Terapan/Spesial I	menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu	8
Profesi	menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu	7
Sarjana/ Sarjana Terapan	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam	6
Diploma 3	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum	5
Diploma 2	menguasai prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada bidang keahlian tertentu	4
Diploma 1	menguasai konsep umum, pengetahuan, dan keterampilan operasional lengkap;	3
Catatan : Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif		



Tabel-2: Kaitan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Bahan Kajian

No	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Bahan Kajian
	SIKAP	- Bahan kajian ini dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu berserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. - Bahan kajian terkait dengan kemampuan yang terkandung dalam CPL.
	Diambil dari SN-Dikti, dan dapat ditambah	
	KETRAMPILAN UMUM	
	Diambil dari SN-Dikti, dan dapat ditambah	
	KETRAMPILAN KHUSUS	
	Dirumuskan berdasarkan diskriptor KKNI	
	PENGETAHUAN	
	Dirumuskan berdasarkan diskriptor KKNI	



Tabel-3: Matrik Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan Bahan Kajian

No	Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)	Bahan Kajian (BK)						
		BK1	BK2	BK3	BK4	BK5	BK6	BK7
	SIKAP							
	Diambil dari SN-Dikti, dan dapat ditambah							
	KETRAMPILAN UMUM							
	Diambil dari SN-Dikti, dan dapat ditambah							
	KETRAMPILAN KHUSUS							
	Dirumuskan berdasarkan diskriptor KKNI							
	PENGETAHUAN							
	Dirumuskan berdasarkan diskriptor KKNI							

MATA KULIAH –
MATA KULIAH

Contoh Matriks Untuk Evaluasi Kurikulum



SIKAP

KETRAMPILAN UMUM

KETRAMPILAN KHUSUS

PENGETAHUAN

EVALUASI KURIKULUM

[illegible]

Dikaji apakah mata kuliah yang ada sudah terkait dengan capaian pembelajaran lulusan

Contoh Matriks Evaluasi Mata Kuliah Kurikulum Lama

Control



- SIKAP**
 - Etika akademik
 - Menereapkan etika profesi
- KETRAMPILAN UMUM**
 - Mampu menyusun skripsi
 - Mampu mengambil keputusan
- KETRAMPILAN KHUSUS**
 - Mampu merancang _____
 - Mampu melaksanakan _____
- PENGETAHUAN**
 - Menguasai konsep ilmu komunikasi
 - Menguasai prinsip lingkungan

EVALUASI KURIKULUM

MATA KULIAH PADA KURIKULUM SAAT INI

SEMESTER II				SEMESTER VIII				
Agama	Parasila	B. Indonesia	Kewarganegaraan	Teori sunel	Komunikasi	Praktek Pro	Etika Profsi	SKRIPSI
✓	✓	✓	✓	✗ Bisa dihapus	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓
Materi ajar (v)				Tidak ada korelasi				

Tabel-4: Daftar Mata Kuliah, Capaian Pembelajaran Lulusan dan Bahan Kajian

No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	CPL yg dibebankan pd MK	Bahan Kajian (BK): Materi Pembelajaran
1				
2	TF1471	Pengantar TIK	SIKAP: 1. menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; KETRAMPILAN UMUM: 2. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur KETRAMPILAN KHUSUS: 3. Mampu berkomunikasi secara efektif; 4. Mampu menggunakan teknik, keterampilan, dan peralatan ilmiah dan teknis modern yang diperlukan untuk praktek profesional; PENGETAHUAN: 5. Mampu mengintegrasikan bidang keilmuan Teknik Fisika berbasis TIK; 6. Menguasai pengetahuan tentang isu-isu masa kini, dan berfikir kreatif dan inovatif;	Bahan Kajian: • Ilmu dasar Teknik Fisika • Dasar2 Ilmu TIK Materi Pembelajaran: • Arsitektur Komputer • Ilmu Jaringan Komputer • Komunikasi Data • Aplikasi TIK dalam bidang Teknik Fisika
3				
4				
5				
...				

Rincian Waktu 1 sks Kegiatan Pembelajaran

(Permenristekdikti No.44 Tahun 2015: pasal 17)

Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran				Jam
a	Kuliah, Responsi, Tutorial			
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajara Mandiri	
	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	2,83
b	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis			
	Tatap muka	Belajar mandiri		
	100 menit/minggu/semester	70 menit/minggu/semester		2,83
c	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara			
	170 menit/minggu/semester			2,83

Pasal 15:

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- (2) Satu sks setara dengan 170 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester (setara dg 2,83 jam, atau **dibulatkan 3 jam**)
- (3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
- (4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.

MATRIK ORGANISASI MATA KULIAH – STRUKTUR KURIKULUM

KELOMPOK MATA KULIAH PRODI S1/D4									
Smt	sks	Jlm MK	MK-Wajib				Mk-Pilihan	MKWU	
VIII	10	3	MK8a (2sks)	TA (6sks)	MK8a (2sks)				
VII	18	5	MK7ua (3sks)	MK7uc (4sks)	MK7ub (4sks)	MK7ud (3sks)			Pend. Agama (2sks)
VI	20	5	MK6ua (4sks)	MK6uc (4sks)	MK6ub (4sks)	MK6ud (6sks)	MK6ue (2sks)		
V	20	5	MK5ua (4sks)	MK5uc (4sks)	MK5ub (4sks)			MK5ud (4sks)	Bhs. Indonesia (2sks)
IV	20	6	MK4ua (3sks)	MK4uc (5sks)	MK4ub (3sks)	MK4ud (3sks)	MK4uf (2 sks)	MK4ue (4sks)	
III	20	5	MK3ua (4sks)	MK3uc (4sks)	MK3ub (4sks)	MK3ud (6sks)	MK3ue (2sks)		
II	18	5	MK2ua (4sks)	MK2uc (4sks)	MK2ub (4sks)	MK2ud (4sks)			Pend. Kewarganegaraan (2sks)
I	18	6	MK1ua (4sks)	MK1uc (4sks)	MK1ub (4sks)	MK1ud (2sks)	MK1ue (2sks)		Pancasila (2sks)
	144	40							

Download

Tabel-6: Daftar Mata Kuliah Program Studi

SEMESTER II			
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks
1			
2	TF1471	Pengantar TIK	3
3	TF1475	Matematika Rekayasa	4
4			
5			



SEMESTER V			
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks
1			
2	TF1478	Dinamika Sistem	3
3	TF1480	Sistem Pengendalian Otomatis	4
4			





RANCANGAN PEMBALAJARAN

MATA KULIAH



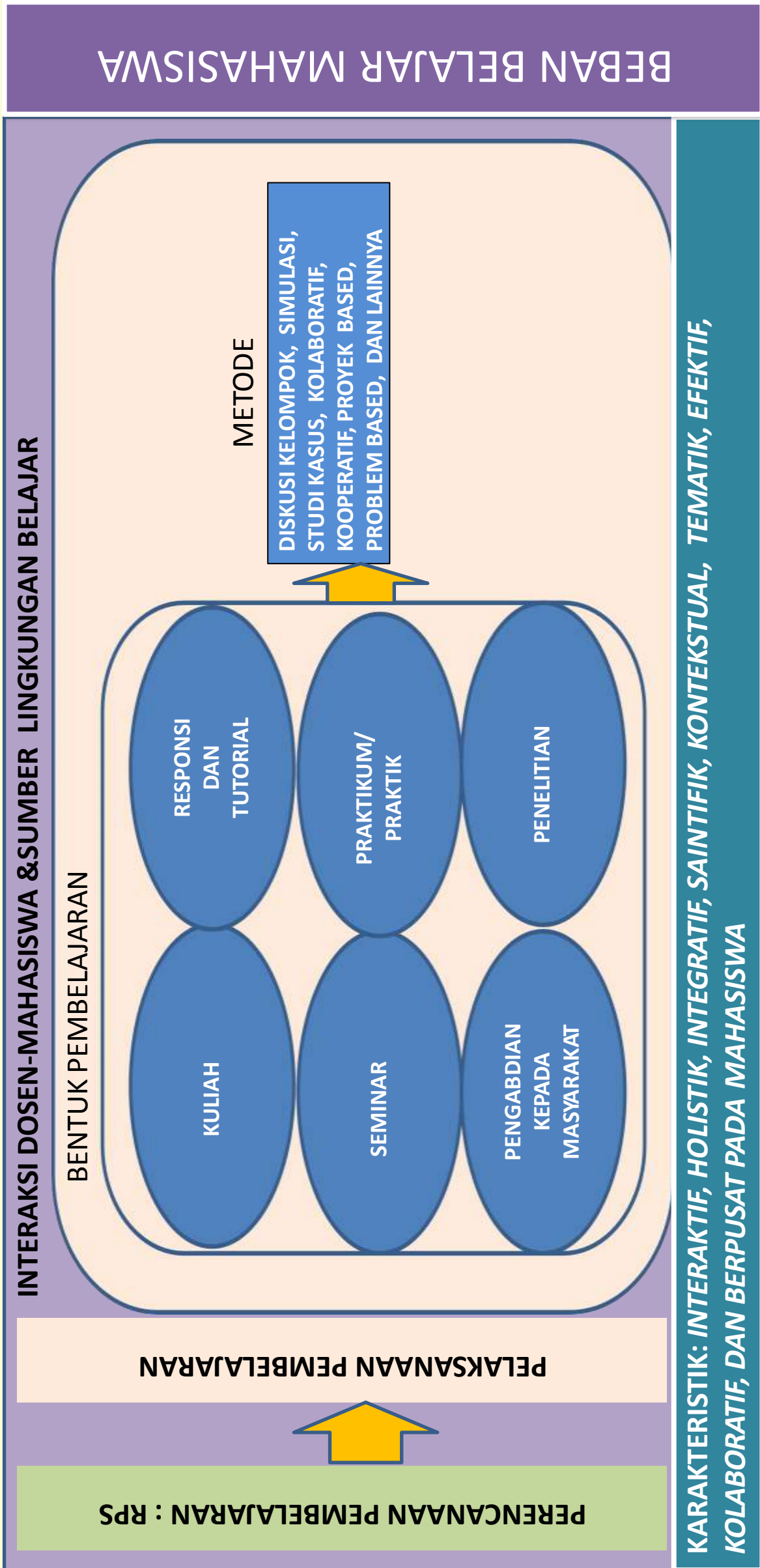
PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 44 TAHUN 2015 STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI

Bagian Keempat Standar Proses Pembelajaran

Pasal 12

- (1) Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam **rencana pembelajaran semester (RPS)** atau **istilah lain**.
- (2) RPS atau istilah lain **ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok** keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (3) RPS **paling sedikit** memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) RPS **wajib ditinjau dan disesuaikan** dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (5) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler **wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif** sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;

3. STANDAR PROSES PEMBELAJARAN



RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata kuliah : Kode : Semester : sks :
Jurusan :
Dosen pengampu :
Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini :
• (bisa dilampirkan)
•

(1) minggu ke	(2) Kemampuan akhir yang direncanakan	(3) Bahan kajian	(4) Bentuk pembela jaran	(5) Waktu	(6) Pengalaman belajar mahasiswa	(7) Kriteria penilaian dan indikator	(8) Bobot nilai

Daftar Referensi :

NOMOR KOLOM	JUDUL KOLOM	PENJELASAN ISIAN
1	MINGGU KE	Menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (satu semester) (bisa 1/2/3/4 mingguan).
2	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIRENCANAKAN	Rumusan kemampuan dibidang kognitif, psikomotorik, dan afektif diusahakan lengkap dan utuh (hard skills & soft skills). Tingkat kemampuan harus menggambarkan level CP lulusan prodi, dan dapat mengacu pada konsep dari Anderson (*). Kemampuan yang dirumuskan di setiap tahap harus mengacu dan sejalan dengan CP, serta secara kumulatif diharapkan dapat memenuhi CP yang dibebankan pada mata kuliah ini diakhir semester.
3	BAHAN KAJIAN (materi ajar)	Bisa diisi pokok bahasan /sub pokok bahasan, atau topik bahasan. (dengan asumsi tersedia diktat/ modul ajar untuk setiap pokok bahasan) atau intergrasi bahan kajian, atau isi dari modul.
4	METODE PEMBELAJARAN	Dapat berupa : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain,atau gabungan berbagai bentuk. Pemilihan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa dengan metode pembelajaran yang dipilih mahasiswa mencapai kemampuan yang diharapkan.
5	WAKTU	Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
6	PENGALAMAN BELAJAR	Kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah ditetapkan (tugas, suvai, menyusun paper, melakukan praktek, studi banding, dsb)
7	KRITERIA PENILAIAN dan indikator	Kriteria Penilaian berdasarkan Penilaian Acuan Patokan mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Indikator dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang dicanangkan, atau unsur kemampuan yang dinilai (bisa kualitatif misal ketepatan analisis, kerapian sajian, Kreatifitas ide, kemampuan komunikasi, juga bisa juga yang kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas, kebenaran hitungan).
8	BOBOT NILAI	Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap pencapaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini.
REFERENSI		Daftar referensi yang digunakan dapat dituliskan pada lembar lain

RANCANGAN TUGAS

MATA KULIAH :
SEMESTER : sks :
MINGGU KE : Tugas ke :

1. TUJUAN TUGAS :
2. URAIAN TUGAS :
- a. Obyek garapan :
 - b. Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan :
 - c. Metode/cara pengerjaan, acuan yang digunakan :
 - d. Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/ dikerjakan :
3. KRITERIA PENILAIAN :
- a. %
 - b. %
 - c. %

PENJELASAN FORMAT TUGAS :

1. **TUJUAN TUGAS :** adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa bila ia berhasil mengerjakan tugas ini (hard skill dan soft skill)
2. **URAIAN TUGAS :**
 - a. **Obyek garapan :** berisi deskripsi obyek material yang akan distudi dalam tugas ini (misal tentang penyakit kulit/ manajemen RS/ narkoba/ bayi/ perawatan darurat/ dll)
 - b. **Yang harus dikerjakan dan batasan-batasan :** uraian besaran, tingkat kerumitan, dan keluasan masalah dari obyek material yang harus distudi, tingkat ketajaman dan kedalaman studi yang distandarkan. (misal tentang perawatan bayiprematur, distudi tentang hal yang perlu diperhatikan, syarat-syarat yang harus dipenuhi - kecermatan, kecepatan, kebenaran prosedur ,dll) Bisa juga ditetapkan hasilnya harus dipresentasi di forum diskusi/ seminar.
 - c. **Metode/ cara pengerjaan tugas :** berupa petunjuk tentang teori /teknik / alat yang sebaiknya digunakan, alternatif langkah-langkah yang bisa ditempuh, data dan buku acuan yang wajib dan yang disarankan untuk digunakan, ketentuan dikerjakan secara kelompok/ individual.
 - d. **Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan :** adalah uraian tentang bentuk hasil studi/ kinerja yang harus ditunjukkan/disajikan (misal hasil studi tersaji dalam paper minimum 20 halaman termasuk skema, tabel dan gambar, dengan ukuran kertas kuarto, diketik dengan type dan besaran huruf yang tertentu, dan mungkin dilengkapi sajian dalam bentuk CD dengan format powerpoint).
3. **KRITERIA PENILAIAN :**
berisi butir-butir indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi yang telah dirumuskan.



PENILAIAN & EVALUASI

PROSES & HASIL PEMBELAJARAN



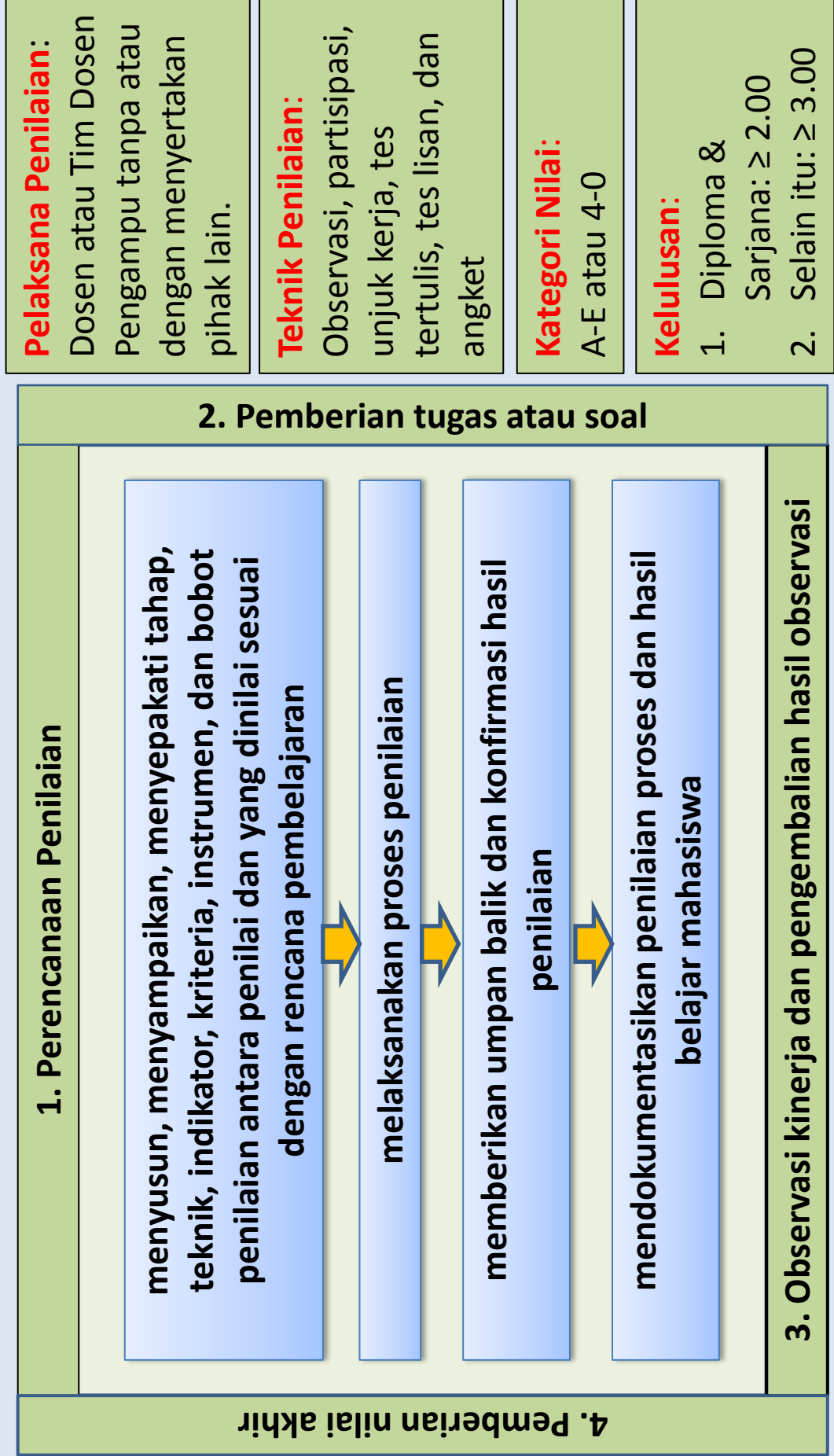
Assessment & Evaluation

Assessment (Penilaian) – Assessment is one or more processes that identify, collect, and prepare data to evaluate the attainment of student outcomes and program educational objectives. Effective assessment uses relevant direct, indirect, quantitative and qualitative measures as appropriate to the outcome or objective being measured. Appropriate sampling methods may be used as part of an assessment process.

Evaluation (Evaluasi) – Evaluation is one or more processes for interpreting the data and evidence accumulated through assessment processes. Evaluation determines the extent to which student outcomes and program educational objectives are being attained. Evaluation results in decisions and actions regarding program improvement.

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN sesuai SN-DIKTI

Prinsip: Edukatif, Obyektif, Akuntabel, Transparan, dan Terintegrasi



Penilaian Pembelajaran

Bentuk Tes:

Ujian tulis: kuis, esai, pilihan ganda, uts, uas, dll.

Bentuk non-Tes:

Ujian lisan, wawancara, makalah, presentasi, bermain peran, review jurnal, dll.

Instrumen non-Tes:

Rubrik: Rubrik Holistik, Rubrik Analitik (Diskriptif dan Skala Persepsi)

Portofolio: Portofolio perkembangan, Portofolio pameran/showcase, dan Portofolio korehensif

Rubrik

Rubrik merupakan **panduan penilaian** yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa.

Contoh 3 macam rubrik, yakni:

1. **Rubrik holistik** adalah pedoman untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria.
2. **Rubrik deskriptif** memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian.
3. **Rubrik skala persepsi** memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

Teknik dan Instrumen Penilaian

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi	1. Rubrik untuk penilaian proses dan / atau 2. Portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil
Ketrampilan Umum	observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	
Ketrampilan Khusus		
Penguasaan Pengetahuan		

Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

PERFORMANCE ASSESSMENT (ASESMEN KINERJA)



Deskripsi tentang apa yang harus dikerjakan oleh mahasiswa, termasuk batasan, dan metodenya.



Kriteria penilaian (RUBRIK)

Untuk menunjukkan posisi ketercapaian pembelajaran dari setiap mahasiswa

Contoh Rubrik Deskriptif untuk Penilaian Presentasi Makalah

DEMENSI	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
	Skor ≥ 81	(61-80)	(41-60)	(21-40)	<20
Organisasi	terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep	terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan-kesimpulan.	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan-kesimpulan.	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan.
Isi	Isi mampu menggugah pendengar untuk mengembangkan pikiran.	Isi akurat dan lengkap. Para pendengar menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. Para pendengar bisa mempelajari beberapa fakta yang tersirat, tetapi mereka tidak menambah wawasan baru tentang topik tersebut.	Isinya kurang akurat, karena tidak ada data faktual, tidak menambah pemahaman pendengar	Isinya tidak akurat atau terlalu umum. Pendengar tidak belajar apapun atau kadang menyesatkan.
Gaya Presentasi	Berbicara dengan semangat, menularkan semangat dan antusiasme pada pendengar	Pembicara tenang dan menggunakan intonasi yang tepat, berbicara tanpa bergantung pada catatan, dan berinteraksi secara intensif dengan pendengar. Pembicara selalu kontak mata dengan pendengar.	Secara umum pembicara tenang, tetapi dengan nada yang datar dan cukup sering bergantung pada catatan. Kadang-kadang kontak mata dengan pendengar diabaikan.	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton	Pembicara cemas dan tidak nyaman, dan membaca berbagai catatan daripada berbicara. Pendengar sering diabaikan. Tidak terjadi kontak mata karena pembicara lebih banyak melihat ke papan tulis atau layar.

Contoh Format Penilaian dengan Rubrik Holistik

DEMENSI	Sangat Baik	Baik	Cukup	BOBOT	Nilai total
Skor	81-100	71-80	61-70		
Penguasaan Materi	deskripsi			30%	
Ketepatan menyelesaikan masalah	deskripsi			30%	
Kemampuan Komunikasi	deskripsi			20%	
Kemampuan menghadapi Pertanyaan	deskripsi			10%	
Kelengkapan alat peraga dalam presentasi	deskripsi			10%	
NILAI AKHIR				100%	

Beberapa manfaat penilaian menggunakan rubrik :

- Rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas;
- Rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan mahasiswa;
- Rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif;
- Mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk mengukur capaian kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya;
- Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat;
- Rubrik dapat digunakan sebagai instrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung;
- Sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar mahasiswa.

Portofolio

Penilaian **portofolio** merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran.

3 macam penilaian portofolio:

1. **Portofolio perkembangan**, berisi koleksi hasil karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani.
2. **Portofolio pameran/showcase** berisi hasil karya mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya.
3. **Portofolio komprehensif**, berisi seluruh hasil karya mahasiswa selama proses pembelajaran.



TERIMA KASIH

ATAS PERHATIAN & KERJA SAMA NYA



LAMPIRAN 6

**CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN
KURKULUM INTI NASIONAL PROGRAM
STUDI ILMU PEMERINTAHAN
UNTUK JENJANG SARJANA (STRATA
SATU/S1) HASIL RUMUSAN KESATUAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
INDONESIA (KAPSIPI)**

**CAPAIAN PEMBELAJARAN DAN KURKULUM INTI NASIONAL
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN UNTUK JENJANG SARJANA (STRATA SATU/S1)
HASIL RUMUSAN KESATUAN PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN INDONESIA (KAPSIPI)**

A. Profil Lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan

1. Mengaplikasikan ilmunya sebagai pegawai pada lembaga pemerintahan baik Pusat maupun Daerah
2. Mengaplikasikan ilmunya sebagai pegawai pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan Perusahaan Sektor Publik lainnya
3. Mengaplikasikan ilmunya sebagai konsultan profesional bidang pemerintahan
4. Mengaplikasikan ilmunya sebagai analis profesional bidang pemerintahan
5. Mengaplikasikan ilmunya sebagai pendidik/peneliti bidang pemerintahan
6. Mengaplikasikan ilmunya sebagai penggerak pada organisasi sosial/LSM yang profesional

**B. Parameter Capaian Pembelajaran Sikap Umum Sarjana Ilmu Pemerintahan
(Berdasarkan Lampiran Permendiknas No. 49 Tahun 2014)**

Setiap lulusan program pendidikan sarjana Ilmu Pemerintahan harus memiliki sikap sebagai berikut:

1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;
2. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;
4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;
5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;

6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.

**C. Parameter Capaian Pembelajaran Keterampilan Umum Sarjana Ilmu Pemerintahan
(Berdasarkan Lampiran Permendiknas No. 49 Tahun 2014)**

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya;
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur;
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni;
4. Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;
5. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data;
6. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya.
7. Mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;
8. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;

9. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi;

D. Capaian Pembelajaran Keterampilan Khusus Sarjana Ilmu Pemerintahan

Deskripsi Generik:

Mampu mengaplikasikan bidang keahlian pemerintahan, mengkaji masalah-masalah pemerintahan dan memanfaatkan IPTEKS pada bidang pemerintahan dalam menyelesaikan masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi .

Rincian capaian pembelajaran keterampilan khusus sebagai berikut:

1. Mampu memimpin dan mengelola kelompok atau organisasi;
2. Mampu dan tampil melayani masyarakat melalui sistem dan prosedur baku;
3. Mampu melakukan pemetaan masalah dan potensi masyarakat kemudian menyusun perencanaan program berbasis kebutuhan/kepentingan masyarakat
4. Mampu menganalisis masalah-masalah kebijakan dan menyusun pemetaan menjadi agenda kebijakan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah;
5. Mampu berbicara di depan publik dan meyakinkan publik dalam program/kegiatan pemerintahan;
6. Mampu berdiplomasi dalam sebuah proyek/program pemerintah yang memerlukan dukungan dari pihak lain;
7. Mampu dan tampil mengambil keputusan menyangkut penyelesaian masalah publik berdasarkan data dan informasi yang tepat dengan menggunakan metode ilmiah;
8. Mampu bekerjasama dan menjalin hubungan kerja (networking) dengan pihak terkait dengan program/kegiatan;
9. Mampu menggunakan Teknologi Informasi untuk penyelenggaraan pemerintahan dan bidang pekerjaan sektor publik;
10. Mampu mengendalikan diri dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mencapai penyelesaian suatu program/kegiatan;
11. Mampu mengaplikasikan IPTEKS yang relevan dalam pengembangan bidang pemerintahan;
12. Mampu menuangkan gagasan/ide bagi pengembangan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai media yang sesuai;
13. Mampu melakukan analisis kondisi nasional, regional dan global menyangkut masalah-masalah pemerintahan

14. Memiliki kepribadian yang berintegritas bagi pencapaian tujuan bangsa dan negara Indonesia;
15. Memiliki kepekaan terhadap berbagai masalah sosial dan lingkungan hidup;
16. Memiliki sikap dan perilaku bertanggungjawab atas profesi yang akan dijalani.

E. Capaian Pembelajaran Penguasaan Pengetahuan Sarjana Ilmu Pemerintahan

Deskripsi Generik:

Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan pemerintahan secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam.

1. Menguasai konsep dasar dan teori politik, negara, demokrasi dan pemerintahan;
2. Menguasai konsep dasar dan teori birokrasi pemerintahan dan sektor publik;
3. Menguasai konsep dasar dan teori pemerintahan dan sejarah perkembangan pemerintahan;
4. Menguasai konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan nasional;
5. Menguasai konsep teoritis penyelenggaraan pemerintahan daerah dan desa;
6. Menguasai konsep dan model dalam manajemen pemerintahan dan organisasi sektor publik;
7. Menguasai konsep teoritis sistem kelembagaan politik, pemilu dan keparlemen di Indonesia;
8. Menguasai konsep teoritis proses legislasi dan perundang-undangan baik di tingkat nasional maupun daerah;
9. Menguasai konsep teoritis kepemimpinan pemerintahan dan organisasi sektor publik;
10. Menguasai konsep teoritis hubungan masyarakat dan pemerintahan melalui fungsi-fungsi pemerintahan ;
11. Menguasai konsep teoritis pengambilan keputusan dalam mengatasi masalah-masalah publik;
12. Menguasai konsep teoritis dalam penelitian ilmiah dan pengembangan ilmu pemerintahan;
13. Menguasai konsep teoritis menyusun ide dan gagasan dalam sebuah karya tulis ilmiah bidang pemerintahan yang dipublikasikan;
14. Menguasai konsep teoritis hukum tata pemerintahan dan peranan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan;
15. Menguasai konsep teoritis komunikasi pemerintahan dan peranan media massa dalam pemerintahan;
16. Menguasai konsep teoritis partisipasi masyarakat, civil society, kelembagaan masyarakat dan pembangunan masyarakat;
17. Menguasai konsep teoritis pengawasan pemerintahan dan pengawasan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan;
18. Menguasai konsep teoritis pengelolaan keuangan negara/publik dan aset negara;
19. Menguasai konsep teoritis pengelolaan SDM pemerintahan;

20. Menguasai konsep teoritis tahapan dalam siklus kebijakan publik mulai dari perumusan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan;
21. Menguasai konsep teoritis pelayanan kepada masyarakat pada sektor publik (public service);
22. Menguasai konsep teoritis masyarakat dan keragaman masyarakat dan budaya Indonesia;
23. Menguasai konsep teoritis teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan;
24. Menguasai konsep teoritis perencanaan pembangunan dan kearifan lokal dalam pembangunan;
25. Menguasai konsep teoritis ekologi pemerintahan;
26. Menguasai konsep teoritis etika dalam pemerintahan;

F. Kurikulum Inti Nasional dan Bahan Kajian Ilmu Pemerintahan

No.	Nama Mata Kuliah	Jumlah SKS	Deskripsi	Capaian Pembelajaran	Rincian Bahan Kajian
1.	Dasar-Dasar Pemerintahan	3	Mata kuliah ini menguraikan dan menjelaskan tentang pemerintahan sebagai suatu gejala empiris dan hubungannya dengan kehidupan manusia, existensi ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu dan seni, pengertian objek dan ruang lingkup kajian ilmu pemerintahan, hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lain, bentuk dan sistem pemerintahan, metode dan pendekatan penelitian dan pengembangan ilmu pemerintahan	Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan menjelaskan tentang gejala-gejala pemerintahan, state of the art dari ilmu pemerintahan.	1. Munculnya masalah dan gejala pemerintahan 2. Hubungan pemerintahan dengan kehidupan manusia 3. Pemerintahan sebagai kebutuhan manusia 4. Existensi pemerintahan sebagai suatu gejala empiris 5. Munculnya ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu dan seni. 6. Pengertian, obyek dan ruang lingkup ilmu pemerintahan 7. Hubungan ilmu pemerintahan dengan ilmu lain, terutama dengan: sosiologi, politik, administrasi publik, hukum tata negara 8. Bentuk-bentuk dan sistem pemerintahan 9. Perkembangan dan pertumbuhan ilmu pemerintahan 10. Problematika dan penelitian pemerintahan

				11. Konsep dan teori pemerintahan 12. Metode dan pendekatan analisa dalam ilmu pemerintahan 13. Tantangan dan Masa Depan Ilmu Pemerintahan
2.	Etika Pemerintahan	3	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pemahaman, ketrampilan dan kapasitas mahasiswa dalam melakukan analisis dan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada etika.	Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pelbagai teori tentang etika dan penerapannya dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Good Governance. 1. Arti Penting Etika Pemerintahan 2. Teori dan Obyek Kajian Dalam Pemerintahan. 3. Efektivitas Etika Pemerintahan 4. Nilai-Nilai Budaya Lokal untuk Memperkuat Etika Pemerintahan 5. Kebijakan Anti Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 6. Kebijakan Anti Kolusi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 7. Kebijakan Anti Nepotisme Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 8. Strategi Penguatan Etika Pemerintahan 9. Tantangan-Tantangan Etika Pemerintahan 10. Masa Depan Etika Pemerintahan
3.	Tata Kelola Pemerintahan	3	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa dalam melakukan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan.	Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pelbagai teori dan konteks tata kelola pemerintahan dalam mewujudkan Good Governance. 1. Arti Penting Tata Kelola Pemerintahan 2. Sejarah Tata Kelola Pemerintahan 3. Teori Tata Kelola Pemerintahan 4. Aktor-Aktor Dalam Tata Kelola Pemerintahan 5. Aktor Publik Dalam Governance 6. Aktor Private Dalam Governance 7. Aktor Civil Society Dalam Governance

4.	Birokrasi Pemerintahan	3	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa dalam menjelaskan dan menganalisis birokrasi pemerintahan.	Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menjelaskan dan menerapkan pelbagai teori birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan	Governance 8. Relasi atau Media antara Aktor Publik, Privat dan Civil Society 9. Faktor-Faktor Pokok Yang Menentukan Tata Kelola Pemerintahan 10. Konteks dan Proses Dalam Tata Kelola Pemerintahan 11. Tantangan-Tantangan Dalam Tata Kelola Pemerintahan 12. Masa Depan Tata Kelola Pemerintahan
					1. Arti Penting Birokrasi dalam Pemerintahan 2. Sejarah Birokrasi dalam Pemerintahan 3. Teori dan Pendekatan dalam Studi Birokrasi Pemerintahan 4. Paradigma Lama Birokrasi Pemerintahan 5. Paradigma Baru Birokrasi Pemerintahan 6. NPM (New Public Management) Dalam Birokrasi Pemerintahan 7. NPS (New Public Service) Dalam Birokrasi Pemerintahan 8. Proses Birokrasi Pemerintahan 9. Patologi Birokrasi Pemerintahan 10. Efektivitas Birokrasi Pemerintahan 11. Tantangan-Tantangan Birokrasi Pemerintahan 12. Masa Depan Birokrasi Pemerintahan

5.	Pemerintahan Nasional	3	Mata kuliah ini menelaah dan menjelaskan tentang bentuk pemerintahan, tujuan dan fungsi pemerintahan, faktor lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan, demokrasi desentralisasi dan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan, lembaga dan birokrasi pemerintahan, hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, dibahas juga konsep reinventing government dan good governance.	Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan memahami dan mampu menjelaskan pemerintahan dengan berbagai problematikanya	1. Bentuk-bentuk pemerintahan dan sistem pemerintahan 2. Tujuan dan fungsi pemerintahan 3. Faktor lingkungan dalam penyelenggaraan pemerintahan 4. Demokrasi, desentralisasi dan otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan 5. Lembaga dan birokrasi pemerintahan nasional 6. Lembaga Legislatif (Parlemen: MPR, DPR, DPD), Eksekutif (Presiden dan Menteri-Menteri), Yudikatif (MK, MA, Pengadilan, dll) 7. Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah 8. Politik dan kebijakan pemerintahan 9. Reinventing government dan good governance 10. Tantangan dan Masa Depan Pemerintahan Nasional
6.	Pemerintahan Daerah	3	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa dalam melakukan analisis terhadap pemerintahan daerah.	Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pelbagai teori tentang pemerintahan daerah.	1. Arti Penting Studi Pemerintahan Daerah 2. Sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia. 3. Teori-Teori Dalam Pemerintahan Daerah 4. Teori Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Medebewind 5. Otonomi Daerah 6. Manajemen Pemerintahan Daerah (SDM, Keuangan,

7.	Pemerintahan Desa	3	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan tentang konsep, teori, pendekatan , dinamika perkembangan kebijakan dalam pemerintahan desa. Selain itu diberikan juga mengenai tipe, asas dalam pemerintahan, struktur kelembagaan, hubungan antar lembaga dalam pemerintahan desa, dan peranan pemerintah desa dan BPD serta keuangan desa, APBDes dan LKPJ Kepala Desa.	Setelah menempuh Mata Kuliah ini mahasiswa mengetahui, memahami dan mampu menganalisis konsep, teori, perkembangan serta penyelenggaraan pemerintahan desa dengan berbagai dinamika kelembagaan dan regulasi.	Infrastruktur dan Pelayanan) - Organisasi Pemerintahan Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) - Pemilihan Kepala Daerah - Partisipasi Masyarakat Dalam Pemerintahan Daerah - Tantangan-Tantangan Pemerintahan Daerah - Masa Depan Pemerintahan Daerah - Berbagai Konsep dan Teori Pemerintahan Desa - Sejarah Perkembangan Desa di Indonesia - Dinamika Perkembangan regulasi tentang Pemerintahan Desa - Tipe dan asas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa - Struktur kelembagaan dan fungsi Pemerintahan Desa - Hubungan Kelembagaan dalam Pemerintahan Desa - Pemerintah Desa sebagai pelaksana fungsi pemerintah (eksekutif di Desa) - Badan Permusyawaratan Desa (BPD) - Jenis dan dinamika dalam regulasi pada Pemerintahan Desa - Kuangan Pemerintahan Desa - Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
----	-------------------	---	---	--	--

				12. Pertanggungjawaban Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPJ Kepala Desa)
8.	Kepemimpinan Pemerintahan	3	Mata Kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan konsep dan teori serta keterampilan kepemimpinan pemerintahan yang ideal dan dapat dipraktikkan dalam penyelenggaraan pemerintahan baik nasional, daerah maupun desa.	Setelah matakuliah ini mahasiswa memiliki pengetahuan dan mampu memahami dan menganalisis kepemimpinan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta trampil dalam memimpin pada saat bekerja nanti. 1. Pentingnya studi kepemimpinan dalam Ilmu Pemerintahan 2. Konsep dan pengertian kepemimpinan pemerintahan 3. Teori dan pendekatan dalam studi kepemimpinan 4. Model-model kepemimpinan 5. Kepemimpinan dalam organisasi sektor publik 6. Gaya-gaya dalam kepemimpinan 7. Fungsi Kepemimpinan dalam Pemerintahan 8. Hubungan Pemimpin dan pengikut dalam pemerintahan 9. Efektivitas Kepemimpinan Pemerintahan 10. Kecakapan dan seni dalam kepemimpinan pemerintahan 11. Kepemimpinan Pemerintahan Indonesia 12. Kepemimpinan Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 13. Kepemimpinan Pemerintahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 14. Inovasi Kepemimpinan Pemerintahan 15. Tantangan dan Masa Depan Kepemimpinan Pemerintahan
9.	Studi Konstitusi	2	Mata kuliah ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan	Pada akhir mata kuliah, mahasiswa mampu 1. Tinjauan Umum Tentang Konstitusi.

			konstitusi dan konstiusionalisme termasuk di dalamnya UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia.	memahami berbagai pokok kajian yang termasuk dalam ruang konstiusionalisme lain, paham tentang konstitusi atau konstiusionalisme, konstitusi sebagai hukum dasar negara, sejarah perkembangan konstitusi, materi muatan, klasifikasi konstitusi, nilai konstitusi, daya ikat konstitusi, negara dan konstitusi, perbandingan konstitusi, prosedur serta sistem perubahan konstitusi, UUD 1945 beserta seluruh amandemennya sebagai konstitusi NKRI.	2. Konstiusionalisme. 3. Negara dan Konstitusi. 4. Daya Ikat Konstitusi. 5. Nilai Konstitusi. 6. Klasifikasi Konstitusi. 7. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi. 8. Kostitusi Negara Indonesia. 9. Amandemen UUD 1945. 10. Perbandingan Konstitusi. 11. Kelembagaan Negara dalam Konstitusi. 12. Hak Asasi Manusia dan Konstiusionalisme	
10.	Perbandingan Pemerintahan	3	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa dalam melakukan analisis dalam membandingkan pemerintahan.	Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pelbagai teori perbandingan pemerintahan dan menganalisisnya.	1. Arti Penting Perbandingan Pemerintahan 2. Teori Perbandingan Pemerintahan 3. Teori dan Praktik Globalisasi 4. Perbandingan Sistem Pemerintahan 5. Perbandingan Bentuk Organisasi dan Struktur Pemerintahan 6. Perbandingan Fungsi Pemerintahan 7. Pemerintahan di Negara-Negara Maju 8. Pemerintahan di Negara-Negara Berkembang 9. Jejaring Pemerintahan Global	

				10. Tantangan dan Masa Depan Pemerintahan Global	1. Ruang lingkup studi kebijakan sektor publik 2. Konsep dan berbagai teori kebijakan sektor publik 3. Berbagai pendekatan dalam studi kebijakan sektor publik 4. Isu Kebijakan dan Agenda Setting 5. Formulasi Kebijakan 6. Forecaasting: 7. Rekomendasi Kebijakan 8. Implementasi Kebijakan 9. Monitoring Kebijakan 10. Evaluasi Kebijakan 11. Tantangan dan Masa Depan Kebijakan Sektor Publik
11.	Kebijakan Sektor Publik	3	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan konsep, teori dan pendekatan serta ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa untuk melakukan analisis kebijakan khususnya kebijakan sektor publik yang mencakup aspek formulasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pendekatan yang digunakan bersifat multi disiplin / multi perspektif.	Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan menguasai konsep teori, pendekatan dan analisis kebijakan publik serta mampu menerapkan pelbagai teori analisis kebijakan dalam kegiatan praktis tata kelola pemerintahan.	1. Konsepsi Dasar Tata kelola Pelayanan sektor Publik 2. Pendekatan dan Dimensi / Level Dalam tata kelola pelayanan sektor public 3. Isu dalam Tata Kelola Pelayanan sektor Publik 4. Barang dan Jasa 5. Tata kelola Pelayanan Sektor Publik Dan sektor Privat 6. Kualitas Kinerja Pelayanan sektor Publik 7. Design peningkatan Kualitas Pelayanan sektor Publik 8. Privatisasi Dalam Tata kelola pelayanan sektor Publik 9. Inovasi Tata Kelola Pelayanan
12.	Pelayanan Sektor Publik	3	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa untuk melakukan memahami konsep dasar dan mengidentifikasi isu serta mengembangkan praktek tata kelola pelayanan sektor publik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Pendekatan yang digunakan bersifat multi disiplin / multi perspektif	Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dasar dan mengidentifikasi isu serta mengembangkan praktek tata kelola pelayanan sektor publik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik	1. Konsepsi Dasar Tata kelola Pelayanan sektor Publik 2. Pendekatan dan Dimensi / Level Dalam tata kelola pelayanan sektor public 3. Isu dalam Tata Kelola Pelayanan sektor Publik 4. Barang dan Jasa 5. Tata kelola Pelayanan Sektor Publik Dan sektor Privat 6. Kualitas Kinerja Pelayanan sektor Publik 7. Design peningkatan Kualitas Pelayanan sektor Publik 8. Privatisasi Dalam Tata kelola pelayanan sektor Publik 9. Inovasi Tata Kelola Pelayanan

					Sektor Publik: Penerapan electronic government (studi kasus e-procurement) 10. Kajian Normatif Kebijakan Tata Kelola Pelayanan Sektor Publik Di Indonesia 11. Tantangan dan Masa Depan Pelayanan Sektor Publik	
13.	Tata Kelola Pemerintahan	SDM	3	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan ketrampilan dan kapabilitas mahasiswa untuk melakukan praktek tata kelola SDM Pemerintahan yang mencakup fungsi, pengembangan pegawai serta teori penataan kepegawaian. Pendekatan yang digunakan bersifat multi disiplin / multi perspektif	Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menerapkan pelbagai teori tata kelola SDM Pemerintahan dalam kegiatan praktis, serta siap mengimplementasikan tata kelola SDM sesuai dengan standard yang berlaku..	1. Pengertian dan sejarah perkembangan konsep Tata Kelola SDM Pemerintahan 2. Teori-teori dalam Tata Kelola SDM Pemerintahan 3. Fungsi-fungsi Tata Kelola SDM Pemerintahan : Fungsi Pengadaan, Seleksi, Penempatan, Pengembangan SDM, Pemberhentian Kerja 4. Pengembangan SDM Aparatur Pemerintahan dan Pola Jenjang Karier PNS 5. Teori Penataan dan Evaluasi SDM Pemerintahan: Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Peta Jabatan, Evaluasi Jabatan, Pola Karir. 6. Disiplin PNS 7. Inovasi Dalam Tata Kelola SDM Pemerintahan 8. Tantangan dan Masa Depan Tata Kelola SDM Pemerintahan
14.	Tata Kelola Keuangan Pemerintahan		3	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan Pengetahuan serta ketrampilan dan kapabilitas	Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu mampu	1. Tata Kelola Keuangan Pemerintahan 2. Anggaran Publik

			mahasiswa untuk melakukan analisis tata kelola keuangan pemerintahan. Pendekatan yang digunakan bersifat multi disiplin / multi perspektif.	menyajikan dan menganalisis tata kelola keuangan pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah.	3. Pendekatan Penyusunan Anggaran 4. Medium Term Expenditure Framework (MTEF) 5. APBN 6. Penyusunan RAPBN 7. Keuangan Daerah 8. APBD 9. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD) 10. Penyusunan RKA SKPD 11. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah 12. Desentralisasi Fiskal 13. Inovasi Dalam Tata Kelola Keuangan Pemerintahan 14. Tantangan dan Masa Depan Tata Kelola Keuangan Pemerintahan
15.	Teknologi Pemerintahan	Informasi	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan keterampilan dan kapabilitas mahasiswa membahas konteks global yang melatarbelakangi perkembangan kajian dan kebijakan aplikasi <i>e-Government</i>, termasuk mengenai perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi dalam era globalisasi serta dampaknya pada manajemen dan pelayanan pemerintahan	Setelah menempuh mata kuliah ini, peserta diharapkan mampu menerangkan dan memiliki keterampilan mengenai beragam kebijakan dan pelayanan sistem informasi yang diaplikasikan dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan.	1. Pengertian-pengertian 2. Kemunculan <i>e-Government</i> 3. Tujuan, Manfaat dan Ruang lingkup <i>e-Government</i> 4. Fase Perkembangan <i>e-Government</i> 5. Dimensi dan Relasi-<i>Government</i> 6. Pembentukan Masyarakat Informasi 7. Pengaruh Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Manajemen Pemerintahan 8. Kebijakan <i>e-Government</i> di Indonesia 9. Elemen-elemen Sukses <i>e-Government</i>

16.	Ekologi Pemerintahan	3	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan mengenai hubungan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dengan berbagai faktor internal dan eksternal, menyangkut struktur, fungsi, proses dan lingkungan pemerintahan baik nasional, global maupun daerah.	Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa akan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam menganalisis berbagai faktor baik internal maupun eksternal penyelenggaraan pemerintahan. Terutama berbagai faktor terkait dengan struktur, fungsi, proses, hubungan kelembagaan dan lingkungan pemerintahan nasional, global dan daerah.	10. Kajian <i>e-Government</i> di Beberapa Negara 11. Inovasi Dalam Teknologi Pemerintahan 12. Tantangan dan Masa Depan Teknologi Pemerintahan
				1. Konsep dan Teori Ekologi Pemerintahan 2. Berbagai variabel dan pendekatan dalam studi ekologi pemerintahan 3. Penyelenggaraan pemerintahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya 4. Teori Organisme dan relasi pemerintahan dalam pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan 5. Hubungan antar lembaga pemerintahan 6. Ekologi Pemerintahan dan Pembangunan Masyarakat 7. Peranan ekologi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan 8. Aspek ipoleksosbud hankam sebagai faktor ekologi pemerintahan dan pengaruhnya dalam pemerintahan Indonesia 9. Kependudukan dan Sumberdaya Manusia dan dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia 10. Pengaruh ekologi pemerintahan terhadap pewujudan Good	

17.	Komunikasi Pemerintahan	3	Mata kuliah ini didesain untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang komunikasi pemerintahan baik komunikasi internal, komunikasi antar lembaga maupun komunikasi dengan pihak luar (Masyarakat dan pihak swasta) terkait dengan penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan dan kontribusi komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan .	Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa memiliki pengetahuan komunikasi pemerintahan dan keterampilan berkomunikasi dalam pemerintahan , memahami fungsi dan kontribusi faktor-faktor komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam konteks nasional, regional dan internasional, memahami pola komunikasi actor pemerintahan dan umpan balik dari masyarakat kepada pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.	Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan 11. Ekologi Pemerintahan dan pengaruhnya dalam kebijakan hubungan Internasional RI 12. Kearifan lokal dalam pembangunan pemerintahan 13. Studi kasus ekologi pemerintahan dalam berbagai permasalahan pemerintahan 14. Tantangan dan Masa Depan Ekologi Pemerintahan	1. Konsep dan Teori Komunikasi dalam Pemerintahan. 2. Aktor dan proses komunikasi pemerintahan. 3. Saluran komunikasi pemerintahan. 4. Peran media komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. 5. Dinamika komunikasi pemerintahan. 6. Opini publik dan komunikasi pemerintahan. 7. Sistem komunikasi dalam komunikasi pemerintahan. 8. Komunikasi pembangunan dan humas dalam pemerintahan. 9. Komunikasi internal kelembagaan dan antar lembaga dalam pemerintahan 10. Faktor-faktor dalam membangun komunikasi pemerintahan yang
-----	-------------------------	---	---	---	---	---

					baik. 11. Etika dalam komunikasi pemerintahan.	
18.	Hukum Pemerintahan	Tata	3	Mata kuliah ini menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan hukum tata pemerintahan, antara lain sumber-sumber hukum tata pemerintahan, susunan pemerintahan Indonesia, keputusan tata usaha negara, badan hukum publik dan privat, barang-barang milik pemerintah atau negara, campur tangan penguasa dalam kehidupan masyarakat, kedudukan hukum para petugas publik, perbuatan pemerintah, keabsahan tindakan pemerintahan, tindakan atau perlindungan hukum di Indonesia, serta peradilan tata usaha negara.	Pada akhir mata kuliah, mahasiswa mampu memahami berbagai pokok kajian yang termasuk dalam ruang lingkup hukum tata pemerintahan, antara lain, pengertian hukum tata pemerintahan, hubungan hukum tata pemerintahan dengan ilmu sosial lain, mengerti dan memahami sumber-sumber hukum tata pemerintahan, susunan pemerintahan pusat dan daerah, keputusan tata usaha negara dan keputusan yang tidak dapat di PTUN-kan, badan hukum publik dan privat, barang-barang milik pemerintah pusat dan daerah, kedudukan hukum para petugas publik, dan lain-lain.	1. Pengertian Hukum Tata Pemerintahan. 2. Sumber Hukum Tata Pemerintahan. 3. Susunan Pemerintahan Indonesia. 4. Keputusan Tata Usaha Negara. 5. Badan Hukum Publik dan Privat. 6. Barang-Barang Milik Pemerintah. 7. Campur Tangan Penguasa Dalam Kehidupan Masyarakat. 8. Kedudukan Hukum Para Petugas Publik. 9. Perbuatan Pemerintah 10. Keabsahan Tindak Pemerintahan 11. Tindakan Atau Perlindungan Hukum Di Indonesia. 12. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) 13. Tantangan dan Masa Depan Hukum Tata Pemerintahan
19.	Metodologi Pemerintahan	Ilmu	3	Mata kuliah ini didesain untuk membentuk kemampuan mahasiswa sehingga dapat memahami gejala-gejala pemerintahan, menganalisa masalah-masalah pemerintahan serta memecahkan berbagai problematika pemerintahan	Setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami, mengembangkan dan membangun konsep, generalisasi, dan teori, serta mampu menggunakan metode dan	1. Ilmu Pemerintahan sebagai suatu Ilmu 2. Perkembangan paradigmatis ilmu pemerintahan 3. Analisa konseptual Metodologi Ilmu Pemerintahan 4. Ontologi, epistemologi dan aksiologi dari Ilmu Pemerintahan

			secara ilmiah dengan menggunakan berbagai metode dan pendekatan. Oleh sebab itu di dalam mata kuliah ini dibahas tentang bagaimana: memahami, menguji, mengembangkan dan membangun suatu konsep, generalisasi dan teori pemerintahan (theory building). Mengkaji metode dan pendekatan-pendekatan analisa apa saja yang bisa digunakan di dalam menganalisa dan memecahkan problematika pemerintahan yang terjadi di lapangan empiris.	pendekatan yang tepat dalam menganalisa gejala-gejala pemerintahan.	5. Pengertian dan keterkaitan konsep, generalisasi dan teori Theory Building 6. Metode dan pendekatan kuantitatif dalam analisa pemerintahan 8. Metode dan pendekatan kualitatif dalam analisa pemerintahan 9. Metode dan pendekatan campuran (mixed Method) dalam analisa pemerintahan 10. Etika dan penelitian pemerintahan 11. Hubungan teori dan penelitian dalam Ilmu Pemerintahan 12. Pengembangan konsep dan teori pemerintahan
--	--	--	--	---	--

Ditetapkan di : Bandung,
 Pada Tanggal: 27 April 2015

 Ketua Umum APSIPI



Prof. Dr. H. Utang Suwaryo, Drs., M.A.